

ANOTASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN

JILID II

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PUSAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2012

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN

Pengarah :
Managam Manurung, S.H., M.Kn.
(Sekretaris Utama)

Penanggung Jawab :
Kurnia Toha, S.H., LL.M. Ph. D.
(Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat)

Ketua :
Luki Ambarwinarti, S.E.
(Kepala Bidang SJDI Hukum)

Sekretaris :
Tanti Wahyuni, S. Kom.
(Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Hukum)

Anggota :
- Reiner Manurung, S.H.
  (Kepala Bidang Perundang-undangan)
- Dwi Tjahyani Novianingsih, S.H.
  (Kepala Sub Bidang Publikasi, Distribusi dan Dokumentasi)
- Ir. Ahmad Syaikhu.
  (Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi)
- Retna Kustiyah, S.H., M.M.
  (Kepala Sub Bidang Pertimbangan dan Bantuan Hukum)
- Drs. Frederik Warwer.
- Agus Setiyadi, S. SiT.
- Eldi, S.H., M.H.
- Rinta Meilawati, S.I.P.

- Nurkhalisah Ismail, S.H.
- Ali Nurinayah, S.H.
- Bambang Sucipto, S.H.
- Tuti Rohayati, S.H.
- Musthofa, S.P.
- Arif Febriyanto, S.H.
- Yanti Kusumadewi
- Hesty Febriarty

Terbit Tahun 2012

Diterbitkan Oleh :
Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat
Badan Pertanahan Nasional RI
Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru
Jakarta

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya memperluas jangkauan buku Anotasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Jilid I yang mencatat perkembangan Status Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Penetapan Presiden Yang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang Menjadi Undang-Undang, yang telah kami terbitkan pada bulan September 2012, kami terbitkan kembali buku Anotasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Jilid II yang mencakup perkembangan Status *Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Teknis lainnya* baik yang berkaitan dengan pertanahan maupun tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

Buku Anotasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Jilid II ini merupakan wujud komitmen kami dalam menerbitkan buku-buku referensi sebagai sarana penelusuran produk hukum peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pertanahan selama tahun 1950 hingga 2012.

Sebagai alat dokumentasi hukum yang menelusuri rangkaian hubungan pelaksanaan serta status tiap-tiap ketentuan hukum, kami yakin buku Anotasi ini akan dapat membantu penelusuran peraturan perundang-undangan yang muktahir, bagi para profesi hukum, peneliti, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah serta memungkinkan langkah-langkah kearah kepastian hukum yang didambakan khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum pertanahan.

Format, tata letak maupun penyusunan dalam buku anotasi ini tetap mengacu pada konsep TAPIS (Gregory Chruchill dan Wirawan Martoredjo, Pedoman Pembuatan Tabel Penunjuk Inti Sari Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1978).

Kami berharap buku anotasi ini, walaupun dalam penyusunannya terdapat kekuranglengkapan, semoga dapat membantu para profesi hukum, peneliti, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah sebagai alat dokumentasi hukum untuk menelusuri rangkaian hubungan, pelaksanaan serta status tiap-tiap ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan pertanahan.

Jakarta, Nopember 2012
Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19610617 198803 1 001

DAFTAR SINGKATAN STATUS
BERDASARKAN KALIMAT-KALIMAT
YANG DITEMUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria. Disahkan pada
A | tanggal 24 September 1960.
i : Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Singkatan Status	Keterangan	
c	B dicabut oleh A	(A mencabut B)
h	B dihapuskan oleh A	(A menghapuskan B)
i	B diingat dalam A	(A mengingat B)
mb	B dinyatakan berlaku oleh A	(A menyatakan B berlaku)
p	B diperhatikan dalam A	(A memperhatikan B)
sah	B disahkan oleh A	(A mensahkan B)
sem	B disempurnakan oleh A	(A menyempurnakan B)
t	B ditimbang (dipertimbangkan) dalam A	(A menimbang B)
tbl	B dinyatakan tidak berlaku oleh A	(A menyatakan B tidak berlaku)
tbps	B dinyatakan tidak berlaku pada saat undang-undang yang menggantinya mulai berlaku oleh A	(A menyatakan bahwa B tidak berlaku pada saat undang-undang yang menggatinya mulai berlaku)
tmb	B ditambah oleh A	(A menambah B)
u	B diubah (dirubah) oleh A	(A mengubahkan (merubahkan) B)
uu	B diangkat menjadi (ditetapkan menjadi) undang-undang oleh A	(A mengundangkan B)

SINGKATAN DAN AKRONIM
YANG TERDAPAT DALAM BUKU

BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
D.I	:	Daerah Istimewa
D.I.Y	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
Dati I	:	Daerah Tingkat I
Dati II	:	Daerah Tingkat II
DDN	:	Departemen Dalam Negeri
dg	:	Dengan
DIRJEN	:	Direktur Jenderal
DJA	:	Direktorat Jenderal Agraria
Dlm	:	Dalam
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	:	Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong
IB	:	Instruksi Bersama
IKBPN	:	Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional
IMDN	:	Instruksi Menteri Dalam Negeri
IMNA/KBPN	:	Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
INPRES	:	Instruksi Presiden
IPLP	:	Instruksi Panitia Landreform Pusat
IYDL	:	Instruksi Yayasan Dana Landreform
Jo.	:	Juncto
Kab.	:	Kabupaten
Kec.	:	Kecamatan
KEPDIRJEN	:	Keputusan Direktur Jenderal
KEPKBPN	:	Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
KEPMEN	:	Keputusan Menteri
KEPMEN PERTAMA	:	Keputusan Menteri Pertama
KEPPRES	:	Keputusan Presiden
KMA	:	Keputusan Menteri Agraria
KMDN	:	Keputusan Menteri Dalam Negeri
KMMA	:	Keputusan Menteri Muda Agraria
KMNA/KBPN	:	Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN
KMPA	:	Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria
Lamp.	:	Lampiran
LN	:	Lenbaran Negara

MK RI	:	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
N.V	:	Naamloooze Vennootschap
No.	:	Nomor
PED. MPA	:	Pedoman Menteri Pertanian & Agraria
PED. DEP. AGR.	:	Pedoman Departemen Agraria
PEDPEL	:	Pedoman Pelaksanaan
Pelaks.	:	Pelaksanaan
PENGUM. DEP. AGR.	:	Pengumuman Departemen Agraria
PERDIRJEN	:	Peraturan Direktur Jenderal
PERKBPN	:	Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional
PERMEN	:	Peraturan Menteri
PERPRES	:	Peraturan Presiden
PERPU	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Persero	:	Perusahaan Perseroan
Perum	:	Perusahaan Umum
PMA	:	Peraturan Menteri agraria
PMDN	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PMMA	:	Peraturan Menteri Muda Agraria
PMNA/KBPN	:	Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN
PMPA	:	Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria
PN	:	Perusahaan Negara
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PP	:	Peraturan Pemerintah
Prop.	:	Provinsi
Prp.	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Ps.	:	Pasal
PT.	:	Perseroan Terbatas
Put.	:	Putusan
R.I	:	Republik Indonesia
R.I.S	:	Republik Indonesia Serikat
S.D.	:	Sampai Dengan
SE KBPN	:	Surat atau Surat Edaran Kepala BPN
SE MA	:	Surat atau Surat Edaran Menteri Agraria
SE MDN	:	Surat atau Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
SE MMA	:	Surat atau Surat Edaran Menteri Muda Agraria
SE MNA/KBPN	:	Surat atau Surat Edaran Menteri Negara Agraria/

		Kepala BPN
SE MPA	:	Surat atau Surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria
SE PLP	:	Surat atau Surat Edaran Panitia Landreform Pusat
SE SESMEN	:	Surat atau Surat Edaran Sekretaris Menteri
SE WKBPN	:	Surat atau Surat Edaran Wakil Kepala BPN
SE YDL	:	Surat atau Surat Edaran Yayasan Dana Landreform
SKB	:	Keputusan Bersama
Stbl.	:	Staatsblad
TAP MPR	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TAP MPRS	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Tbk.	:	Terbuka
TLN	:	Tambahan Lembaran Negara
Ttg	:	Tentang
UU	:	Undang-undang
UU Pnps	:	Penetapan Presiden yang Menjadi Undang-Undang
UU Prps	:	Peraturan Presiden yang Menjadi Undang-Undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar 1945
UUDRT	:	Undang-Undang Darurat
Wil	:	Wilayah
Yg	:	Yang

PEDOMAN PENGGUNAAN

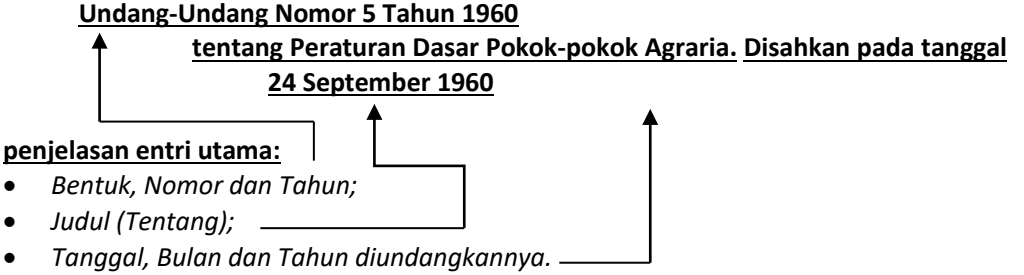
Pekerjaan menyusun buku Anotasi merupakan pekerjaan membaca bahan-bahan hukum secara teliti dan konsisten mencatat keterangan-keterangan yang secara khusus disebut dalam Peraturan Perundangan-Undangan, seperti didalam *konsideransnya* dengan pokok penyebutannya berupa: **ditimbang, diingat, didengar, atau diperhatikan** atau di dalam pasal-pasalnya dimana pokok penyebutan berupa: **dibatalkan, dicabut, dihapus, diubah, diingat, dinyatakan tidak berlaku** dan sebagainya.

Ketika mencari suatu undang-undang dan menemukannya, timbul pertanyaan apakah undang-undang tersebut yang paling mutakhir? Masih berlaku atau sudah dicabut? Peraturan-peraturan apa saja yang menjadi pelaksana dari undang-undang tersebut? Dan pertanyaan itu mengalir terus seiring dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan sehingga kelengkapannya tidak diragukan lagi. Buku Anotasi ini disusun dengan sederhana untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut di atas setidaknya hingga tahun 2012 disusun dari sumber himpunan yang diperoleh dari koleksi, dokumentasi dan informasi di Bidang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI.

Guna memudahkan pengguna, sebagai panduan kami sertakan di bawah ini beberapa contoh entri anotasi yang dapat membantu pengguna mencari dan memanfaatkan keterangan yang dicatat di bawah entri tersebut.

Entri Utama.

Sebagai entri utama dalam buku anotasi tercetak dengan huruf **tebal (bold)** disusun berdasarkan urutan bentuk, nomor, dan tahun.

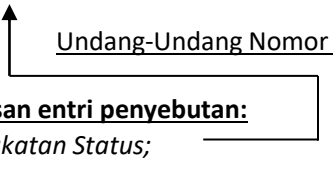


Entri Penyebutan

Pecatatan entri penyebutan dalam buku anotasi ini adalah pencatatan semua peraturan-peraturan yang berkaitan setelah peraturan itu diundangkan sampai dengan tahun 2012, dan disusun berdasarkan **Bentuk**, **Nomor** dan **Tahun Peraturan**. *Singkatan*

status, seperti **t**, **i** dan **tbl**, letaknya di bagian depan setiap barisnya, yang tetap disusun berdasarkan bentuk, nomor dan tahun.

i: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang



i: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

penjelasan entri penyebutan:

- *Singkatan Status;*
- *Bentuk, Nomor, Tahun dan Judul (Tentang).*

Di bawah ini beberapa contoh entri yang ada pada buku anotasi secara lengkap.

1. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1958.

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958

tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Disahkan Pada Tanggal 27 Desember 1958.

i: Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk. 37/Ka/1964 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963.

i: Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 5/Depag/1965 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963 Bagi P.N.P.R. Wisayayasa.

Entri ini berarti bahwa *Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda* yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1958 telah *diingat (i)* oleh Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk. 37/Ka/1964 dan Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 5/Depag/1965.

---

2. Undang-Undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan yang diundangkan pada tanggal 14 Oktober 1960.

Undang-Undang No. 37 Prp tahun 1960
tentang Pertambangan. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1960.

c: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Entri ini berarti bahwa *Undang-Undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan* yang diundangkan pada tanggal 14 Oktober 1960 telah *dicabut (c)* oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

---

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 1992

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
tentang Keimigrasian. Disahkan pada tanggal 31 Maret 1992.

i: PMNA/KBPN No.7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i: PMNA/KBPN No.8 Tahun 1996 Tentang Perubahan PMNA/KBPN No.7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

c: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

tbl: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Entri ini berarti bahwa *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian* yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 1992 telah *diingat (i)* oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996, telah *dicabut (c)* oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan telah *dinyatakan tidak berlaku lagi (tbl)* oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

DAFTAR ISI

Kata pengantar iv
Daftar Singkatan Status vi
Singkatan dan Akronim vii
Pedoman Penggunaan x
Daftar Isi xiii
Anotasi Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 1950 1
Tahun 1952 2
Tahun 1953 5
Tahun 1954 8
Tahun 1955 10
Tahun 1956 11
Tahun 1957 12
Tahun 1958 13
Tahun 1959 15
Tahun 1960 24
Tahun 1961 29
Tahun 1962 45
Tahun 1963 48
Tahun 1964 51
Tahun 1965 55
Tahun 1966 58
Tahun 1967 59
Tahun 1968 61
Tahun 1969 63
Tahun 1970 65
Tahun 1971 68
Tahun 1972 70
Tahun 1973 74
Tahun 1974 80
Tahun 1975 86
Tahun 1976 91
Tahun 1977 94
Tahun 1978 100
Tahun 1979 104
Tahun 1980 109

Tahun 1981 116
Tahun 1982 122
Tahun 1983 130
Tahun 1984 134
Tahun 1985 140
Tahun 1986 147
Tahun 1987 153
Tahun 1988 156
Tahun 1989 167
Tahun 1990 175
Tahun 1991 183
Tahun 1992 190
Tahun 1993 199
Tahun 1994 209
Tahun 1995 218
Tahun 1996 226
Tahun 1997 237
Tahun 1998 250
Tahun 1999 263
Tahun 2000 275
Tahun 2001 286
Tahun 2002 295
Tahun 2003 303
Tahun 2004 313
Tahun 2005 318
Tahun 2006 330
Tahun 2007 352
Tahun 2008 365
Tahun 2009 373
Tahun 2010 378
Tahun 2011 385
Tahun 2012 389

Daftar Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Pendaftaran tanah 393
.....
Daftar Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Pemberian Hak 410
.....

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 1950

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Mobil Untuk Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1950.

c: PP No. 39 Tahun 1952 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil. Disahkan pada 11 September 1952.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Parindra dan PIR Dijadikan Partij Yang Boleh Menempatkan Wakilnya pada Badan Pekerja. Disahkan pada tanggal 15 Juli 1950.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU No. 2, 3, 10 dan 11 dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, Timur, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU Tahun 1950 No. 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1950. (Jogjakarta)

Tentang Uang Sewa Gedung-gedung Milik Partikelir Yang Dipergunakan Oleh Instansi-instansi Pemerintah Sipil. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950.

Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950 (LN No. 59).

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1952

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1952

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952

Tentang Pemberhentian dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 20 Pebruari 1952 (LN No. 13 & TLN No. 199).

u: PP No. 26 Tahun 1953 tentang Perubahan PP No. 8 Tahun tentang Pemberhentian dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 28 Mei 1953.

c: PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pembebasan Pegawai Negeri dari Kewajibannya untuk Membantu Pusat. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 1956.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952

Tentang Daftar Susunan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 20 Pebruari (LN No. 14 & TLN No. 200)

c: PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 25 Juni 1979.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952

Tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 20 Pebruari 1952 (LN No. 15 & TLN No. 201)

c: PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 15 Mei 1979 (LN No. 17 & TLN No. 3134).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952

Tentang Hukuman Jabatan. Disahkan pada tanggal 20 Pebruari 1952 (LN No. 16 & TLN No. 202).

u: PP No. 32 Tahun 1952 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 1952 Mengenai Hukuman Jabatan. Disahkan pada tanggal 31 Juli 1952.

c: PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1980.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952

Tentang Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir. Disahkan pada tanggal 20 Pebruari 1952.

u: PP No. 8 Tahun 1956 tentang Perubahan PP No. 12 Tahun 1952 mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 1956.

c: PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta. Disahkan pada tanggal 5 Maret 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1952

Tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 1952 Mengenai Hukuman Jabatan. Disahkan pada tanggal 31 Juli 1952 (LN No. 45 & TLN N0. 260).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952

Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1952 (LN No. 47)

u: PP No. 1 Tahun 1953 tentang Perubahan PP No. 33 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952

Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1952 (LN No. 48)

u: PP No. 2 Tahun 1953 tentang Perubahan PP No. 34 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952.

Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara. Disahkan Pada Tanggal 12 Agustus 1952 (LN No. 49).

u: PP No. 3 Tahun 1953 tentang Perubahan PP No. 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953.

i: PP No. 35 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1952

Tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil. Disahkan pada tanggal 11 September 1952 (LN No. 61 & TLN No. 278).

c: Perpres No. 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara untuk Dinas-dinas Sipil. Disahkan pada tanggal 27 April 1961.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1953

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1953

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1953

Tentang Perubahan PP No. 33 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953 (LN No. 1).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953

Tentang Perubahan PP No. 34 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953 (LN No. 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953

Tentang Perubahan PP No. 35 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953 (LN No. 3).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953

Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Disahkan Pada Tanggal 24 Januari 1953 (LN No.14 & TLN No. 362).

t: PMA No. 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. Disahkan pada 6 Desember 1965.

i: PMA No. 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. Disahkan pada 6 Desember 1965.

i: Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 18 juli 1993.

i: PMNA/KPBN No. 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada 14 Juni 1994.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953

Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Utara dan Pembentukan Daerah Tersebut sebagai Daerah yang Bersifat Satuan Kenegaraan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Disahkan Pada Tanggal 9 Pebruari 1953 (LN No. 17 & TLN No. 367).

u: PP No. 23 Tahun 1954 tentang Pengubahan PP No. 11 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Utara dan Pembentukan Daerah Tersebut sebagai Daerah yang Bersifat Satuan Kenegaraan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Disahkan pada 19 Maret 1954.

u: PP No. 24 Tahun 1954 tentang Pembentukan Wil. Gabungan Bolaang Mongondow sbg Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya. Disahkan pada 19 Maret 1954.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953

Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi-Propinsi Dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil. Disahkan Pada Tanggal 16 April 1953 (LN No. 31 & TLN No. 395).

u: PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 44, 45, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954. Disahkan pada 9 Agustus 1957.

i: Keppres No. 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

i: PMDN No. 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah. Disahkan pada 5 Januari 1987.

c: PP No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah. Disagkan pada 27 Juni 1987.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1953

Tentang Perubahan PP No. 8 Tahun 1952 mengenai Pemberhentian dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu dan Pemberhentian dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 28 Mei 1953 (LN No. 50 & TLN No. 421).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1953

Tentang Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado Yang Berhak dan Mengatur Rumah Tangganya Sendiri. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1953 (LN No. 87 & TLN No. 491).

u: PP No. 56 Tahun 1954 tentang Perubahan PP No. 42 Tahun 1953 tentang Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado Yang Berhak dan Mengatur Rumah Tangganya Sendiri. Disahkan pada 21 Oktober 1954.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 1954

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1954

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1954

Tentang Tunjangan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa CalonPegaai Negeri Sipil yang Belajar di dalam dan di Luar Negeri. Disahkan pada tanggal 9 Maret 1954 (LN No. 27 & TLN No. 530).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1954

Tentang Pengubahan PP No. 11 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Utara dan Pembentukan Daerah Tersebut sebagai Daerah yang Bersifat Satuan Kenegaraan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

u: PP No. 24 Tahun 1954 tentang Pembentukan Wil. Gabungan Bolaang Mongondow Sbg Daerah yg Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Disahkan pada 19 Maret 1954.

u: PP No. 55 Tahun 1958 tentang Mengubah dan Menambah ketentuan Mengenai Pangkat Guru Besar dan Presiden Universitas Pada Perguruan Tinggi (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dalam Daftar Pangkat dan Aturan Khusus Golongan Gaji F pada Lampiran A dari PGPN 1955.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1954

Tentang Pembentukan Wil. Gabungan Bolaang Mongondow Sbg Daerah yg Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Disahkan pada 19 Maret 1954 (LN No. 43 & TLN No. 554).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954

Tentang Pemberian Persekot Hari Raya kepada Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 19 Maret 1954 (LN No. 46 & TLN No. 556).

u: PP No. 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan PP No. 27 Tahun 1954 Mengenai Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 24 Pebruari 1959.

u: PP No. 234 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Penambahan PP No. 27 Tahun 1954 tentang Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1955

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1955

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955

Tentang Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama untuk Kapal-kapal. Disahkan pada tanggal 3 maret 1955 (LN No. 12 & TLN No. 771).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955

Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Disahkan pada tanggal 31 Mei 1955 (LN No. 30 & TLN No. 809).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1955

Tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai-pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1955 (LN No. 50 & TLN No. 854).

c: UU Drt No. 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1955.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1955

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955

Tentang Pembentukan Kementerian Agraria. Disahkan pada tanggal 29 Maret 1955

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 1956

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1956

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1956

Tentang Perubahan PP No. 12 Tahun 1952 mengenai Penghasilan & Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikulir. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 1956 (LN No. 11 & TLN No. 962).

c: PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta. Disahkan pada tanggal 5 Maret 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1956

Tentang Tambang Minyak Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1956 (LN No. 69 & TLN No. 1120)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956

Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan Konsesi. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1956 (LN No. 71 & TLN No. 1122).

u: PP No. 21 Tahun 1959 tentang Perubahan Dan Tambahan PP No. 35 Tahun 1959. Diahkan pada tanggal 2 Mei 1959.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1956

Tentang Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan Konsesi. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1956 (LN No. 72 & TLN No. 1123).

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 1957

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1957

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957

Tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah. Disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1957 (LN No. 10 & TLN No. 1155).

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1957

Tentang Penyerahan Tugas Mengenai Rumah-rumah/ Pekarangan-pekarangan Milik Partikulir yg Diperlukan Oleh Instansi Pemerintah Sipil Kepada Masing-masing Kementerian Yang Bersangkutan. Disahkan pada tanggal 12 Nopember 1957. (LN No. 157 & TLN No. 1473)

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957

tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat. Disahkan Pada Tanggal 18 Desember 1957.

i: Kepres No. 23 Tahun 1982 Tentang Pengembangan Budidaya Laut Di Perairan Indonesia.
Pasal 9 – 12

c: PP No. 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri. Disahkan pada 3 Juni 1987.

c: PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Disahkan pada 23 Juni 1998.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 1958

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1958

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958

tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Daerah Tingkat I. Disahkan Pada Tanggal 28 Januari 1958 (LN No. 10).

i: PMDN No. 3 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1958

Tentang Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda. Disahkan pada tanggal 26 Pebruari 1958 (LN No. 19 & TLN No. 1549).

c: PP No. 37 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pusat Penyelenggaraaan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang. Disahkan pada 7 Desember 1968.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1958

Tentang Penetapan Persentase Dari Penerimaan Beberapa Pajak Negara Untuk Daerah. Disahkan pada tanggal 6 Maret 1958 (LN No. 23 & TLN No. 1552)

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958

Tentang Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. Disahkan Pada Tanggal 25 Maret 1958 (LN No. 32 & TLN No. 1561).

u: PP No. 37 Tahun 1963 Tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1958.

i: KMNA/KBPN No.12 Tahun 1999 Tentang Pencabutan KMNA/KBPN Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena UU No. 1 Tahun 1958.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1958

Tentang Penempatan Semua Bank Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah RI dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda. Disahkan Pada Tanggal 16 April 1958 (LN No. 38).

u: PP No. 8 Tahun 1959 tentang Penambahan PP No. 22 Tahun 1958 tentang Penempatan Semua Bank Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah RI dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda.

c: PP No. 222 Tahun 1961 tentang Pembubaran Badan Pengawas Bank-bank Belanda.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958

Tentang Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Indonesia. **Disahkan pada tanggal 16 April 1958 (LN No. 39 & TLN No. 1565).**

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1958

Tentang Penempatan Perusahaan-perusahaan Perkebunan Pertanian Milik Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah RI. Disahkan pada tanggal 16 April 1958 (LN No. 40 & TLN No. 1566).

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1958

Tentang Prosedur Pembelian Barang-barang Pemerintah. Disahkan pada tanggal 11 April 1958 (LN No. 45 & TLN No. 1571).

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1958

Tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan[2] Pertanian Rakyat, Kehewanan dan Perikanan Darat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1958 (LN No. 120 & TLN No. 1654).

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958

Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1958 (LN No. 140 & TLN No. 1670).

u: PP No. 13 Tahun 1959 tentang Pengubahan PP No.56 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1959

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1959

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1959

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perancang Nasional (UU No. 80 Tahun 1958). Disahkan pada tanggal 14 Januari 1959 (LN No. 2 & TLN No. 1728).

u: PP No. 44 Tahun 1959 tentang Pengubahan PP No. 1 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan UU Dewan Perancang Nasional. Disahkan pada 28 September 1959.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (UU No. 86 Tahun 1958). Disahkan pada tanggal 23 Pebruari 1959 (LN No. 5 & TLN No. 1730).

i: PP No. 33 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Dagang yg Besar Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya dan Anak-anak Perusahaannya yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959.

i: PP No. 39 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1959.

i: PP No. 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Kereta Api Milik Belanda. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1959.

i: PP No. 41 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1959.

i: PP No. 45 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim Belanda. Disahkan pada tanggal 28 September 1959.

i: PP No. 50 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/ Pertambangan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959.

i: PP No. 51 Tahun 1959 Tentang Penentuan Pengenaan Nasionalisasi Percetakan Kebayoran PT. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959.

i: PP No. 52 Tahun 1959 Tentang Penetapan Perusahaan Percetakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959.

i: PP No. 1 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Pharmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

i: PP No. 2 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pemborongan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

i: PP No. 3 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

i: PP No. 13 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahan Bank di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

i: PP No. 29 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian / Perkebunan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1960.

i: PP No. 30 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1960.

i: PP No. 33 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

i: PP No. 34 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Perusahaan NV. KPM di Indonesia. Disahkan pada tanggal 24 September 1960.

i: PP No. 35 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Perusahaan NV. Semarangsche Stomboot en Prauwer Veer (SSPV) dan NV. Semarang Veer. Disahkan pada tanggal 30 September 1960.

i: PP No. 44 Tahun 1960 tentang Penambahan PP No.13 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1960.

i: PP No. 48 Tahun 1960 tentang Tentang Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 30 Nopember 1960.

i: PP No. 50 Tahun 1960 Tentang Penambahan PP No.1 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1960.

i: PP No. 52 Tahun 1960 Tentang Tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan Royal Interocean Lines (RIL). Disahkan pada tanggal 23 Desember 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959

Tentang Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Disahkan pada tanggal 23 Pebruari 1959 (LN No. 6 & TLN No. 1731).

i: PP No. 33 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Dagang yg Besar Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya dan Anak-anak Perusahaannya yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959.

i: PP No. 39 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1959.

i: PP No. 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Kereta Api Milik Belanda. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1959.

i: PP No. 41 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1959.

i: PP No. 45 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim Belanda. Disahkan pada tanggal 28 September 1959.

i: PP No. 50 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/ Pertambangan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959.

i: PP No. 51 Tahun 1959 Tentang Penentuan Pengenaan Nasionalisasi Percetakan Kebayoran PT. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959.

i: PP No. 52 Tahun 1959 Tentang Penetapan Perusahaan Percetakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959.

i: PP No. 1 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Pharmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

i: PP No. 2 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pemborongan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

i: PP No. 3 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

i: PP No. 13 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahan Bank di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

i: PP No. 29 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian / Perkebunan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1960.

i: PP No. 30 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1960.

i: PP No. 33 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

i: PP No. 34 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Perusahaan NV. KPM di Indonesia. Disahkan pada tanggal 24 September 1960.

i: PP No. 35 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Perusahaan NV. Semarangsche Stomboot en Prauwer Veer (SSPV) dan NV. Semarang Veer. Disahkan pada tanggal 30 September 1960.

i: PP No. 44 Tahun 1960 tentang Penambahan PP No.13 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1960.

i: PP No. 48 Tahun 1960 tentang Tentang Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 30 Nopember 1960.

i: PP No. 50 Tahun 1960 Tentang Penambahan PP No.1 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1960.

i: PP No. 52 Tahun 1960 Tentang Tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan Royal Interocean Lines (RIL). Disahkan pada tanggal 23 Desember 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959

Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian Perkebunan Tembakau Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 23 Pebruari 1959 (LN No. 7 & TLN No. 1732).

i: PP No. 33 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Dagang yg Besar Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya dan Anak-anak Perusahaannya yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959.

i: PP No. 30 Tahun 1960 Tentang Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1959

Tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 1954 Mengenai Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 23 Pebruari 1959.

u: PP No. 234 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Penambahan PP No. 27 Tahun 1954 tentang Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959

Tentang Perubahan PP No. 27 Tahun 1954 Mengenai Pemberian Penambahan PP No. 22 Tahun 1958 tentang Penetapan Semua Bank Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-Bank Belanda. Disahkan pada tanggal 20 Maret 1959 (LN No. 14 & TLN No. 1749).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959

Tentang Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan ganti Kerugian. Disahkan pada tanggal 2 April 1959 (LN No. 16 & TLN No. 1753).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959

Tentang Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 2 April 1959 (LN No. 22).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959

Tentang Pengubahan PP No. 56 Tahun1958 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 17 April 1959. (LN No. 25)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1959

Tentang Penetapan Persentasi dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah. Disahkan pada tanggal 17 April 1959 (LN No. 26 & TLN No. 1760).

u: PP No. 24 Tahun 1960 tentang Perpanjangan Waktu Berlakunya PP No. 14 Tahun 1959.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959

Tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 2 Mei 1959.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959

Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/ Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 2 Mei 1959 (LN No. 31 & TLN No. 1764)

i: PP No. 33 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Dagang yg Besar Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya dan Anak-anak Perusahaannya yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959.

i: PP No. 30 Tahun 1960 Tentang Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959

Tentang Pelaksanaan UU No. 10 Th.1959 ttg Pembatalan Hak-hak Pertambangan. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959

Tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959 (LN No. 51 & TLN No. 1796).

c: PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959

Tentang Penentuan Perusahaan Dagang yg Besar Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya dan Anak-anak Perusahaannya yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959 (LN No. 53 & TLN No. 1798)

i: PP No. 30 Tahun 1960 Tentang Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1959

Tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1959 (LN No. 84 & TLN No. 1826)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959

Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Kereta Api Milik Belanda. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1959 (LN No. 86).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959

Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1959 (LN No. 87)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1959

Tentang Pengubahan PP No. 1 Tahun 1959 ttg Pelaksanaan Undang-Undang ttg Perancang Nasional. Disahkan pada tanggal 28 September 1959 (LN No. 114 & TLN No. 1876).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1959

Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim Belanda. Disahkan pada tanggal 28 September 1959 (LN No. 115 & TLN No. 1877).

i: PP No. 35 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Perusahaan NV. Semarangsche Stomboot en Prauwer Veer (SSPV) dan NV. Semarang Veer. Disahkan pada tanggal 30 September 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1959

Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perancang Nasional. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959 (LN No. 120).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959

Tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/ Pertambangan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959 (LN No. 121 & TLN No. 1889).

i: PP No. 30 Tahun 1960 Tentang Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1959

Tentang Penentuan Pengenaan Nasionalisasi Percetakan Kebayoran PT. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959 (LN No. 122 & TLN No. 1890).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1959

Tentang Penetapan Perusahaan Percetakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959 (LN No. 123 & TLN No. 1891).

PERATURAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1959 (PMA)

Peraturan Menteri Agraria No. 1 tahun 1959

i: PMPA No. 7 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Konversi Izin Pakai Tanah Di Kebayoran Baru.

Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1959

c: PMA No. 15 Tahun 1959 Tentang Pemberian Dan Pembaharuan Beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai Tata Cara Kerja Bagi Pejabat-Pejabat Yang Bersangkutan.

Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959

t: PMPA No. 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut PP No. 10 Tahun 1961.

Peraturan Menteri Muda Agraria Nomor 15 Tahun 1959

Tentang Pemberian Dan Pembaharuan Beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai Tata Cara Kerja Bagi Pejabat-Pejabat Yang Bersangkutan. Disahkan Pada Tanggal 22 Oktober 1959.

t: PMDN No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1960

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960

Tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Pharmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 16 Januari 1960 (LN No. 4).

t: PP No. 50 Tahun 1960 Tentang Penambahan PP No.1 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960

Tentang Penentuan Perusahaan Pemborongan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 16 Januari 1960 (LN No. 5).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960

Tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 16 Januari 1960 (LN No. 6).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960

Tentang Penentuan Perusahan Bank di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 23 Maret 1960 (LN No. 35).

t: PP No. 44 Tahun 1960 tentang Penambahan PP No.13 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi.

tmb: PP No. 44 Tahun 1960 tentang Penambahan PP No.13 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960

Tentang Perpanjangan Waktu Berlakunya PP No.14 Tahun1959. Disahkan pada tanggal 4 Mei 1960 (LN No. 60).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960

Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian / Perkebunan Milik Belanda yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1960 (LN No. 89)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960

Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang-cabangnya yg Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1960 (LN No. 90 & TLN No. 2027).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1960

Tentang Penentuan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1960 (LN No. 99).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1960

Tentang Nasionalisasi Perusahaan NV. KPM di Indonesia. Disahkan pada tanggal 24 September 1960 (LN No. 106).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960

Tentang Nasionalisasi Perusahaan NV. Semarangsche Stomboot en Prauwer Veer (SSPV) dan NV. Semarang Veer. Disahkan pada tanggal 30 September 1960 (LN No. 111).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960

Tentang Penambahan PP No.13 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1960 (LN No. 142 & TLN No. 2099).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1960

Tentang Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 30 Nopember 1960 (LN No. 149 & TLN No. 2097)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1960

Tentang Penambahan PP No.1 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1960 (LN No. 166).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960

Tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah Ancol. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1960. (LN No. 167 & TLN No. 2110).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1960

Tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan Royal Interocean Lines (RIL). Disahkan pada tanggal 23 Desember 1960 (LN No. 168 & TLN No. 2111).

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 1960

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1960

Tentang Kekayaan Yang Dikelola oleh Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak. Disahkan pada tanggal 23 Maret 1960 (LN No. 34 & TLN No. 1959)

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Pembentukan Propinsi Administratif Sulawesi Utara dan Propinsi Administratif Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 31 Maret 1960 (LN No. 38 & TLN No. 1963).

PERATURAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1960
(PMA)

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960

Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Disahkan Pada Tanggal 10 Oktober 1960.

i: PMA No. 5 Tahun 1960 Tentang Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960.

i: PMA No. 4 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Concessie Dan Sewa Untuk Perusahaan Kebun Besar.

i: PMA No. 13 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti.

t: PMPA No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

i: PMPA No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

t: PMPA No. 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMA No. 7 Tahun 1965 Tetang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut Dalam Ayat 3 Yo Ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria Yang Dibebani Dengan Hak Opstal Atau Erfpacht Untuk Perumahan.

i: PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960. Disahkan pada tanggal 24 Desember 1960.

i: PMA No. 13 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti.

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1960
(KMA)

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 330/Ka/1960

Tentang Panitya-Panitya Pelaksana Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda. Disahkan Pada Tanggal 17 Pebruari 1960.

Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk.332/Ka/1960

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Disahkan pada tanggal 8 Pebruari 1960.

i: PMA No. 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil

Keputusan Menteri Agraria 1960 No. SK 860/Ka/1960

tanggal 25 Oktober 1960.

c PMA No. 6 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani.

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 951/Ka/1960

Tentang Pelaksanaan U.U. No. 3 Prp. Tahun 1960 Untuk Daerah Kota Pradja Djakarta-Raya. Disahkan Pada Tanggal 24 Desember 1960.

Keputusan Menteri Agraria No. SK. 978/Ka/1960

Tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian. Disahkan Pada Tanggal 31 Desember 1960.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1961

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961

Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang Dikenakan Rasionalisasi. Disahkan pada tanggal 5 Januari 1961 (LN No. 1 & TLN No. 2122).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961

Tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Rasionalisasi. **Disahkan pada tanggal 5 Januari 1961 (LN No. 2 & TLN No. 2123).**

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961

tentang Pendaftaran Tanah. Disahkan pada tanggal 23 Maret 1961 (LN No. 28 & TLN No. 2171).

i: PMA No. 8 Tahun 1961 Tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak. Disahkan pada 7 September 1961.

t: PMA No. 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya. Disahkan pada 7 September 1961.

i: PMA No. 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya.

t: PMA No. 11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta. Disahkan pada 7 September 1961.

i: PMA No. 11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta.

i: PMA No. 13 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti. Disahkan pada 23 September 1961.

t: PMA No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.

i: PMA No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.

t: PMA No. 15 Tahun 1961 Tentang Pembebanan Dan Pendaftaran Hypotheek Serta Credietverband.

i: PMA No. 15 Tahun 1961 Tentang Pembebanan Dan Pendaftaran Hypotheek Serta Credietverband.

t: PMPA No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Disahkan pada 1 Agustus 1962.

i: PMPA No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

i: PMPA No. Sk. 8/Ka/1963 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-Perusahaan Negara Dan Bank-Bank Negara. Disahkan pada 28 Pebruari 1963.

t: PMPA No. 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMPA No. 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut PP No. 10 Tahun 1961. Disahkan pada 7 Maret 1964.

i: KMPA No. Sk. 37/Ka/1964 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk. 8/Ka/1963. Disahkan pada 6 April 1964

i: KMA No. Sk. 5/Depag/1965 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.8/Ka/1963 Bagi P.N.P.R. Wisayayasa. Disahkan pada 30 Januari 1965

t: PMA No. 6 Tahun 1965 Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam PP No. 10 Tahun 1961. Disahkan pada 27 Agustus 1965.

i: PMA No. 6 Tahun 1965 Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMA No. 7 Tahun 1965 Tetang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut Dalam Ayat 3 Yo Ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi

UU Pokok Agraria Yang Dibebani Dengan Hak Opstal Atau Erfpacht Untuk Perumahan.

i: PMA No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan.

i: PMDN No. Sk. 41/DDA/1969 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah

i: PMDN No. 2 Tahun 1970 Tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat Menjadi Hak Guna Bangunan Dan Hak Guna Usaha. Disahkan pada 14 Mei 1970.

i: KMDN No. Sk. 26/DDA/1970. Tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Disahkan pada 14 Mei 1970.

i: PMDN No. Sk.59/DDA/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah. Disahkan pada 21 Oktober 1970.

t: KMDN No. Sk. 19/DDA/1971 Tentang Pembentukan Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: KMDN No. Sk. 19/DDA/1971 Tentang Pembentukan Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMDN No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

t: PMDN No. 14 Tahun 1975 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Di Atasnya Serta Penerbitan Sertipikatnya.

i: PMDN No. 14 Tahun 1975 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Di Atasnya Serta Penerbitan Sertipikatnya.

t: PMDN No. 16 Tahun 1975 Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMDN No. 16 Tahun 1975 Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMDN No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

t: PMDN No. 2 Tahun 1977 Tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji Bagi Para Penjabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMDN No. 2 Tahun 1977 Tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji Bagi Para Penjabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMDN No. 4 Tahun 1977 Tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Bersamadan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Diatasnya.

t: PMDN No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

i: PMDN No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

i: PMDN No. 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

i: PMDN No. 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual.

i: KMDN No. 12 Tahun 1978 Tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi. Disahkan pada 21 Januari 1978.

i: PMDN No. 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

i: PMDN No. 10 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Secara Fotogrametris.

i: PMDN No. 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Tertentu Pada PMDN No. 2 Tahun 1978.

i: PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

i: KMDN No. 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

i: KMDN No. 220 Tahun 1981 Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yangn Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

i: PMDN No. 10 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan

Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1988 Tentang Penyesuaian Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas BPN. Disahkan pada 26 desember 1988.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Disahkan pada 27 Maret 1989.

i: Instruksi Kepala BPN No. 1. 01 Tahun 1989 Tentang Pengamanan Blangko Sertipikat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989 Tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada 13 April 1989

t: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah Dan Sertipikat.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah Dan Sertipikat. Disahkan pada 28 Juni 1989.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Di Kecamatan Yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja BPN Propinsi Maluku.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

i: PP No. 40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu di Propinsi Riau. Disahkan pada 17 Juni 1993.

i: Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada 17 Juni 1993.

t: KMNA/KBPN No. 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah. Disahkan pada 17 Juni 1993.

i: KMNA/KBPN No. 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau. Disahkan pada 8 September 1993.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Disahkan pada 23 Oktober 1993.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

t: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Sistematik Di Daerah Uji Coba. Disahkan pada 3 Pebruari 1995.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Sistematik Di Daerah Uji Coba.

i: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Disahkan pada 24 Maret 1995.

t: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik. Disahkan pada 23 Oktober 1995.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1996 Tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada 11 Maret 1996.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. Disahkan pada 10 April 1996.

t: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan. Disahkan pada 18 April 1996.

t: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan. Disahkan pada 30 Mei 1996.

i: PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Disahkan pada 17 Juni 1996.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah Dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta. Disahkan pada 16 April 1997.

i: KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS). Disahkan pada 2 Juli 1997.

t: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Disahkan pada 1 Oktober 1997.

t: KMNA/KBPN No. 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada 6 Oktober 1997.

i: KMNA/KBPN No. 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 222 Tahun 1961

Tentang Pembubaran Badan Pengawas Bank-Bank Belanda. Disahkan pada tanggal 6 September 1961 (LN No. 277 & TLN No. 2319)

Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda. Disahkan pada tanggal 6 September 1961 (LN No. 278 & TLN No. 2320)

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Disahkan Pada Tanggal 19 September 1961 (LN NO. 280 & TLN No. 2322).

t: KMA No. Sk. VI/5/Ka tahun 1962 Tentang Pendaftaran Hak Penguasaan dan Hak Pakai.

t: KMA No. Sk. VI/6/Ka Tentang Perpanjangan Waktu Untuk Mengalihkan Tanah-Tanah Pertanian Absentee.

i: KMA No. Sk. VI/6/Ka Tahun 1962 Tentang Perpanjangan Waktu Untuk Mengalihkan Tanah-Tanah Pertanian Absentee. Disahkan pada 8 Januari 1962.

t: KMPA No. Sk. 35/Ka/1962 Tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee. Disahkan pada 17 Desember 1962.

i: KMPA No. Sk. 35/Ka/1962 Tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee.

i: PMPA No. 24 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah Yang Sudah Ditanami Dengan Tanaman Keras Dan Tanah-Tanah Yang Sudah Diusahakan Sebagai Tambak

i: PMA No. 3 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform. Disahkan pada 31 Juli 1964.

i: PMA No. 8 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq Panitya Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 4 Tahun 1964. Disahkan pada 15 September 1964.

i: Keppres No. 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitya Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961. Disahkan pada 17 Oktober 1964.

u: PP No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 224 Tahun 1961

i: PMDN No. 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landrefom.

i: KMDN No. 257 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis Pembayaran Ganti Rugi Secara Langsung.

i: KMDN No. 258 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Administrasi Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa Dan Ganti Rugi Atas Tanah tanah Yang Terkena Ketentuan-Ketentuan Landreform.

i: KMDN No. 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980.

i: KMDN No. 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum Dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform.

t: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee/Guntai. Disahkan pada 20 Pebruari 1992.

i: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee/Guntai.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

t: KMNA/KBPN No. 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

i: KMNA/KBPN No. 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

t: Keputusan Kepala BPN No. 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.

i: Keputusan Kepala BPN No. 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.

i: Keputusan Kepala BPN No. 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i: Keputusan Kepala BPN No. 77/Kep-7.1/III/2012 Tentang Praksis Reforma Agraria. Disahkan pada 2 Maret 2012.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Disahkan pada 2 Juli 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 234 Tahun 1961

tentang Perubahan dan Penambahan PP No. 27 Tahun 1954 tentang Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri. Disahkan Pada Tanggal 20 Nopember 1961 (LN No. 297 & TLN No. 2350).

Peraturan Pemerintah Nomor 235 Tahun 1961

Tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Disahkan pada tanggal 20 Nopember 1961 (LN No. 298 & TLN No. 2351).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1961

Keppres Nomor 131 Tahun 1961

Tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform. Disahkan pada tanggal 15 April 1961.

u: Keppres No. 509 Tahun 1961 tentang Perubahan Keppres RI No. 131 Tahun 1961.

i: PMPA No. 20 Tahun 1963 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.

i: PMPA No. No. 24 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah Yang Sudah Ditanami Dengan Tanaman Keras Dan Tanah-Tanah Yang Sudah Diusahakan Sebagai Tambak.

i: PMA No. 3 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform. Disahkan pada 31 Juli 1964.

i: PMA No. 8 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq Panitya Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 4 Tahun 1964. Disahkan pada 15 September 1964.

t: Keppres No. 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitya Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam dalam Keppres No. 131/1961. Disahkan pada 17 Oktober 1964

sem: Keppres No. 263 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform sebagaimana Termaktub dalam Keppres No. 131/1961.

Keppres Nomor 509 Tahun 1961

Tentang Perubahan Keppres RI No. 131 Tahun 1961. Disahkan pada tanggal 6 September 1961.

t: Keppres No. 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitya Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam dalam Keppres No. 131/1961.

PERATURAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1961
(PMA)

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961

Tentang Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Concessie Dan Sewa Untuk Perusahaan Kebun Besar. Disahkan Pada Tanggal 17 Juni 1961.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961

Tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-pengukuran dan Pemetaan.

i: PMDN No. 10 Tahun 1978Tentang Pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Secara Fotogrametris.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap.

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961

Tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah.

t: PMDN No. 4 Tahun 1977 Tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Bersamadan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Diatasnya.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1988 Tentang Penyesuaian Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas BPN.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah Dan Sertipikat.

i: Instruksi Kepala BPN No. 1. 01 Tahun 1989 Tentang Pengamanan Blangko Sertipikat.

i: KMNA/KBPN No. 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah.

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961

Tentang **Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak. Disahkan pada tanggal 7 September 1961**

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961

Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya. Disahkan Pada Tanggal 7 September 1961.

t: PMDN No. 2 Tahun 1977 Tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji Bagi Para Penjabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMDN No. 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

t: Keputusan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989 Tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1996 Tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

tbl: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961

Tentang Bentuk Akta. Disahkan Pada Tanggal 7 September 1961

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961

Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti. Disahkan Pada tanggal 23 September 1961.

i: PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961

Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah. Disahkan Pada Tanggal 23 September 1961.

t: PMPA No. 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMPA No. 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMDN No. Sk.59/Dda/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah.

i: PMDN No. 2 Tahun 1977 Tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji Bagi Para Penjabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961

Tentang Pembebanan Dan Pendaftaran Hypotheek Serta Credietverband. Disahkan Pada Tanggal 23 September 1961.

t: PMPA No. 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMDN No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan.

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1961 (KMA)

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 112/Ka/1961

i: KMPA No. SK. 8/Ka/1963 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-Perusahaan Negara Dan Bank-Bank Negara.

i: KMPA No. SK. 37/Ka/1964 tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk. 8/Ka/1963.

c: PMDN No. 1 Tahun 1967 tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Agraria.

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 115/Ka/61

Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran. Disahkan Pada Tanggal 1 April 1961

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 273/Ka Tahun 1961

Tentang Penunjukan Daerah Percontohan Landreform. Disahkan Pada Tanggal 5 Juni 1961.

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 403/Ka/1961

Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran. Disahkan Pada Tanggal 1 Juni 1961.

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 508/Ka/1961

Tentang Saat Mulai Bekerjanya Penitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja. Disahkan Pada Tanggal 23 Agustus 1961.

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 509/Ka/1961

Tentang Pernyataan Penguasaan Oleh Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari Luas Maksimum. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 1961

i: PMA No. 3 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1962

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1962

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1962

Tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan Stoomvaart Maatschappy Nederland (S.M.N) di Indonesia. Disahkan pada tanggal 9 Pebruari 1962 (LN No. 9 & TLN No. 2386)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1962

Tentang Perubahan Perubahan Uang Wajib Tahunan Atas Hak Guna Usaha dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar. Disahkan pada tanggal 24 September 1962 (LN No. 72 & TLN No. 2502).

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1962 (KMA)

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. VI/6/KA Tahun 1962

Tentang Perpanjangan Waktu Untuk Mengalihkan Tanah-Tanah Pertanian Absentee. Disahkan Pada Tanggal 8 Januari 1962 (TLN No. 2461).

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK XI/1/Ka/1962

Tentang Panitya Penaksir Ganti Kerugian Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Disahkan Tanggal 16 Januari 1962 (TLN No. 2431).

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. VI/5/Ka Tahun 1962

Tentang Pendaftaran Hak Penguasaan dan Hak Pakai. Disahkan Pada Tanggal 20 Januari 1962.

tbl: PMA No. 1 tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TAHUN 1962 (PMPA)

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962

Tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Disahkan Pada Tanggal 1 Agustus 1962.

t: KMDN No. Sk. 26/DDA/1970. Tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

i: PMDN No. 16 Tahun 1975 Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 tahun 1962

Tentang Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat dalam Pemberian Hak Guna Usaha kepada Penguasa Swasta Nasional. Disahkan pada tanggal 1 September 1962.

u: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 8 Tahun 1969 – No. 2/Pert/OP/8/1969 tentang Perubahan PMPA No. 11 Tahun 1962 jo No. 2 Tahun 1964.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TAHUN 1962 (KMPA)

Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK. 30/Ka/1962

Tentang Penegasan Tanah-tanah Yang Akan Dibagikan Dalam Rangka Landreform. Disahkan Pada tanggal 8 Januari 1962.

i: PMA No. 3 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

Keputusan Menteri Agraria No. Sk. VI/5/Ka Tahun 1962.

Tentang Pendaftaran Hak Penguasaan dan Hak Pakai. Disahkan tanggal 20 Januari 1962.

i: PMPA No. 7 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Konversi Izin Pakai Tanah Di Kebayoran Baru.

tbl: PMA No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK. 35/Ka/1962

Tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee. Disahkan Pada Tanggal 17 Desember 1962.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1963

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1963

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963

Tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan. Disahkan Pada Tanggal 26 April 1963 (LN No. 25).

c: PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik. Disahkan pada 26 Desember 1994.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1963

Tentang Pembubaran Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Disahkan pada 22 Mei 1963 (LN No. 52).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1963

Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. Disahkan Pada Tanggal 19 Juni 1963 (LN No. 60 & TLN No. 2554).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963

Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Disahkan Pada Tanggal 19 Juni 1963 (LN No. 61 & TLN No. 2555).

i: PMDN No. 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Tertentu Pada PMDN No. 2 Tahun 1978.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1963

Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Veem Milik Belanda. Disahkan pada tanggal 24 Juni 1963 (LN No. 72 & TLN No. 2564).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963

tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan. Disahkan Pada Tanggal 3 Agustus 1963 (LN No. 89 & TLN No. 2586).

u: PP No. 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas PP No.49 Th.1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan. Disahkan pada 24 Desember 1981.

i: Inpres No. 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara.

c: PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik. Disahkan pada 26 Des 1994.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 1963

Perpres Nomor 13 Tahun 1963

Tentang Penertiban Pembangunan Baru di sepanjang jalan antara Jakarta – Bogor – Puncak – Cianjur, diluar batas-batas DKI Jakarta Raya, Daerah Swatantra Tk. II Bogor dan Daerah Swatantra Tk.II Cianjur. Disahkan pada tanggal 22 Mei 1963 (LN No. 55)

t: Keppres No. 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

tbl: Keppres No. 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

Perpres Nomor 19 Tahun 1963

Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan serta Pemakaian Pakaian Seragam dan Tanda Pengenal di luar Angkatan Perang dan Kepolisian Negara. Disahkan pada tanggal 5 Agustus 1963 (LN No. 85 & TLN No. 2584)

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TAHUN 1963 (PMPA)

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 7 Tahun 1963

Tentang Pelaksanaan Konversi Izin Pakai Tanah Di Kebayoran Baru. Disahkan Pada Tanggal 15 Maret 1963.

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963

Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai. Disahkan Pada Tanggal 22 Juli 1963.

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 24 Tahun 1963

Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah Yang Sudah Ditanami Dengan Tanaman Keras Dan Tanah-Tanah Yang Sudah Diusahakan Sebagai Tambak (T.L.N. No. 2616). Disahkan Pada Tanggal 4 Nopember 1963.

i: KMNA/KBPN No. 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TAHUN 1963 (KMPA)

Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK. 8/Ka/1963

Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-Perusahaan Negara Dan Bank-Bank Negara. Disahkan Pada Tanggal 28 Pebruari 1963.

Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK. 10/Ka/1963

Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras. Disahkan Pada Tanggal 1 Maret 1963.

i: PMPA No. 20 Tahun 1963 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.

Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK. 12/Ka/1963.

Tentang Konversi Hak Opstal Dan Erfpacht Diatas Tanah Eigendom Kotapraja. Disahkan Pada Tanggal 14 Mei 1963.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1964

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1964

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1964

Tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-tanah Untuk Lintas-lintas Kereta Api Dalam Wilayah Jakarta Raya. Disahkan pada tanggal 8 April 1964 (LN No. 32).

u: PP No. 34 Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP No.12 Th.1964 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-tanah Untuk Lintas-lintas Kereta Api dalam Wilayah Jakarta Raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964

Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa. Disahkan pada tanggal 8 September 1964 (LN No. 87 & TLN No. 2676).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964

tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Disahkan Pada Tanggal 23 Nopember 1964 (LN No. 112 & TLN No. 2702).

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

i: PMNA/KBPN No.2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

i: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee/Guntai.

i: KMNA/KBPN No.11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

i: Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 1964

Perpres Nomor 15 Tahun 1964

Tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 11 Mei 1964 (LN No. 46 & TLN No. 2648).

Perpres No. 17 Tahun 1964

Tentang Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera. Disahkan pada tanggal 16 Mei 1964 (LN No. 48 & TLN No. 2649).

u: Perpres No. 13 Tahun 1965 tentang Perubahan atau Penambahan Perpres No. 17 Tahun 1964 tentang Otorisasi Jalan Raya Sumatera.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1964

Keppres Nomor 263 Tahun 1964

Tentang Penyempurnaan Panitia Landreform sebagaimana Termaktub dalam Keppres No. 131/1961. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 1964.

c: Keppres No. 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform.

PERATURAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1964 (PMA)

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1964

Tentang Cara Pemungutan Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform. Disahkan Pada Tanggal 31 Juli 1964.

i: KMDN No. 258 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Administrasi Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa Dan Ganti Rugi Atas Tanah tanah Yang Terkena Ketentuan-Ketentuan Landreform.

t: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform.

Pasal 5, 6, 7, 8, dan 9

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil. Disahkan Pada Tanggal 5 Agustus 1964.

i: PMA No. 8 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq Panitya Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam PMPA No. 4 Tahun 1964.

tbl: Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 – No 714/Kpts/Um/9/1980.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1964

Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani. Disahkan Pada Tanggal 1 September 1964.

tbl: Keputusan Bersama Mendagri Dan Menteri Pertanian No 211 Tahun 1980 – No. 714/Kpts/Um/9/1980,

Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1964

Tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq Panitya Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 4 Tahun 1964. Disahkan Pada Tanggal 15 September 1964

tbl: Keputusan Bersama Mendagri Dan Menteri Pertanian No 211 Tahun 1980 – No 714/Kpts/Um/9/1980.

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1964

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 33/Depag/1964

Tentang Pengangkatan Pimpinan/Anggauta-Anggauta Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani (Bomatani) Pusat. Disahkan Pada Tanggal 10 Oktober 1964.

Keputusan Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitya Landreform Pusat Nomor Bm/3/36

Pengangkatan/Penegasan Keanggautaan Badan Pertimbangan Dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat (Disempurnakan). Disahkan Pada Tanggal 19 Oktober 1964.

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 45/Depag/64

Tentang Pembentukan Komando Penyelesaian Landreform. Disahkan Pada Tanggal 29 Oktober 1964.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TAHUN 1964 (PMPA)

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964

Tentang Penetapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. Disahkan Pada Tanggal 2 Maret 1964.

t: PMA No. 8 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq Panitia Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam PMPA No. 4 Tahun 1964.

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 6 Tahun 1964

Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Disahkan Pada Tanggal 7 Maret 1964.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TAHUN 1964 (KMPA)

Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK. 37/Ka/1964

Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor SK. 8/Ka/1963. Disahkan Pada Tanggal 6 April 1964.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1965

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1965

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1965

Tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 12 Tahun 1964 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-tanah Untuk Lintas-lintas Kereta Api dalam Wilayah Jakarta Raya. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1965 (LN No. 89).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1965

Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 1966 Pegawai Negeri/ Pejabat Negara. Disahkan pada tanggal 22 Nopember 1965 (LN No. 100).

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 1965

Perpres Nomor 5 Tahun 1965

Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1965 (LN No. 33).

Perpres Nomor 13 Tahun 1965

Tentang Perubahan atau Penambahan Perpres No. 17 Tahun 1964 tentang Otorisasi Jalan Raya Sumatera. Disahkan pada tanggal 7 Juli 1965 (LN No. 72).

PERATURAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1965 (PMA)

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965

Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Disahkan Pada Tanggal 27 Agustus 1965.

i: PMDN No. 16 Tahun 1975 Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMDN No. 10 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Secara Fotogrametris.

t: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap.

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1965

Tetang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut Dalam Ayat 3 Yo Ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria Yang Dibebani Dengan Hak Opstal Atau Erfpacht Untuk Perumahan. Disahkan Pada Tanggal 9 September 1965.

i: PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Memteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965

Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. Disahkan Pada Tanggal 6 Desember 1965.

Pasal 9 ayat (1) dan (2)

tbl: PMA No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan.

i: PMDN No. 7 Tahun 1973 Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah.

t: PMDN No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965

Tentang Pungutan Uang Pemasukan Dan Penggantian Harga Formulir. Disahkan Pada Tanggal 27 Desember 1965.

t: PMDN No. 7 Tahun 1968 Tentang Penertiban Dan Penggunaan Pungutan-Pungutan Di Bidang Agraria.

i: PMDN No. 7 Tahun 1968 Tentang Penertiban Dan Penggunaan Pungutan-Pungutan Di Bidang Agraria.

i: PMDN No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

i: PMDN No. 7 Tahun 1973 Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah.

i: PMDN No. 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara.

i: PMDN No. 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1965 (KMA)

Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 5/Depag/1965

Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk. 8/Ka/1963 Bagi P.N.P.R. Wisayayasa. Disahkan Pada Tanggal 30 Januari 1965.

Keputusan Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitya Landreform Pusat No. SK. 2/Depag/1965.

Tentang Pemberhentian Wakil Dari Persatuan Rakyat Tani (Perta) Dari Keanggautaan Badan Pertimbangan Dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat. Disahkan pada tanggal 8 Januari 1965.

Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 88/Depag/1965

Tentang Penghentian Untuk Sementara Semua Kegiatan Anggauta-Anggauta Panitya Landreform Pusat/Daerah Yang Mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.). Disahkan Pada Tanggal 26 Oktober 1965.

c: Keppres No. 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan tatakerja Penyelenggaraaan Landreform.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1966

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1966

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966

Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 9 Pebruari 1966 (LN No. 7 & TLN No. 2797).

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 1966

Perpres Nomor 2 Tahun 1966

Tentang Otorita Jalan Jagorawi. Disahkan pada tanggal 27 Januari 1966 (LN No. 6).

PERATURAN MENTERI AGRARIA TAHUN 1966 (PMA)

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966

Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan. Disahkan Pada Tanggal : 5 Januari 1966.

i: PMDN No. SK. 59/DDA/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah.

i: PMDN No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1967

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1967

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967

tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan. Disahkan Pada Tanggal 30 Desember 1967 (LN No. 36).

u: PP No. 21 Tahun 1980

i: Keppres No. 77 Tahun 1985 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.

i: PP No. 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1967

Keppres Nomor 15 Tahun 1967

Tentang tata Cara Penyediaan Dana dan Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Dalam Rangka Pengadaan barang/Peralatan Pemerintah. Disahkan pada tanggal 23 Pebruari 1967.

Keppres Nomor 168 Tahun 1967

Tentang Dirjen Jalan Raya Sumatera Dan Otorita Jalan Raya Sumatera Menjadi Proyek Khusus Pembengunan Jalan Raya Sumatera. Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1967.

Keppres Nomor 270 Tahun 1967

Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 1968 dan Pemberian Persekot Gaji/Pensiun 1 Bulan Penghasilan Bersih Kepada Pejabat Negara/ Pegawai Negeri dan Para Pensiun.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1967 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967

tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Agraria. Disahkan Pada Tanggal 28 Pebruari 1967.

i: PMDN No. 7 Tahun 1968 Tentang Penertiban Dan Penggunaan Pungutan-Pungutan Di Bidang Agraria.

i: PMDN No. 2 Tahun 1970 Tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat Menjadi Hak Guna Bangunan Dan Hak Guna Usaha.

i: PMDN No. Sk. 59/Dda/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah.

c: PMDN No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL AGRARIA TAHUN 1967 (PERDIRJEN AGRARIA)

Perdirjen Agraria Nomor 4 Tahun 1967

Tentang Pembayaran dan Penyesuaian Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Obyek Landreform. Disahkan pada tanggal 20 Desember 1967.

i: KMDN No. 258 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Administrasi Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa Dan Ganti Rugi Atas Tanah tanah Yang Terkena Ketentuan-Ketentuan Landreform.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1968

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1968

Keppres Nomor 6 Tahun 1968

Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Disahkan pada tanggal 3 Juli 1968 (LN No.1).

Keppres Nomor 16 Tahun 1968

Tentang Proyek-proyek Pemerintah. Disahkan pada tanggal 18 Januari 1968.

c: Keppres No. 199 Tahun 1968 tentang Proyek-proyek Pemerintah.

Keppres Nomor 120 Tahun 1968

Tentang Penyempurnaan Batas Wilayah Kuasa Pertambangan. Disahkan pada tanggal 23 Maret 1968.

c: PP No. 29 Tahun 1969 tentang Penyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN. Pertamina).

Keppres Nomor 199 Tahun 1968

Tentang Proyek-proyek Pemerintah. Disahkan pada tanggal 18 Juni 1968.

c: Keppres No. 18 Tahun 1969 tentang Pengendalian Operasionil Pembangunan lima Tahun.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1968 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1968

Tentang Penertiban Dan Penggunaan Pungutan-Pungutan Di Bidang Agraria. Disahkan Pada Tanggal 13 Nopember 1968.

i: PMDN No. 7 Tahun 1973 Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah.

i: PMDN No. 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara.

i: PMDN No. 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

i: KMDN No. SK. 13/DJA/1982 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (Pir, Pir Khusus Pir Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat).

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1969

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1969

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969

Tentang Perusahaan Persero. Disahkan pada tanggal 9 Mei 1969 (LN No. 21 & TLN No. 2894)

Pasal 7

u: PP No. 24 tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasl 7 PP No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan.

c: PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1969

TentangPenyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan Kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan gas Bumi Nasional (PN. Pertamina). Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1969 (LN No. 52 & TLN No. 2910).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969

Tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1969 (LN No. 60 & TLN No. 2916).

u: PP No. 79 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 ttg Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

u: PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 Ttg Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

c: PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1969

Keppres Nomor 83 Tahun 1969

Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 1969.

c: Keppres No. 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Keppres Nomor 89 Tahun 1969

Tentang Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan-penetapan Garis-garis Landas Kontinen antara Kedua Negara. Disahkan pada tanggal 5 Nopember 1969.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1969 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 004/HK/DPT/1969

Tentang Pengukuran Dan Pembuatan Peta. Disahkan Pada Tanggal 16 Januari 1968.

Putusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 41/DDA/1969

Tentang Biaya Pendaftaran Tanah. Disahkan Pada Tanggal 20 Agustus 1969.

i: PMDN No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

c: PMDN No 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1970

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1970

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970

Tentang Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 16 Maret 1970 (LN No. 17 & TLN No. 2925).

c: PP No. 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970

Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1970 (LN No. 31 & TLN No. 2935).

u: PP No. 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

c: PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970

Tentang Perencanaan Hutan. Disahkan pada tanggal 31 Aguastus 1970 (LN No. 50 & TLN No. 2945).

i: Keppres No. 3 Tahun 1985 Tentang Pembangunan Taman Wisata Curug Dago Sebagai Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda.

i: Keppres No. 35 Tahun 1986 Tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya Sebagai Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta.

i: Keppres No. 48 Tahun 1988 Tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

i: Keppres No. 52 Tahun 1989 Tentang Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan Sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam.

i: PP No. 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

i: PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

tbl: PP No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1970 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1970

Tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat Menjadi Hak Guna Bangunan Dan Hak Guna Usaha. Disahkan Pada Tanggal 14 Mei 1970.

i: PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

c: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 59/DDA/Tahun 1970

Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah. Disahkan Pada Tanggal 21 Oktober 1970.

i: PMDN No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

i: PMDN No. 2 Tahun 1977 Tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji Bagi Para Penjabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1970 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 26/DDA/1970.

Tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Disahkan Pada Tanggal 14 Mei 1970.

i: PMDN No. 16 Tahun 1975 Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan PP No. 10 Tahun 1961.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

c: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1971

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1971

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971

Tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara. Disahkan pada tanggal 3 Agustus 1971 (LN No. 59 & TLN No. 2967).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971

Tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dlm Lingkungan Daerah Prop. Sulawesi Selatan. Diasahkan pada tanggal 1 september 1971 (LN No. 65 & TLN No. 2970).

Pasal 3

c: PP No. 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Prop. Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1971

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971

Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 29 Nopember 1971.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1971 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 19/DDA/1971

Tentang Pembentukan Panitia Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 3 April 1971.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971

Tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah. Disahkan pada tanggal 26 September 1971.

i: PMDN No. 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan PMDN No. 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Di Kecamatan Yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja BPN Propinsi Maluku.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1972

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1972

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972

Tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Disahkan pada tanggal 3 Nopember 1972 (LN No. 42)

c: PP No. 4 Tahun 1984 Pencabutan atas PP No. 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1972

Keppres Nomor 18 Tahun 1972

Tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil. Disahkan pada tanggal 7 Maret 1972.

u: Keppres No. 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keppres No. 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil.

Keppres Nomor 31 Tahun 1972

Tentang Memberikan Sebagai Hak Milik, Sebidang Tanah dan Rumah Kepada Iu Soedirman, Warakawuri Alm. Jend. TNI R. Soedirman, Ex Panglima Angkatan Bersenjata R.I. sebagai Penghargaan atas Jasa-jasa Almarhum yang telah Disumbangkan terhadap Bangsa dan Negara. Disahkan pada tanggal 8 April 1972.

Keppres Nomor 34 Tahun 1972

Tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. Disahkan pada tanggal 18 April 1972.

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 1989 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Ikatan Dinas dan Tugas Belajar pada Akademi Pertanahan Nasional.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1972 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972

Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Disahkan Pada Tanggal 30 Juni 1972.

t: PMDN No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

t: PMDN No. 7 Tahun 1973 Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah.

i: PMDN No. 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

i: PMDN No. 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara.

i: PMDN No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

i: PMDN No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

i: PMDN No. 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

i: PMDN No. 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual.

i: PMDN No. 3A Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata-Guna Tanah.

i: PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

i: KMDN No. 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

i: KMDN No. 220 Tahun 1981 Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi

Bekas Hak Tanah Adat, Yangn Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

i: KMDN No. 268 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan.

i: KMDN No. 277 Tahun 1982 Tentang Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Lingkungan Karet, Karet Kuningan Dan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

i: KMDN No. Sk.13/Dja/1982 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (Pir, Pir Khusus Pir Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat).

i: PMDN No. 2 Tahun 1984 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: KMDN No. Sk. 593.41-64 Tahun 1985 Tentang Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar.

i: PMDN No. 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

i: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 16 Tahun 1990 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi.

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1972 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Susunan Organisasi Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya. Disahkan pada tanggal 24 Juni 1972.

t: PMDN No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

i: PMDN No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

tbl: KMDN No. 133 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Direktorat Agraria Propinsi Dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1973

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1973

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973

Tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya. Disahkan pada tanggal 1 Maret 1973 (LN No. 9 & TLN No. 2997).

Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 1973

Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan. Disahkan pada tanggal 9 Mei 1973 (LN No. 28 & TLN No. 3005).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973

Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Disahkan Pada Tanggal 17 Nopember 1973 (LN No. 49 & TLN No. 3015).

i: Inpres No. 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

i: PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973

Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Disahkan Pada Tanggal 28 Nopember 1973 (LN No. 52 & TLN No. 3016).

i: Keppres No. 29 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

i: Keppres No. 1 Tahun 1978 Tentang Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah Ke Dalam Proyek Transmigrasi.

i: Keppres No. 26 Tahun 1978 Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

tbl: PP No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1973

Keppres Nomor 1 Tahun 1973

Tentang Penetapan Pulau-pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok sebagai Daerah Asal Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 4 Januari 1973.

i: Keppres No. 45 Tahun 1984 tentang Penetapan Propinsi Timor Timur sebagai Wilayah Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

i: Keppres No. 54 Tahun 1992 tentang Penetapan Pulau Sumbawa sebagai Daerah Transmigrasi.

Keppres Nomor 2 Tahun 1973

Tentang Penetapan Beberapa Propinsi sebagai Daerah Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 4 Januari 1973.

i: Keppres No. 12 Tahun 1974 tentang Penetapan Propinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah Transmigrasi.

i: Keppres No. 29 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

i: Keppres No. 29 Tahun 1975 tentang Penetapan Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Transmigrasi.

i: Keppres No. 1 Tahun 1978 tentang Kesempatan Bagi Penduduk SetempatBerpindah kedalam Proyek Transmigrasi.

i: Keppres No. 7 Tahun 1978 tentang Penetapan Propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya sebagai Daerah Transmigrasi.

tbl: Keppres No 12 Tahun 1997 tentang Penetapan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi.

Keppres Nomor 9 Tahun 1973

Tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan Yang Dibentuk Berdasar Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun1968 Yang Dirubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971, Beserta Menteri-menterinya, Dan Membentuk Kabinet Pembangunan II. Disahkan Pada Tanggal 28 Maret 1973.

i: Inpres No. 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

i: Keppres No. 29 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

Keppres Nomor 12 Tahun 1973

Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Peraturan Rumah-rumah Negeri. Disahkan pada tanggal 4 April 1973.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1973

Inpres Nomor 9 Tahun 1973

Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya. Disahkan Pada Tanggal 17 Nopember 1973.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1973 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973

Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Disahkan Pada Tanggal 26 Juni 1973.

i: PMDN No. 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

i: PMDN No. 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara.

i: PMDN No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

i: PMDN No. 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.

i: PMDN No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

i: PMDN No. 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

i: PMDN No. 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual.

i: PMDN No. 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata-Guna Tanah.

i: PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

i: KMDN No. 220 Tahun 1981 Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yangn Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

i: KMDN No. Sk. 13/DJA/1982 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (Pir, Pir Khusus Pir Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat).

i: KMDN No. 268 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan.

i: KMDN No. 277 Tahun 1982 Tentang Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Lingkungan Karet, Karet Kuningan Dan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

i: PMDN No. 2 Tahun 1984 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan

Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomo UU No. 6 Tahun 1968.

i: KMDN No. Sk. 593.41-64 Tahun 1985 Tentang Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar.

i: PMDN No. 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

i: PMDN No. 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan PMDN No. 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

i: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

c: PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973

Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah. Disahkan Pada Tanggal 16 Oktober 1973.

i: PMDN No. 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara.

i: PMDN No. 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual.

i: KMDN No. 220 Tahun 1981 Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian

Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yangn Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

i: KMDN No. Sk.13/DJA/1982 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (Pir, Pir Khusus Pir Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat).

i: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1973 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1973

Tentang Penguasaan Terhadap Tanah-Tanah Perkebunan Terlantar Dan Atau Ditelantarkan Di Daerah Propinsi Jawa Barat. Disahkan Pada Tanggal 24 Mei 1973

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1974

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974

Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta. Disahkan pada tanggal 5 Maret 1974 (LN No. 8 & TLN No. 3021).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974

Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri. Disahkan pada tanggal 18 Maret 1974 (LN No. 19 & TLN No. 3030)

u: PP No. 38 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri.

u: PP No. 3 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 38 Tahun 1982.

c: PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974

Tentang Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional". Disahkan pada tanggal 18 Juli 1974 (LN No. 37).

c: PP No. 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974

Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya. Disahkan pada tanggal 1 Nopember 1974 (LN No. 52 & TLN No. 3038).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974

Tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara. Disahkan pada tanggal 10 Desember 1974 (LN No. 59 & TLN No. 3042).

c: PP No. 7 Tahuin 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974

Tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disahkan pada tanggal 28 Desember 1974 (LN No. 66).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1974

Keppres Nomor 10 Tahun 1974

Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup. Disahkan pada tanggal 5 Maret 1974.

u: Keppres No. 47 Tahun 1992 Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup.

Keppres Nomor 12 Tahun 1974

Tentang Penetapan Propinsi Kalimantan Barat sebagai daerah Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 11 Maret 1974.

i: Keppres No. 29 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

i: Keppres No. 29 Tahun 1975 tentang Penetapan Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Transmigrasi.

i: Keppres No. 1 Tahun 1978 tentang Kesempatan bagi Penduduk setempat berpindah kedalam proyek transmigrasi.

i: Keppres No. 7 Tahun 1978 tentang Penetapan Propinsi-propinsi daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya sebagai daerah Transmigrasi.

Keppres Nomor 13 Tahun 1974

Tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri. Disahkan pada tanggal 18 Maret 1974.

i: Keppres No. 40 Tahun 1974 tentang Tatacara Penjualan Rumah Negeri.

u: Keppres No. 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

c: Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

tbl: Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

Keppres Nomor 26 Tahun 1974

Tentang Arsip Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 24 April 1974.

tbl: Keppres No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

Keppres Nomor 29 Tahun 1974

Tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 2 Mei 1974.

c: Keppres No. 26 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraaan Transmigrasi.

Keppres Nomor 35 Tahun 1974

Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional. Disahkan pada tanggal 12 Juli 1974.

tbl: Keppres No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional.

Keppres Nomor 40 Tahun 1974

Tentang Tatacara Penjualan Rumah Negeri. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1974.

t: PMDN No. 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual.

c: Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

Keppres Nomor 41 Tahun 1974

Tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA. Disahkan pada tanggal 29 Juli 1974.

u: Keppres No. 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Keppres No. 41 Tahun 1974 Tentang Penambahan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.

Keppres Nomor 44 Tahun 1974

Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen. Disahkan Pada Tanggal 26 Agustus 1974.

i: Keppres No. 20 Tahun 1981 Tentang Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Di Daerah.

i: Keppres No. 23 Tahun 1982 Tentang Pengembangan Budidaya Laut Di Perairan Indonesia.

i: Keppres No. 49 Tahun 1983 Tentang Perubahan Atas Lampiran 15 Keppres No. 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No. 24 Tahun 1983.

i: Keppres No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen.

i: PMDN No. 7 Tahun 1986 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia.

Keppres Nomor 45 Tahun 1974

Tentang Susunan Organisasi Departemen. Disahkan Pada Tanggal 26 Agutus 1974.

i: Keppres No. 20 Tahun 1981 Tentang Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Di Daerah.

i: Keppres No. 23 Tahun 1982 Tentang Pengembangan Budidaya Laut Di Perairan Indonesia.

i: Keppres No. 49 Tahun 1983 Tentang Perubahan Atas Lampiran 15 Keppres No. 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No. 24 Tahun 1983.

c: Keppres No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen.

Keppres Nomor 55 Tahun 1974

tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Disahkan Pada Tanggal 4 Desember 1974.

u: Keppres No. 37 Tahun 1980

tbl: Keppres No. 77 Tahun 1985 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1974 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 5 Tahun 1974

Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan. Disahkan Pada Tanggal 5 Mei 1974.

i: PMDN No. 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara.

i: PMDN No. 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.

t: PMDN No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

i: KMDN No. 268 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan.

t: PMDN No. 2 Tahun 1984 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

i: PMDN No. 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

t: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

tbl: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974

Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landrefom. Disahkan Pada Tanggal 8 Oktober 1974.

t: KMDN No. 257 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis Pembayaran Ganti Rugi Secara Langsung.

t: KMDN No. 258 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Administrasi Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa Dan Ganti Rugi Atas Tanah tanah Yang Terkena Ketentuan-Ketentuan Landreform.

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1974 (IMDN)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1974

Tentang Penanggulangan Masalah-masalah Dibidang Pertanahan yang dapat menimbulkan kesalahan dikalangan masyarakat. Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1974.

i: Instruksi Kepala BPN No. 1. 01 Tahun 1989 Tentang Pengamanan Blangko Sertipikat.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1975

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975

tentang Perubahan Pasal 9 PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. Disahkan Pada Tanggal 12 Mei 1975 (LN No. 22 & TLN NO. 3055).

i: PP No. 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

tbl: PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975

Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 23 Juni 1975 (LN No. 26 & TLN No. 3058).

u: PP No. 19 Tahun 1991 tentang Perubahan PP No. 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

tbl: PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975

Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I. disahkan pada tanggal 25 Juni 1975 (LN No. 30 & TLN No. 3060).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975

Tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru. Disahkan pada tanggal 24 Oktober 1975 (LN No. 36).

tbl: UU No. 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975

Tentang Pembentukan Kota Administratip Cimahi. Disahkan Pada Tanggal 9 Desember 1975 (LN No. 41).

tbps: UU No. 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1975

Keppres Nomor 20 Tahun 1975

Tentang Kebijaksanaan dibidang Pemberan hak Pengusahaan Hutan. Disahkan pada tanggal 22 Mei 1975.

Keppres Nomor 23 Tahun 1975

Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Disahkan pada tanggal 18 Juni 1975.

u: Keppres No. 131 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 250/M Tahun 1983.

tbl: Keppres No. 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Keppres Nomor 29 Tahun 1975

Tentang Penetapan Propinsi Riau dab Propinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 12 Juli 1975.

i: Keppres No. 1 Tahun 1978 tentang Kesempatan bagi Penduduk setempat berpindah kedalam proyek transmigrasi.

i: Keppres No. 7 Tahun 1978 tentang Penetapan Propinsi-propinsi daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya sebagai daerah Transmigrasi.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1975
(PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 1975

Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara. Disahkan Pada Tanggal 24 Januari 1975.

i: PMDN No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

i: PMDN No. 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual.

i: KMDN No. 220 Tahun 1981 Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yangn Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

i: KMDN No. Sk. 13/DJA/1982 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (Pir, Pir Khusus Pir Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat).

i: PMDN No. 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

i: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

t: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

tbl: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 1975

Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Di Atasnya Serta Penerbitan Sertipikatnya. Disahkan Pada Tanggal 3 Desember 1975.

t: PMDN No. 4 Tahun 1977 Tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Bersamadan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Diatasnya.

t: PMDN No. 10 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975

Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Disahkan Pada Tanggal 3 Desember 1975.

i: PMDN No. 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.

i: KMDN No. 268 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan.

i: PMDN No. 2 Tahun 1984 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak

Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

t: PMDN No. 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

c: Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975

Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah Dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Disahkan Pada Tanggal 3 Desember 1975.

i: PMDN No. 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1975 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1975

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis Pembayaran Ganti Rugi Secara Langsung. Disahkan Pada Tanggal 3 Desember 1975.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 1975

Tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Administrasi Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa Dan Ganti Rugi Atas Tanah tanah Yang Terkena Ketentuan-Ketentuan Landreform. Disahkan Pada Tanggal 3 Desember 1975

t: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1976

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1976

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976

Tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara. Disahkan pada tanggal 18 Pebruari 1976 (LN No. 8 & TLN No. 3067).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976

Tentang Formasi Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 18 Pebruari 1976 (LN No. 9 & TLN No. 3068).

tbl: PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 18 Pebruari 1976 (LN No. 10 & TLN No. 3069).

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 1989 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Ikatan Dinas dan Tugas Belajar pada Akademi Pertanahan Nasional.

tbl: PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976

Tentang Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI. Disahkan pada tanggal 13 April 1976 (LN No. 22 & TLN No. 3078).

c: PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

tbl: PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976

tentang Pembentukan Kota Administratif Jember. Disahkan pada tanggal 19 April 1976 (LN No. 23).

tbl: PP No. 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976

Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Disahkan pada tanggal 26 April 1976 (LN No. 25 & TLN No. 3079).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976

Tentang Pembentukan Kota Administratip Tasikmalaya. Disahkan pada tanggal 4 Nopember 1976 (LN No. 49).

tbps: UU No. 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976

Tentang Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kotamadya Dati II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Dati II Bengkulu Utara. Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1976 (LN No. 50 & TLN No. 3091).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Tentang Cuti Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1976 (LN No. 57 & TLN No. 3093).

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1976

Inpres Nomor 1 Tahun 1976

Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum. Disahkan pada tanggal 13 Januari 1976.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

i: PMDN No. 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1976 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976

Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta. Disahkan Pada Tanggal 5 April 1976.

i: KMDN No. 268 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan.

i: PMDN No. 2 Tahun 1984 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

c: Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1977

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1977

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977

Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri. Disahkan pada tanggal 2 Pebruari 1977 (LN No. 5 & TLN No. 3094).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977

Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 1 Maret 1977 (LN No. 11 & TLN No. 3098).

u: PP No.13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan Atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

u: PP No. 15 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 7 Tahun 1977 ttg Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 3 kali diubah, terakhir dg PP No. 51 Tahun 1992.

u: PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

tentang Perwakafan Tanah Milik. Disahkan pada tanggal 17 Mei 1977 (LN No. 38 & TLN No. 3107).

t: PMDN No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

i: PMDN No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

i: PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1977

Keppres Nomor 4 Tahun 1977

Tentang Penegasan Status Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" beserta tanahnya . Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 1977.

Keppres Nomor 7 Tahun 1977

Tentang Penyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok PNS Menurut PP No. 12 Tahun 1967 ke dalam PP No. 7 Tahun 1977. Disahkan pada tanggal 1 Maret 1977.

Keppres Nomor 15 Tahun 1977

Tentang Jabatan Strukturil. Disahkan pada tanggal 30 Maret 1977.

u: Keppres No. 32 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.

t: Keppres No. 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keppres RI No. 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keppres No. 15 Tahun 1977.

Lamp. A,B,C dan F

u: Keppres No. 69 Tahun 1980 tentang Perubahan pada Lampiran A, B, C dan F Keppres No. 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 26 Tahun 1979.

u: Keppres No. 29 Tahun 1982 tentang Perubahan pada Lampiran A, B, dan E Keppres No. 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 69 Tahun 1980.

i: Keppres No. 35 Tahun 1983 tentang Eselon Jabatan Struktural Deputi Ketua/Kepala/Direktur Jenderal pada Lembaga-lembaga Non Departemen.

t: Keppres No. 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keppres No. 45 Tahun Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 26 Tahun 1979.

tbl: Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

Keppres Nomor 22 Tahun 1977

Tentang Tunjangan Jabatan Peneliti. Disahkan pada tanggal 30 Maret 1997

tbl: Keppres No. 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti.

Keppres Nomor 45 Tahun 1977

Tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 26 Tahun 1979. Disahkan pada tanggal 25 Agustus 1977.

u: Keppres No. 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keppres No. 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keppres No. 15 Tahun 1977.

u: Keppres No. 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keppres No. 15 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 26 Tahun 1979.

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977

Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 1977.

i: Keppres No. 23 Tahun 1980 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

c: Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977

Tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 1977.

i: Keppres No. 23 Tahun 1980 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan

Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1977 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977

Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya. Disahkan Pada Tanggal 17 Pebruari 1977.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

i: PMDN No. 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

c: PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1977

Tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji Bagi Para Penjabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 18 Maret 1977.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1996 Tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

tbl: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977

Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya. Disahkan pada tanggal 25 Mei 1977.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977

Tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Bersamadan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Diatasnya. Disahkan Pada Tanggal 29 Oktober 1977.

i: PMDN No. 10 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1977.

Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah serta Pemberian Izin Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Untuk Keperluan Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968. Disahkan pada tanggal 23 Nopember 1977.

i: PMDN No. 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977

Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Disahkan Pada Tanggal 26 Nopember 1977.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977

Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah. Disahkan Pada Tanggal 26 Nopember 1977.

i: Instruksi Kepala BPN No. 1. 01 Tahun 1989 Tentang Pengamanan Blangko Sertipikat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 149 Tahun 1977

Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual. Disahkan pada tanggal 26 April 1977.

tbl: KMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1978

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1978

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978

tentang Perubahan dan Penetapan Batas Wilayah Kec. Muara dan Wil. Kec. Palipi di Kab. Dati II Tapanuli Utara Prop. Dati I Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 19 Juni 1978 (LN No. 20).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978

Tentang Pembentukan Kota Administratif Palu. Disahkan pada tanggal 1 Juli 1978 (LN No. 23).

tbps: UU No. 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978

Tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari. Disahkan pada tanggal 1 Juli 1978 (LN No. 24).

tbps: UU No. 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978

Tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar. Disahkan pada tanggal 1 Juli 1978 (LN No. 25).

tbps: UU No. 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978

Tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram. Disahkan pada tanggal 1 Juli 1978 (LN No. 26).

tbps: UU No. 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978

Tentang Pembentukan Kota Administratif Kupang. Disahkan pada tanggal 1 Juli 1978 (LN No. 27).

tbps: UU No. 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978

Tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1978 (LN No. 38).

i: PP No. 60 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading Dan Pademangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres Dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung Dan Ciracas Di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru Di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa Dan Pesanggrahan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1978

Keppres Nomor 1 Tahun 1978

Tentang Kesempatan bagi Penduduk Setempat Berpindah ke dalam Proyek Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 21 Pebruari 1978.

Keppres Nomor 3 Tahun 1978

Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jakarta – Bogor – Ciawi menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uanag Tol. Disahkan pada tanggal 8 Maret 1978.

u: Keppres No. 19 Tahun 1979 tentang Perubahan Keppres No. 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jakarta – Bogor – Ciawi menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol.

Keppres Nomor 7 Tahun 1978

Tentang Penetapan Propinsi-propinsi DI. Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya sebagai Daerah Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 28 April 1978.

Keppres Nomor 26 Tahun 1978

Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1978.

c: Keppres No. 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

Keppres Nomor 32 Tahun 1978

Tentang Perubahan pada Lampiran E dan B XV Keppres No. 15 Tahun 1977 tentang Jabatan Strukturil.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1978 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978

Tentang Biaya Pendaftaran Tanah. Disahkan Pada Tanggal 17 April 1978.

t: PMDN No. 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Tertentu Pada PMDN No. 2 Tahun 1978.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

t: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978

Tentang Fatwa Tata-Guna Tanah. Disahkan Pada Tanggal 17 April 1978.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

c: PMDN No. 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan PMDN No. 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978

Tentang Pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Secara Fotogrametris. Disahkan Pada Tanggal 27 Juli 1978.

tbl: PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978

Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Tertentu Pada PMDN No. 2 Tahun 1978. Disahkan Pada Tanggal 3 Agustus 1978.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

t: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1978 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978

Tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi. Disahkan Pada Tanggal 21 Januari 1978.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978

Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Direktorat Agraria Propinsi Dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya. Disahkan Pada Tanggal 11 Agustus 1978.

i: KMDN No. 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

i: KMDN No. 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

i: KMDN No. 79 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1979

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1979

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tebing Tinggi. Disahkan pada tanggal 11 April 1979 (LN No. 12)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979

Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai. Disahkan pada tanggal 11 April 1979 (LN No. 13).

tbps: UU No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979

Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 15 Mei 1979 (LN No. 17 & TLN No. 3134)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1979 (LN No. 19 & TLN No. 3136).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. Disahkan pada tanggal 12 Juni 1979 (LN No. 20 & TLN No. 3137).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979

Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 25 Juni 1979 (LN No. 22 & TLN No. 3138).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1979

Tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di Wilayah Kotamadya Dati II Sabang. Disahkan pada tanggal 30 Juni 1979 (LN No. 28).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1979

Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Dati II Wonogiri dari Desa Nguntoronadi ke Desa Kedungrejo. Disahkan pada tanggal 6 Agustus 1979 (LN No. 33).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1979

Tentang Pembentukan Kota Administratif Jayapura. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1979 (LN No. 36).

tbps: UU No. 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1979

Tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Cipatujah, Panca Tengah, Bojonggambir Masing-masing di Kab. Dati II Tasikmalaya dan Kecamatan Cimerak di Kab. Dati II Ciamis dalam Wilayah Dati I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 22 September 1979 (LN No. 42).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979

tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Disahkan pada tanggal 28 September 1979 (LN No. 44 & TLN No. 3146).

i: PP No. 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto. Disahkan pada tanggal 28 September 1979 (LN No. 45 & TLN No. 3147).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 29 September 1979 (LN No. 47 & TLN No. 3149).

u: PP No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

c: PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Cirebon dari Wilayah Kotamadya Dati II Cirebon ke Kota Sumber. Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1979 (LN No. 48 & TLN No. 3149).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979

Tentang Penyusutan Arsip. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1979 (LN No. 51 & TLN No. 3151).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1979

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh ke Kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kab. Dati II Aceh Besar. Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1979 (LN No. 51 & TLN No. 3152)

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1979

Keppres Nomor 7 Tahun 1979

tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III) Tahun 1979/1980-1981/1984. Disahkan pada tanggal 11 maret 1979.

i: Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat.

i: Keppres No. 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

i: Keppres No. 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah.

i: Keppres No. 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform.

i: Inpres No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

i: PMDN No. 2 Tahun 1984 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara.

Keppres Nomor 28 Tahun 1979

Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam. Disahkan pada tanggal 18 Juni 1979.

c: Keppres No. 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

Keppres Nomor 32 Tahun 1979

Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat. Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1979.

i: PMDN No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

i: Keppres No. 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Madya Cianjur, dan Kota Cibinong.

Keppres Nomor 34 Tahun 1979

Tentang Penetapan Jembatan Citarum Rajamandala menjadi Jembatan Tol dan Besarnya Uang Tol. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1979.

c: Keppres No. 37 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol.

Keppres Nomor 51 Tahun 1979

Tentang Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 1979.

u: Keppres No. 4 Tahun 1985 tentang Perubahan Keppres No. 51 Tahun 1979 Tentang Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan.

c: Keppres No. 2 Tahun 1989 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertahanan**.**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1979
(PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979

Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 1979.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1979

Tentang Pedoman Penetapan Uang Administrasi dan Biaya Pendaftaran Tanah dalam Rangka Pembinaan Hak Pakai Atas Tanah Negara untuk Instansi Pemerintah. Disahkan pada tanggal 19 September 1979.

t: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1980

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1980

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980

Tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 22 Januari 1980 (LN No. 6 & TLN No. 3156)

c: PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980

Tentang Perubahan dan Penambahan Atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 13 Maret 1980 (LN No. 20 & TLN No. 3162)

c: PP No. 51 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 7 Th. 1977 ttg Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dg PP No.15 Tahun 1985.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980

Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara. Disahkan pada tanggal 13 Maret 1980 (LN No. 21).

u: PP No. 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No.14 Tahun1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

u: PP No. 8 Tahun 1984 tentang Perubahan atas PP No.14 Tahun1980 ttg Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara Sebagaimana Telah Diubah dg PP No. 47 Tahun 1980.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Disahkan pada tanggal 21 Maret 1980 (LN No. 25 & TLN No. 3164).

i: PP No. 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1980

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Asahan dari Wilayah Kotamadya Dati II Tanjung Balai ke Kota Kisaran. Disahkan pada tanggal 30 April 1980 (LN No. 28 & TLN No. 3166).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1980

Tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Cipongkor, Katapang, Ibun, Marga Asih, Ngamprah, Kertasari, Cikancung Masing-masing di Kabupaten Dati II Bandung dan Kecamatan Serang di Kabupaten Dati II Bekasi dalam Wilayah Prop. Dati I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 9 Juli 1980 (LN No. 37)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1980

Tentang Pembentukan Kecamatan Bakarangan dan Kecamatan Piani di Kabupaten Dati II Tapin, Kec. Loksado dan Kec. Kalumpang di Kab. Dati II Hulu Sungai Selatan, Kec.Halong di Kab.Dati II Hulu Sungai Utara, Kec. Murung Pudak di Kab. Dati II Tabalong, Kec. Tabukan di Kab. Dati II Barito Kuala, Kec. Kintap dan Kec. Panyipatan di Kab. Dati II Tanah Laut, Kec.Hampang dan Kec. Kec. Sungai Durian di Kab. Dati II Kotabaru dalam Wilayah Prop. Dati I Kalimantan Selatan. Disahkan pada tanggal 10 Juli 1980 (LN No. 39)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1980 (LN No. 50 & TLN No. 3175).

i: Keppres No. 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2006 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan BPN Republik Indonesia.

c: PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada 6 Juni 2010.

i: Peraturan Kepala BPN No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada 21 September 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1980

Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba Ke Desa Karangora dan Ibukota Kec. Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kab. Dati II Flores Timur. Disahkan pada tanggal 17 September 1980 (LN No. 54).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1980

Tentang Pembentukan Kec. Paseh di Kab. Dati II Sumedang & Kec. Jalancagak di Kab. Dati II Subang dlm Wilayah Prop. Dati I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 5 Nopember 1980 (LN No. 61)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1980

Tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Guguk Panjang Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh di Wilayah Kotamadya Dati II Bukittinggi Prop. Dati I Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 22 Nopember 1980 (LN No. 64).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980

Tentang Perubahan atas PP No.14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara. Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980 (LN No. 75).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1980

Keppres Nomor 10 Tahun 1980

Tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah. Disahkan pada tanggal 23 Januari 1980.

u: Keppres No. 40 Tahun 1985 tentang Perubahan Keppres Nomor 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Keppres No. 17 Tahun 1983 dan Keppres No. 42 Tahun 1980.

c: Keppres No. 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan beberapa ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.

Keppres Nomor 15 Tahun 1980

Tentang Tatacara Penyediaan Dana dan Tatacara Pelaksanaan Pembayaran Dalam rangka Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah. Disahkan pada tanggal 23 Pebruari 1980

c: Keppres No. 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan beberapa ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.

Keppres Nomor 23 Tahun 1980

Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Disahkan pada tanggal 20 Maret 1980.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

c: Keppres No. 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1980

Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Disahkan pada tanggal 29 maret 1980.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

u: Keppres No. 116 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

u: Keppres No. 122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998.

c: Keppres No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Keppres Nomor 35 Tahun 1980

Tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Penguasaan Hutan. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1980.

c: Keppres No. 31 Tahun 1989 tentang Dana Reboisasi.

Keppres Nomor 42 Tahun 1980

Tentang Penyempurnaan Keppres No. 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah. Disahkan pada tanggal 18 Juli 1980.

i: Keppres No. 1 Tahun 1981 tentang Penambahan Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah.

t: Keppres No. 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keppres No. 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah.

Keppres Nomor 54 Tahun 1980

Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah. Disahkan pada tanggal 10 September 1980.

i: Inpres No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

Keppres Nomor 55 Tahun 1980

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform. Disahkan pada tanggal 10 September 1980.

i: Inpres No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

t: KMDN No. 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam Keppres No. 55 Tahun 1980.

t: KMDN No. 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

t: KMDN No. Sk.31/DJA/1982 Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.

i: KMDN No. 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum Dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform.

i: KMDN No. 79 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya.

Keppres Nomor 67 Tahun 1980

Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 11 Desember 1980.

u: Keppres No. 71 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1980

Inpres Nomor 2 Tahun 1980

Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 31 Januari 1980.

Inpres Nomor 13 Tahun 1980

Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Disahkan pada tanggal 10 September 1980.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1980 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1980.

t: PMDN No. 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

tbl: PMDN No. 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1980 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 167 Tahun 1980

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1980.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

c: KMDN No. 30 ahun 1989 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1981

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1981

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981

Tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 28 April 1981 (LN No. 16 & TLN No. 3194).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Widasari, Bongas Masing-masing di Kabupaten Dati II Indramayu & Kecamatan-kecamatan Nanggung, Bojonggede, Caringin masing-masing di Kabupaten Dati II Bogor dlm Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 5 Mei 1981. (LN No. 17).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kecamatan Keritang, Kecamatan Batang Tuaka dan Kecamatan Tanah Merah di Kabupaten Dati II Indragiri Hilir dalam Wilayah Propinsi Dati I Riau. Disahkan pada tanggal 21 Mei 1981. (LN No. 18).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Tulung Selapan, Pemulutan Mesuji Masing-masing di Kab. Dati II Ogan Komering Ilir, Kecamatan-kecamatan Bayung Lincir, Talang Kelapa masing-masing di Kab. Dati II Musi Banyuasin, dan Kecamatan-kecamatan Jayaloka, Tugumulya Masing-masing di Kab. Dati II Musi Rawas dlm Wil. Prop. Dati I Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 21 Mei 1981 (LN No. 19).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kec.Pegasing dan Kec.Bintang di Wil.Kab. Dati II Aceh Tengah D.I.Aceh. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1981 (LN No. 43).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kec. Tempuran dan Kec. Lemahabang di Kabupaten Dati II Karawang dalam Wilayah Prop. Dati I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1981 (LN No. 47).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kec. Binjai Utara, Kec. Binjai Kota dan Kec. Binjai Selatan di Kotamadya Dati II Binjai, Kec. Siantar Timur, Kec. Siantar Barat, Kec. Siantar Utara dan Kec. Siantar Selatan di Kotamadya Dati II Pematang Siantar, Kec. Sibolga Utara, Kec. Sibolga Kota dan Kec. Sibolga Selatan di Kotamadya Dati II Sibolga dalam Wilayah Prop. Dati I Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1981 (LN No. 50)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau. Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1981 (LN No. 55).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1981

Tentang Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Lampung Selatan dari Wilayah Kotamadya Dati II Tanjung Karang/Teluk Betung ke Kota Kalianda di Kec. Kalianda Wilayah Kab. Dati II Lampung Selatan. Disahkan pada tanggal 3 Nopember 1981 (LN No. 56 & TLN No. 3205).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kota Administratif Bau Bau. Disahkan pada tanggal 3 Nopember 1981 (LN No. 57).

tbps: UU No. 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kota Administratif Depok. Disahkan pada tanggal 24 Nopember 1981 (LN No. 62).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate. Disahkan pada tanggal 24 Nopember 1981 (LN No. 64).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan. Disahkan pada tanggal 12 Desember 1981 (LN No. 67).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi. Disahkan pada tanggal 12 Desember 1981 (LN No. 68).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang. Disahkan pada tanggal 12 Desember 1981 (LN No.69).

tbps: UU No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1981 (LN No. 70).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Kec. Muaragembong & Kec. Tambelang dan Kec. Bantargebang di Kab. Dati II Bekasi, Kec. Parakansalak, Kec. Gegerbitung, Kec. Cidolog, Kec. Tegalbuleud, Kec. Kelibunder, Kec. Ciracap di Kab. Dati II Sukabumi dan Kec. Selajambe di Kab. Dati II Kuningan dlm Wil. Prop. Dati I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 24 Desember 1981 (LN No. 73).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981

Tentang Perubahan atas PP No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan. Disahkan pada 24 Desember 1981 (LN No. 75 dan TLN No. 3208).

c: PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1994.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1981

Keppres Nomor 1 Tahun 1981

Tentang Penambahan Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah. Disahkan pada tanggal 28 Januari 1981.

t: Keppres No. 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keppres No. 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah.

Keppres Nomor 30 Tahun 1981

Tentang Latihan Pra Jabatan. Disahkan pada tanggal 13 Juli 1981.

i: Keppres No. 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Keppres Nomor 33 Tahun 1981

Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disahkan Pada Tanggal 27 Juli 1981.

i: PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

i: PMDN No. Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

u: Keppres No. 113 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

u: Keppres No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 113 Tahun 1998.

u: Keppres No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 120 Tahun 1999.

c: Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Keppres Nomor 38 Tahun 1981

Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol. Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1996.

i: Keppres No. 63 Tahun 1984 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan penghubung Cengkareng menjadi Jalan Tol Cengkareng dan Penetapan besarnya Tafip Tol serta langganan Tol.

t: Keppres No. 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan Layang Bebas Hambatan Cawang – Tanjung Priok sebagai Jalan Told an Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarip Tol Untuk Ruas Jalan Tol Tomang – Cawang – Rawamangun serta Langganan Tol.

tbl: Keppres No. 20 Tahun 1991 tentang Perubahan Satatus Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol.

i: Keppres No. 81 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan sdan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1981 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980. Disahkan Pada Tanggal 21 Pebruari 1981.

i: KMDN No. SK. 31/DJA/1982 Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981

Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform. Disahkan Pada Tanggal 21 Pebruari 1981.

i: KMDN No. Sk.31/DJA/1982 Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981

Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Disahkan Pada Tanggal 15 Agustus 1981.

i: KMDN No. 220 Tahun 1981 Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yangn Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

i: Keputusan Kepala BPN No. 22 Tahun 1990 Tentang Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi Dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981

Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yangn Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Disahkan Pada Tanggal 2 September 1981.

tbl: KMNA/KBPN No .4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 222 Tahun 1981

Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi. Disahkan Pada Tanggal 5 September 1981.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1982

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1982

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982

Tentang Perubahan Batas Wil. Kotamadya Dati II Tanjungkarang – Telukbetung. Disahkan pada tanggal 16 Januari 1982 (LN No. 6 & TLN No.3213).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982

Tentang Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Langkat Dari Wil. Kotamadya Dati II Binjai ke Kota Stabat Di Wilayah Kab. Dati II Langkat. Disahkan pada tanggal 1 Maret 1982 (LN No. 9).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Bogor Dari Wilayah Kotamadya Dati II Bogor ke Kec. Cibinong Di Wil. Kab. Dati II Bogor. Disahkan pada tanggal 1 Maret 1982 (LN No. 10).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1982

Tentang Pembentukan Kecamatan Songgon di Kab. Dati II Banyuwangi, Kec. Megaluh, Kec. Bandarkedungmulyo, Kec. Jogoroto di Kab. Dati II Jombang, Kec.Tempursari di Kab. Dati II Lumajang, Kec. Nonggunong, Kec. Talango & Kec. Giligenting di Kab. Dati II Sumenep dalam Wil. Prop. Dati I Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 7 April 1982 (LN No. 14).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982

Tentang Pembentukan Kecamatan Arga Makmur di Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Dati I Bengkulu. Disahka pada tanggal 21 April 1982 (LN No. 19).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982

Tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kec. Padang Panjang Barat di Kotamadya Dati II Padang Panjang, Kec. Sawahlunto Utara, Kec. Sawahlunto Selatan di Kotamadya Dati II Sawahlunto,

Kec. Lubuk Sikarah, Kec. Tanjung Harapan di Kotamadya Dati II Solok, Kec. Payakumbuh Utara, Kec. Payakumbuh Barat dan Kec. Payakumbuh Timur di Kotamadya Dati II Payakumbuh dlm Wilayah Prop. Dati I Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1982 (LN No. 22).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982

tentang Pembentukan Kota Administratif Kisaran. Disahkan pada tanggal 9 Juni 1982 (LN No. 26).

tbl: PP No. 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982

Tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih. Disahkan pada tanggal 22 Juni 1982 (LN No. 27).

tbps: UU No. 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982

Tentang Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Magelang Dari Wilayah Kotamadya Dati II Magelang ke Kecamatan Mungkid Di Wilayah Kab. Dati II Magelang. Disahkan pada tanggal 4 Agustus 1982 (LN No. 36).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982

Tentang Tata Pengaturan Air. Disahkan pada tanggal 12 Aguastus 1982 (LN No. 37 & TLN No. 3225).

i: PMDN No. 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

i: PP No. 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

i: PP No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

i: PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

i: PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

c: PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

tbl: PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982

Tentang Irigasi. Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1982 (LN No. 38 & TLN No. 3226).

i: PP No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

tbl: PP No. 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1982

Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu Raja. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1982 (LN No. 39).

tbl: PP No. 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1982

Tentang Pembentukan Kec. Gedangan, Kec.Tirtoyudo di Kab. Dati II Malang, Kec.Tosari di Kab. Dati II Pasuruan, Kec.Sawahan, Kec.Wonoasri di Kab.Dati II Madiun,Kec.Tarokan,Kec.Kunjang di Kab. Dati II Kediri, Kec. Pitu, Kec. Bringin, Kec.Pangkur di Kab.Dati II Ngawi, Kec. Temayang di Kab. Dati II Bojonegoro, Kec. Sumbermalang di Kab. Dati II Situbondo, Kec. Lakarsantri, Kec. Kenjeran, dan Kec.Benowo di Kotamadya Dati II Surabaya dalam Wil. Propinsi Dati I Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 20 September 1982 (LN No. 50).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982

tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dari Wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Unaaha di Wilayah Kabupaten Kendari Daerah Tingkat II Kendari. Disahkan pada tanggal 29 September 1982 (LN No. 53).

i: PP NO. 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982

Tentang Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan. Disahkan pada tanggal 30 Nopember 1985 (LN No. 57).

tbps: UU No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1982

tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap. Disahkan pada tanggal 30 Nopember 1982 (LN No. 59).

tbl: PP No. 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1982

tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto. Disahkan pada tanggal 2 Desember 1982 (LN No. 61).

tbl: PP No. 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982

tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri. Disahkan pada tanggal 4 Desember 1982 (LN No. 63 & TLN No. 3237).

u: PP No. 3 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Ssebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 38 Tahun 1982.

c: PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1982

Tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Segara dan Kec.Gading Cempaka di Kotamadya Dati II Bengkulu dalam Wil. Propinsi Dati I Bengkulu. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1982 (LN No. 69).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1982

Tentang Pembentukan Kec. Palupuh di Kab. Dati II Agam, Kec. Panti di Kab. Dati II Pasaman & Kec. Batang Anai di Kab. Dati II Padang Pariaman dalam Wil. Prop. Dati I Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1982 (N No. 71).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Probolinggo. Disahkan pada tanggal 21 Desember 1982 (LN No. 72 & TLN No. 3240).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pasuruan. Disahkan pada tanggal 21 Desember 1982 (LN No. 73 & TLN No. 3241).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Mojokerto. Disahkan pada tanggal 21 Desember 1982 (LN No. 74 & TLN No. 3242).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Blitar. Disahkan pada tanggal 21 Desember 1982 (LN No. 75 & TLN No. 3243).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Madiun. Disahkan pada tanggal 21 Desember 1982 (LN No. 76 & TLN No. 3244).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1982

Keppres Nomor 2 Tahun 1982

Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan RI dengan Papua Nugini. Disahkan pada tanggal 4 Januari 1982.

Pasal 3

t: Keppres No. 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan RI dengan Papua Nugini.

t: Keppres No. 57 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan RI dengan Papua Nugini sebagaimana diubah dengan Keppres No. 10 Tahun 1985.

Keppres Nomor 22 Tahun 1982

Tentang Penetapan Jembatan Mojokerto menjadi Jembatan Tol dan Besarnya Tol. Disahkan pada tanggal 15 Mei 1982.

tbl: Keppres No. 37 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Jembatan Tol Mojokerto sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol.

Keppres Nomor 29 Tahun 1982

Tentang Perubahan Pada Lampiran A, B, Dan E Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1980. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1982.

Keppres Nomor 81 Tahun 1982

Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1974 Tentang Perubahan/penetapan Status Rumah Negeri. Disahkan pada tanggal 4 Desember 1982.

c: Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

tbl: Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1982 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982

Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.

i: PMDN No. 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 1982 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1982

Tentang pengangkatan anggota-anggota Panitia Pertimbangan Landreform Pusat. Disahkan pada tanggal 30 Januari 1982.

i: KMDN No. Sk.31/Dja/1982 Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 261 Tahun 1982.

Tentang Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah. Disahkan pada tanggal 14 September 1982.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982

Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan. Disahkan Pada Tanggal 17 September 1982.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 277 Tahun 1982

Tentang Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Lingkungan Karet, Karet Kuningan Dan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disahkan Pada Tanggal 20 September 1982.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 13/DJA/1982

Tentang Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek

Pengembangan Perkebunan (Pir, Pir Khusus Pir Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat). Disahkan Pada Tanggal 11 Pebruari 1982.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 15/DJA/1982

Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan. Disahkan Pada Tanggal 17 Pebruari 1982.

t: KMDN No. Sk.51/Dja/1982 Tentang Perubahan Sk Menteri Dalam Negeri No Sk.15/Dja/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan.

i: KMDN No. Sk.51/Dja/1982 Tentang Perubahan Sk Menteri Dalam Negeri No Sk.15/Dja/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 31/DJA/1982

Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat. Disahkan Pada Tanggal 8 Maret 1982.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 51/DJA/1982

Tentang Perubahan Sk Menteri Dalam Negeri No SK. 15/DJA/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 Dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan. Disahkan Pada Tanggal 31 Maret 1982.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1983

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1983

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983

Tentang Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas. Disahkan pada tanggal 19 Januari 1983 (LN No.1).

tbl: PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

tbl: PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Disahkan pada tanggal 14 Pebruari 1983 (LN No. 5 dan TLN No. 3247).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 21 April 1983 (LN No. 13 & TLN No. 3250).

u: PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1983

Tentang Pembentukan Kecamatan Cisoka di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, Kecamatan Takokak, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Naringgul di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, Kecamatan Selawi, Kecamatan Leuwigong, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Banjarwangi dan Kecamatan Talegong di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 26 April 1983 (LN No. 15)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1983

Tentang Pembentukan Kecamatan Belopa, Kecamatan Bua, Kecamatam Wara Utara, Kecamatan Lamasi, dan Kecamatan Sukamaju di Kabupaten Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 22 Juni 1983 (LN No. 31).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Disahkan pada tanggal 2 September 1983 (LN No. 38).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983

Tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang. Disahkan pada tanggal 27 September 1983 (LN No. 42).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983

Tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsari Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Sekotong Tengah di kabupaten Daerah tingkat II Lombok Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 8 Nopember 1983 (LN No. 46).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983

Tentang Pembentukan Kota Madya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Disahkan pada tanggal 7 Desember 1983 (LN NO. 48 & TLN No. 3261).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1983

Keppres Nomor 5 Tahun 1983

Tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Bermotor Dinas. Disahkan pada tanggal 28 Januari 1983.

Pasal 5

t: Keppres No. 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Balik Nama Terhadap Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara Yang Dibeli Berdasarkan PP No. 46 Tahun 1971.

i: Keppres No. 48 Tahun 1984 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pejabat Baru Eselon I, II, III, dan IV untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Keppres Nomor 17 Tahun 1983

Tentang Penyempurnaan Keppres No. 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah. Disahkan pada tanggal 26 Maret 1983.

i: Keppres No. 30 Tahun 1984 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga.

i: Keppres No. 40 Tahun 1985 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga sebagaimana telah disempurnakan dengan Keppres No. 17 Tahun 1983 dan Keppres No. 40 tahun 1984.

Keppres Nomor 28 Tahun 1983

Tentang Pelaksanaan Balik Nama Terhadap Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara Yang Dibeli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971. Disahkan pada tanggal 25 Mei 1983.

i: Keppres No. 48 Tahun 1984 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pejabat Baru Eselon I, II, III, dan IV untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Keppres Nomor 35 Tahun 1983

Tentang Eselon Jabatan Struktural Deputi Ketua/ Kepala/ Direktur Jenderal Pada Lembaga- Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 15 Juni 1983.

Keppres Nomor 48 Tahun 1983

Tentang Penanganan Khusus Penentuan Ruang Dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Pariwisata Puncak Dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta Bogor-puncak-cianjur Di Luar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur, Dan Kota Cibinong. Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1983.

Pasal 7 (1)

t: Keppres No. 79 Tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak.

tbl: Keppres No. 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1983

Inpres Nomor 3 Tahun 1983

Tentang Keringanan Pajak Pembangunan I Dan Retribusi Izin Membangun Hotel Di Daerah Tujuan Wisata. Disahkan pada tanggal 9 Maret 1983.

Inpres Nomor 15 Tahun 1983

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Disahkan Pada Tanggal 4 Oktober 1983.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1983 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983

Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat. Disahkan Pada Tanggal 29 Desember 1983.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1984

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1984

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Disahkan pada tanggal 24 Januari 1984.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1984

Tentang Pencabutan atas PP No. 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 1984 (LN No. 4).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan ke Kota Lubuk Pakam di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Disahkan pada tanggal 1 Maret 1984 (LN No. 7).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1984

Tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 29 Maret 1984 (LN No. 12).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1984 (LN No. 15 & TLN No. 3269).

i: PP No. 79 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984

Tentang Pengolahan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Eksklusif Indonesia. Disahkan pada tanggal 29 Juni 1984 (LN No. 23 & TLN No. 3275).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1984

Tentang Pembentukan Kecamatan Bungaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, Kecamatan Gempa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, dan Kecamatan Tulallu di Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1984 (LN No. 46).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1984

Keppres Nomor 9 Tahun 1984

Tentang Penetapan Jalan Pintas Serang Dan Jalan Pintas Ciujung Menjadi Jalan Tol Serta Penetapan Besarnya Tol. Disahkan pada tanggal 27 Januari 1984.

Keppres Nomor 10 Tahun 1984

Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 Tentang Tambahan Jabatan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 Sebagaiman Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979. Disahkan pada tanggal 27 Januari 1984.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984

Tentang Susunan Organisasi Departemen. disahkan Pada Tanggal 6 Maret 1984.

Bidang Keagrariaan

tbl: Keppres No. 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

tbl: Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Keppres Nomor 18 Tahun 1984

Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat. Disahkan pada tanggal 9 Maret 1984.

Diktum KETIGA dan KEEMPAT

u: Keppres No. 9 Tahun 1988 tentang Perubahan Keppres No. 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat**.**

u: Keppres No. 29 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 1988**.**

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984;

Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap ke IV 1984/1985 – 1988/1989. Disahkan pad atanggal 19 Maret 1984.

i: PMDN No. 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian.

i: PMDN No. 7 Tahun 1986 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia.

Keppres Nomor 30 Tahun 1984

Tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga. Disahkan pada tanggal 21 April 1984.

c: Keppres No. 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang dan jasa.

Keppres Nomor 33 Tahun 1984

Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan pada tanggal 9 Mei 1984.

Keppres Nomor 40 Tahun 1984

Tentang Penambahan Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah. Disahkan pada tanggal 30 Mei 1984.

c: Keppres No. 40 Tahun 1985 tentang Perubahan Keppres Nomor 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Keppres No. 17 Tahun 1983 dan Keppres No. 42 Tahun 1980.

Keppres Nomor 57 Tahun 1984

Tentang Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma IV dibidang Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 19 September 1984.

Keppres Nomor 59 Tahun 1984

Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 1984.

tbl: Keppres No. 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan.

Keppres Nomor 63 Tahun 1984

Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Penghubung Cengkareng Menjadi Jalan Tol Cengkareng Dan Penetapan Besarnya Tarif Tol Serta Langganan Tol. Disahkan pada tanggal 26 Nopember 1984.

i: Keppres No. 38 Tahun 1985 tentang Pemberian Nama Jalan Bebas Hambatan Penghubung ke Bandar Udara Internasional Cengkareng atau Jalan Tol Cengkareng dengan nama "Jalan Prof. Dr. Ir. Soedijatmo".

tbl: Keppres No. 25 Tahun 1988 tentang Penetapan Besarnya Told an Langganan Tol pada Beberapa Jalan Told an Jembatan Tol.

i: Keppres No. 49 Tahun 1996 tentang Pengalihan Gerbang Tol pada Jalan Bebas Hambatan Prof. Dr. Ir. Soedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1984

Inpres Nomor 5 Tahun 1984

Tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di bidang Usaha. Disahkan pada tanggal 11 April 1984.

t: PMDN No. 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan PMDN No. 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1984 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984

Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan

Rumah Dari Bank Tabungan Negara. Disahkan Pada Tanggal 28 Januari 1984.

tbl: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984

Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Disahkan Pada Tanggal 19 April 1984.

sem: PMDN No. 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 Dan UU No. 6 Tahun 1968.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984

Tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Disahkan Pada Tanggal 15 Desember 1984.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

i: PMDN No. 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan PMDN No. 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 16 Tahun 1990 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1984
(KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum Dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform. Disahkan Pada Tanggal 8 Maret 1984.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1984

Tentang Pembentukan Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kotamadya. Disahkan pada tanggal 2 Mei 1984.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1984

Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya. Disahkan Pada Tanggal 5 Nopember 1984.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1984

Tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan. Disahka pada tanggal 17 Nopember 1984.

i: PMDN No. 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1985

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1985

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985

Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 ttg Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 8 Maret 1986 (LN No. 21).

c: PP No. 51 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 7 Tahun 1977 ttg Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah, terakhir dg PP No. 15 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985

Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985 (LN No. 24).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985

Tentang Jalan. Disahkan pada tanggal 31 Mei 1985 (LN No. 37 & TLN No. 3293).

i: PP No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol.

i: PP No. 40 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas PP No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol.

c: PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985

Tentang Perlindungan Hutan. Disahkan pada tanggal 7 Juni 1985 (LNNo. 39 & TLN No. 3294).

i: PP No. 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

tbl: PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Pemerintah.

i: PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

tbl: PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985

Tentang Barang yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Disahkan pada tanggal 2 Desember 1985 (LN No. 67 & TLN No. 3311).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985

Tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 27 Desember 1985 (LN No. 70 & TLN No. 3314).

tbl: PP No. 12 Tahun 1994 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985

Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disahkan pada tanggal 27 Desember 1985 (LN No. 71 & TLN No. 3315).

tbl: PP No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1985

Keppres Nomor 4 Tahun 1985

Tentang Perubahan Keppres No. 51 Tahun 1979 tentang Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan. Disahkan pada tanggal 12 Januari 1985.

t: Keppres No. 2 Tahun 1989 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertahanan**.**

Keppres Nomor 8 Tahun 1985

Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 1985.

u: Keppres No. 8 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keppres No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional.

Pasal 4 (1), (2)

u: Keppres No. 68 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keppres No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana diubah dengan Keppres No. 8 Tahun 1989.

c: Keppres No. 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.

Keppres Nomor 9 Tahun 1985

Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural. Disahkan pada tanggal 5 Pebruari 1985.

u: Keppres No. 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

u: Keppres No. 60 Tahun 1985 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

u: Keppres No. 11 Tahun 1986 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 60 Tahun 1985.

u: Keppres No. 17 Tahun 1989 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 11 Tahun 1986.

u: Keppres No. 46 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1989.

u: Keppres No. 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 46 Tahun 1991.

u: Keppres No. 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 26 Tahun 1992.

u: Keppres No. 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural

sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keppres No. 51 Tahun 1992.

u: Keppres No. 69 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Keppres No. 62 Tahun 1993.

u: Keppres No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 69 Tahun 1993.

u: Keppres No. 30 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Keppres No. 1 Tahun 1994.

u: Keppres No. 35 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 1994.

u: Keppres No. 38 Tahun 1995 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 1994.

u: Keppres No. 17 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 38 Tahun 1995.

u: Keppres No. 38 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996.

u: Keppres No. 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

u: Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 58 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keppres Nomor 10 Tahun 1985

Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini. Disahkan pada tanggal 27 Pebruari 1985.

t: Keppres No. 57 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 10 Tahun 1985.

Keppres Nomor 29 Tahun 1985

Tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural. Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985.

tbl: Keppres No. 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keppres No. 51 Tahun 1992.

Keppres Nomor 30 Tahun 1985

Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985. Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985.

tbl: Keppres No. 55 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 15 Tahun 1985 ke dalam PP No. 51 Tahun 1992.

Keppres Nomor 34 Tahun 1985

Tentang Peningkatan Koperasi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985.

Keppres Nomor 40 Tahun 1985

Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tim Pengendali Pengandaan Barang/ Peralatan Pemerintah Sebagaimana Telah Disempurnakan Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun

1983 Dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984. disahkan pada tanggal 6 April 1985.

Keppres Nomor 41 Tahun 1985

Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 Tentang Tim Pengendalian Pengadaan Barang/ Pemerintah/ Lembaga. disahkan pada tanggal 6 April 1985.

Keppres Nomor 57 Tahun 1985

Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1985. Disahkan pada tanggal 20 Juli 1985.

Keppres Nomor 60 Tahun 1985

Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural. Disahkan pada tanggal 30 Juli 1985.

u: Keppres No. 11 Tahun 1986 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 60 Tahun 1985.

Keppres Nomor 77 Tahun 1985

Tentang Pengenaan Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan. Disahkan pada tanggal 21 Nopember 1985.

Pasal 9

u: Keppres No. 36 Tahun 1989 tetang Perubahan Keppres No. 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.

tbl: Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.

Keppres Nomor 79 Tahun 1985

Tentang Penetapan Rencana Umum tata Ruang Kawasan Puncak. Disahkan pada tanggal 6 Desember 1985.

tbl: Keppres No. 114 Tan 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1985 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985

Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan. Disahkan Pada Tanggal 1 Agustus 1985.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985

Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Dan Proyek Departemen Pertanian. Disahkan Pada Tanggal 19 September 1985.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

t: PMDN No. 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan PMDN No. 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

i: PMDN No. 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan PMDN No. 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1985 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 593.41-64 Tahun 1985

Tentang Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar. Disahkan Pada Tanggal 30 Mei 1985.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1986

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1986

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ke Kota Seroang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Disahkan pada tanggal 16 Januari 1986.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. Diahkan pada tanggal 4 Pebruari 1986 (LN No. 7 & TLN No. 3320).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Diahkan pada tanggal 4 Pebruari 1986 (LN No. 8 & TLN No. 3321).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Daerah Kabupaten Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Diahkan pada tanggal 6 Pebruari 1986 (LN No. 11 & TLN No. 3322).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun. Disahkan pada tanggal 10 Maret 1986 (LN No. 21 & TLN No. 3328)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986

tentang kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri. Disahkan pada tanggal 2 April 1986 (LN No. 23 & TLN No. 3330).

i: Keppres No. 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Disahkan pada tanggal 5 Juni 1986 (LN No. 42 & TLN No. 3338).

i: Keppres No. 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

i: PP No. 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

i: PP No. 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

i: Keppres No. 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri.

i: Inpres No. 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara.

sem: PP No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986

Tentang Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe. Disahkan pada tanggal 5 Agustus 1986 (LN No. 48).

t: UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986

Tentang Pembentukan Kota Administratif Pariaman. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1986 (LN No. 49).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986

Tentang Pembentukan Kota Administratif Metro. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1986 (LN No. 50).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986

Tentang Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanaka, Tanjungsiang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di

Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 21 Agustus 1986.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986

Tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon. Disahkan pada tanggal 17 September 1986 (LN No.60).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1986

tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten. Disahkan pada tanggal 17 September 1986.

tbl: PP No. 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986

tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo. Disahkan pada tanggal 17 September 1986.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1986

tentang Pembentukan Kecamatan Aranio di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Kecamatan Mekarsari dan Kecamatan Barambai di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Bungur dan Kecamatan Lokpaikat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Upau, Kecamatan jaro, Kecamatan Muara Harus dan Kecamatan Pugaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Disahkan pada tanggal 18 September 1986.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1986

Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Dendang di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Dalam Wilayah propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 24 September 1986 (LN No. 65).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan. Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1986 (LN No. 68 & TLN No. 3342).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan. Disahkan pada tanggal 13 Nopember 1986 (LN No. 70).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1986

Tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka,di Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 15 Desember 1986 (LN No. 74).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986

tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1986 (LN No. 75 & TLN No. 3343).

i: Keppres No. 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta.

tbl: PP No. 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1986

Keppres Nomor 11 Tahun 1986

Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1984 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1985. Disahkan pada tanggal 5 Maret 1986.

t: Keppres No. 17 Tahun 1989 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 60 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 11 Tahun 1986.

Keppres Nomor 64 Tahun 1986

Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1986.

c: Keppres No. 12 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keppres No. 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1986

Inpres Nomor 1 Tahun 1986

Tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 3 Maret 1986.

i: PMDN No. 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1986 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986

Tentang Tatacara Penyediaan Lahan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi. Disahkan Pada Tanggal 12 Juli 1986.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986

Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah. Disahkan Pada Tanggal 15 Nopember 1986.

i: Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986

Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 29 Nopember 1986.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1986 (KMDN)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

i: Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 1989 tentang Kedudkan dan Perubahan Nama Akademi Agraria menjadi Akademi Pertanahan Nasional.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1987

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1987

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987
tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Disahkan pada tanggal 5 Maret 1987(LN No. 15 & TLN No. 3350).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987
tentang Izin Usaha Industri. Disahkan pada tanggal 3 Juni 1987 (LN No. 21 & TLN No. 3353).
tbl: PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang. Disahkan pada tanggal 20 Juli 1987 (LN No. 29 & TLN No. 3354).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Disahkan pada tanggal 27 Juli 1987 (LN No. 34 & TLN No. 3358).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar. Disahkan pada tanggal 14 September 1987 (LN No. 40 & TLN No. 3360).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan. Disahkan pada tanggal 14 September 1987 (LN No. 41 & TLN No. 3361).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987

Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1987.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1987

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun1987

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987. Disahkan Pada Tanggal 20 Oktober 1987.

tbl: Keppres No. 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1987 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987

Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah. Disahkan Pada Tanggal 11 April 1987.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

i: PMDN No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Disahkan Pada Tanggal 5 Oktober 1987.

i: PMDN No. 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987

Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan. Disahkan Pada Tanggal 16 Nopember 1987.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1988

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1988

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988

Tentang Rumah Susun. Disahkan pada tanggal 26 April 1988 (LN No7 & TLN No. 3372).

t: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

t: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap.

t: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

i: Inpres No. 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

t: PMDN No. 3 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun.

i: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: Keppres No. 22 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988

tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. Disahkan Pada tanggal 3 Juni 1988 (LN No. 10 & TLN No. 3373).

i: PP No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol

i: PP No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah.

i: Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i: Peraturan Kepala BPN No. 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Peraturan Kepala BPN No. 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

i: Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara

i: Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat

i: Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Disahkan pada tanggal 5 Desember 1988 (LN No. 42 & TLN No. 3381).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa. Disahkan pada tanggal 6 Desember 1988 (LN No. 43 & TLN No. 3382).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Disahkan pada tanggal 6 Desember 1988 (LN No. 44 & TLN No. 3383).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1988

Tentang Pembentukan Kecamatan Peundeuy di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Kecamatan Kota SukabumiBarat dan Kota Sukabumi Timur Di Kotamadya Tingkat II Sukabumi Dan Kecamatan Maniis di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 8 Desember 1988 (LN No. 47).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1988

Keppres Nomor 26 Tahun 1988

Tentang BPN. Disahkan pada tanggal 19 Juli 1988.

t: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1988 Tentang Penyesuaian Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas BPN.

t: Keppres No. 2 Tahun 1989 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan.

i: Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989 tentang Pedoman Naskah Dinas Di Lingkungan BPN.

t: Keppres No. 8 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keppres No. 8 Tahun 1985 tentang Badan kebijaksanaan Perumahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 1989 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Ikatan Dinas dan Tugas Belajar pada Akademi Pertanahan Nasional.

t: Keppres No. 10 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keppres No. 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 19 Tahun 1988.

t: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

t: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah Dan Sertipikat.

i: Instruksi Kepala BPN No. 1. 01 Tahun 1989 Tentang Pengamanan Blangko Sertipikat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989 Tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluaan Perusahaan Kawasan Industri.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21/KBPN/1989 Tentang Perubahan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Atas Tanah-Tanah Yang Telah Diberikan Kepada Para Transmigran.

i: Peraturan Kepala BPN No. 16 Tahun 1990 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi.

i: Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 1990 Tentang Penyempurnaan Susunan Keanggotaan Dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Di Kecamatan Yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja BPN Propinsi Maluku.

i: Keputusan Kepala BPN No. 22 Tahun 1990 Tentang Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi Dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Seluruh Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform.

i: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee/Guntai.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

i: Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: Keppres No. 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nsional.

i: KMNA/KBPN No. 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i: PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Sistematik Di Daerah Uji Coba.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1996 Tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah Dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta.

i: KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS).

i: KMNA/KBPN No. 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

i: KMNA/KBPN No. 13 Tahun 1997 Tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

i: KMNA/KBPN No. 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: KMNA/KBPN No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS).

i: KMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998 Tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997.

i: KMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah.

i: KMNA/KBPN No. 58-III-1998 Tentang Pengadaan Tenaga Ajudikasi Dilingkungan BPN.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.

i: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

i: KMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

i: PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998 Tentang Perubahan PMNA/KBPN No.4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

i: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat.

i: KMNA/KBPN No. 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PMNA/KBPN No.2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

i: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya.

i: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: KMNA/KBPN No. 11 Tahun 1999 Tentang Persetujuan Penghapusan Blangko Sertipikat Tanah Lama Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

i: PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

i: PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

i: KMNA/KBPN No. 12 Tahun 1999 Tentang Pencabutan KMNA/KBPN No.13 Tahun 1997 Tentang Peniadan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958.

u: Keppres No. 154 tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang.

tbl: Keppres No. 95 Tahun 2000 tentang Badan pertanahan Nasional.

tbl: Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keppres Nomor 39 Tahun 1988

Tentang Lembaga Pembiayaaan. Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1988.

c: Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keppres Nomor 61 Tahun 1988

Tentang Lembaga Pembiayaaan. Disahkan pada tanggal 20 Desember 1988.

tbl: Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1988

Inpres Nomor 1 Tahun 1988

Tantang Pengadaan barang dan jasa. Disahkan pada tanggal 28 Maret 1988.

c: Keppres 6 Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan.

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 1988

Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1988

Tentang Penyesuaian Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 26 Desember 1988.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 1988

Keputusan Kepala BPN No. 01/KBPN/1988.

Tentang Kop Surat, Stempel Dinas dan Papan Nama Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 12 Desember 1988.

Keputusan Kepala BPN No. 02/KBPN/1988.

Tentang Wewenang Menandatangani Surat-Surat Dinas Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 13 Desember 1988

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 1988

tentang Kop Surat, Stempel Dinas dan Papan Nama di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Disahkan pada tanggal 16 Desember 1988.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Kepala BPN No. 10/KBPN/1988.

Tentang Penamaan dan Penunjukan Pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan / Kotamadya. Disahkan pada tanggal 29 Desember 1988.

i: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989 tentang Tata Kearsipan Bada Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 22 Tahun 1990 Tentang Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi Dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.

Keputusan Kepala BPN No. 11/KBPN/1988

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 28 Desember 1988.

i: Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989 tentang Pedoman Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

i: Instruksi Kepala BPN No. 1. 01 Tahun 1989 Tentang Pengamanan Blangko Sertipikat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 1989 tentang Kedudukan dan Perubahan Nama Akademi Agraria menjadi Akademi Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 1989 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah Dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

INSTRUKSI KEPALA BPN TAHUN 1988

Instruksi Kepala BPN No. 1 Tahun 1988

Tentang Ketentuan-ketentuan Untuk Menjaga Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab di Bidang Administrasi Pertanahan. Disahkan pada tanggal 21 Nopember 1988.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1989

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1989

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989

Tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. Disahkan pada tanggal 13 April 1989 (LN No.13 & TLN No. 3392).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989

Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara. Disahkan pada tanggal 28 Oktober 1989 (LN No. 36).

u: PP No. 50 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 16 Tahun 1989 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara.

tbl: PP No. 51 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagai mana Telah Diubah Terakhir Dengan PP No. 15 Tahun 1985.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989

Tentang Pembentukan Kota Administratip Bontang. Disahkan Pada Tanggal 1 Desember 1989. (LN No. 42).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1989

Keppres Nomor 2 Tahun 1989

Tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan. Disahkan pada tanggal 10 Januari 1989.

Keppres Nomor 17 Tahun 1989

Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986. Disahkan pada tanggal 5 April 1989.

u: Keppres No. 46 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1989.

Keppres Nomor 31 Tahun 1989

Tentang Dana Reboisasi. Disahkan pada tanggal 27 Juni 1989.

tbl: Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi.

Keppres Nomor 49 Tahun 1989

Tentang Tunjangan Jabatan Widyaiswara. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1989.

tbl: Keppres No. 4 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Widyaiswara.

Keppres Nomor 53 Tahun 1989

Tentang Kawasan Industri. Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1989.

t: Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluaan Perusahaan Kawasan Industri.

i: Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi Dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri.

t: Inpres No. 8 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Kawasan Industri.

i: Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 1990 Tentang Penyajian Informasi Lingkungan Untuk Kawasan Industri.

Pasal 7

t: Keppres No. 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri.

i: Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 1992 Tentang Penyediaan Dan Pemberiaan Hak Guna Bangunan Induk Parsial Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri Dan Pemecahannya Untuk Perusahaan Industri.

i: Keppres No. 33 Tahun 1992 tentang Tata cara Penanaman Modal.

i: Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal.

u: Keppres No. 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

tbl: Keppres No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.

Keppres Nomor 57 Tahun 1989

Tentang Tim Koordinasi Tata Ruang Nasional. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1989.

i: Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

i: Keppres No. 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri.

tbl: Keppres No. 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1989

Keppres Nomor 1 Tahun 1989

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Disahkan pada tanggal 20 Maret 1989.

Keppres Nomor 8 Tahun 1989

Tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Industri.

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 1989

Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989.

Tentang Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 26 Desember 1988

tbl: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989.

Tentang Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun. Disahkan Pada Tanggal 27 Maret 1989.

i: KMNA/KBPN No.58-III-1998 Tentang Pengadaan Tenaga Ajudikasi Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989.

Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap. Disahkan Pada Tanggal 27 Maret 1989.

tbl: PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989

Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Disahkan Pada Tanggal 27 Maret 1989.

Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989

Tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah Dan Sertipikat. Disahkan Pada Tanggal 28 Maret 1989.

tbl: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat.

Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 1989

Tentang Penyempurnaan Bentuk Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 11 September 1989.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan.

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 1989

Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya. Disahkan pada tanggal 31 Januari 1989.

i: Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989 tentang Pedoman Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

i: Instruksi Kepala BPN No. 1. 01 Tahun 1989 Tentang Pengamanan Blangko Sertipikat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 1989 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Ikatan Dinas dan Tugas Belajar pada Akademi Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 1989 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Di Kecamatan Yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku.

i: Keputusan Kepala BPN No. 22 Tahun 1990 Tentang Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi Dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Seluruh Indonesia.

u: Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

i: Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah Dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

i: Keputusan Kepala BPN No. Sk. 2 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN Dan Kantor Pertanahan.

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 1989

tentang Pedoman Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 11 Maret 1989.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989

Tentang Tata Kearsipan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 11 Maret 1989.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989

Tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 13 April 1989.

Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 1989

Tentang Kedudukan dan Perubahan Nama Akademi Agraria Menjadi Akademi Pertasnahan Nasional. Disahkan pada tanggal 1 April 1989.

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 1989 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Ikatan Dinas dan Tugas Belajar pada Akademi Pertanahan Nasional.

Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 1989

Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Ikatan Dinas dan Tugas Belajar Pada Akademi Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggl 22 Juni 1989.

Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 1989

Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 5 Juli 1989

Keputusan Kepala BPN No. 14 Tahun 1989

tentang Penggunaan Blangko Sertipikat Tanah yang baru.

t: KMNA/KBPN No. 11 Tahun 1999 Tentang Persetujuan Penghapusan Blangko Sertipikat Tanah Lama Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 1989

Tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin.

u: Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin. Disahkan pada tanggal 29 Maret 2001.

Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 1989

Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluaan Perusahaan Kawasan Industri. Disahkan Pada Tanggal 28 Oktober 1989.

i: Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi Dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri.

t: Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 1990 Tentang Penyajian Informasi Lingkungan Untuk Kawasan Industri.

t: Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 1992 Tentang Penyediaan Dan Pemberiaan Hak Guna Bangunan Induk Parsial Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri Dan Pemecahannya Untuk Perusahaan Industri.

tbl: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997 Tentang Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri.

Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 1989

Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi Dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri. Disahkan Pada Tanggal 31 Oktober 1989.

t: Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluaan Perusahaan Kawasan Industri.

t: Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 1990 Tentang Penyajian Informasi Lingkungan Untuk Kawasan Industri.

t: Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 1992 Tentang Penyediaan Dan Pemberiaan Hak Guna Bangunan Induk Parsial Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri Dan Pemecahannya Untuk Perusahaan Industri.

tbl: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997 Tentang Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri.

Keputusan Kepala BPN No. 21/KBPN/1989

Tentang Perubahan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Atas Tanah-Tanah Yang Telah Diberikan Kepada Para Transmigran. Disahkan Pada Tanggal 29 Nopember 1989.

INSTRUKSI KEPALA BPN TAHUN 1989

Instruksi Kepala BPN No. 1. 01 Tahun 1989

Tentang Pengamanan Blangko Sertipikat. Disahkan pada tanggal 30 Maret 1989.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1990

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990

Tentang Perubahan PP No. 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 38 Tahun 1982. Disahkan pada tanggal 26 Januari 1990 (LN No. 6 & TLN No. 3401).

tbl: PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1990

Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Disahkan Pada Tanggal 16 Maret 1990 (LN No. 11 & TLN No. 3404).

tbl: PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990

Tentang Jalan Tol pada tanggal 24 Maret 1990 (LN No. 12 & TLN No. 3405).

u: PP No. 40 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas PP No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol.

t: PP No. 40 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas PP No. 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol.

tbl: PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990

tentang Usaha Perikanan. Disahkan pada tanggal 28 Mei 1990 (LN No. 19 & TLN No. 3404).

u: PP No. 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

u: PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua PP No. 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan.

tbl: PP No. 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990

Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Disahkan Pada tanggal 5 Juni 1990 (LN NO. 24 & TLN No. 3409).

i: PP No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

i: PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

i: Keppres No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

i: Keppres No. 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

tbl: PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok. Disahkan pada tanggal 1 September 1990 (LN No. 59 & TLN No. 3423).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 6 September 1990 (LN No. 61 & TLN No. 3424).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1990

Tentang Perubahan PP No. 16 Tahun 1989 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara. Disahkan pada tanggal 29 September 1990 (LN No. 70)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990

Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading Dan Pademangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres Dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung Dan Ciracas Di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru Di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa Dan Pesanggrahan Di Wilayah

Kotamadya Jakarta Selatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1990 (LN No. 87).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1990

Keppres Nomor 16 Tahun 1990

Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 17 April 1990.

c: Keppres No. 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres No. 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.

Keppres Nomor 23 Tahun 1990

Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Disahkan pada tanggal 5 Juni 1990.

tbl: Keppres No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Keppres Nomor 29 Tahun 1990

Tentang Dana Reboisasi. Disahkan pada tanggal 1 Juli 1990.

u: Keppres No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi.

u: Keppres No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 28 Tahun 1991.

u: Keppres No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 40 Tahun 1993.

u: Keppres No. 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 24 Tahun 1997.

u: Keppres No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 53 Tahun 1997.

tbl: PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Keppres Nomor 30 Tahun 1990

Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan. Disahkan pada tanggal 1 Juli 1990 (LN No. 33).

Pasal 10, 16

u: Keppres No. 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.

u: Keppres No. 41 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 29 Tahun 1991.

u: Keppres No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 41 Tahun 1993.

Keppres Nomor 32 Tahun 1990

Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1990.

i: Keppres No. 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur.

Keppres Nomor 33 Tahun 1990

Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1990.

Keppres Nomor 43 Tahun 1990

Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Disahkan pada tanggal 19 September 1990.

tbl: Keppres No. 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

Keppres Nomor 50 Tahun 1990

Tentang Perubahan atas Keppres No. 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1990.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1990

Inpres Nomor 5 Tahun 1990

Tentang Peremajaan Permukiman Kumuh yang berada Diatas Tanah Negara. Disahkan pada tanggal 26 September 1990.

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 1990

Peraturan Kepala BPN No. 16 Tahun 1990

Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Disahkan Pada Tanggal 25 Juli 1990.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 1990

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 1990

Tentang Persetujuan Pembubaran Yayasan Hudaya Bina Sejahtera dan Pembentukan Yayasan Bhumi bhakti Adhiguna. Disahkan pada tanggal 27 Januari 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 5 Tahun 1990

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten-kabupaten Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur Yang Belum Dibentuk Kantor Pertanahannya. Disahkan pada tanggal 26 Maret 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 1990

Tentang Penyajian Informasi Lingkungan Untuk Kawasan Industri. Disahkan Pada Tanggal 2 April 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 1990

Tentang Pernyataan/Penegasan Tidak Dapat Menjalani Keberaaaanya Yayasan Hudaya Bida Sejahtera. Disahkan pada tanggal 6 April 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 1990

Tentang Penggunaan Sebagian Gedung Kantor Badan Pertanahan Nasional Di Jln. Agus Salim No. 58 Jakarta Pusat. Disahkan pada tanggal 6 April 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 1990

Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Ke-V Badan Pertanahan Nasional Tahun 1989/1999 – 1993/1994. Disahkan pada tanggal 3 Mei 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 1990

Tentang Penetapan Peserta Pendidikan dan Latihan Program Pasca Sarjana (S2) di Luar Neger Tahun 1990/1991. Disahkan pada tanggal 3 Mei 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 1990

Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Perceraian/Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1990.

u: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 29 Maret 2001.

Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1990

Tentang Penunjukan Lokasi Kecamatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Di Seluruh Indonesia. Disahkan pada tanggal 16 Juni 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 1990

Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan. Disahkan pada tanggal 18 Juli 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 14 Tahun 1990

Tentang Penerbitan Majah Resmi Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 1990

Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Dosen dan Asisten Dosen Tidak Tetap, serta Panitia dan Pengawas Ujian Pada Akademi Pertanahan Nasional Tahun Angaran 1990/1991. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 1990

Tentang Penyempurnaan Susunan Keanggotaan Dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar. Disahkan Pada Tanggal 6 September 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 1990

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten di Kecamatan Dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1990.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Di Kecamatan Yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja BPN Propinsi Maluku.

Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 1990

Tentang Tim Perundang-undangan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 1 Nopember 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 1990

Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Di Kecamatan Yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah

Kerja Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku. Disahkan Pada Tanggal 6 Nopember 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 22 Tahun 1990

Tentang Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi Dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Seluruh Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 10 Nopember 1990.

Keputusan Kepala BPN No. 23 Tahun 1990

Tentang Penetapan Peserta Penataran Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Angkatan III Bagi Pejabat Pertanahan Nasional Pusat dan Daerah di Jakarta. Disahkan pada tanggal 22 Nopember 1990

INSTRUKSI KEPALA BPN TAHUN 1990

Instruksi Kepala BPN No. 23 Tahun 1990

Tentang Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 24 September 1990.

KEPUTUSAN BERSAMA DAN INSTRUKSI BERSAMA

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN No. 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990.

Tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1990.

Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan BPN No. 4 Tahun 1990, 24 Tahun 1990.

Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Disahkan padatanggal 30 Nopember 1990.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1991

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1991

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991

Tentang Penerapan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disahkan pada tanggal 14 Januari 1991 (LN No. 8).

t: PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991

Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Tk.I Timor Timur menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Disahkan pada tanggal 13 Maret 1991 (LN No. 24 & TYLN No. 3435).

t: PP No. 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Pasal 5 Ayat (1) PP No. 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut UU Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991

Tentang Perubahan PP No. 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 27 Maret 1991 (LN No. 27 & TLN No. 3437).

t: PP No. 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung.

i: Keppres No. 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keppres No. 51 Tahun 1992.

i: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

tbl: PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991

Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung. Disahkan pada tanggal 27 Maret 1991 (LN No. 28 & TLN No. 3438).

i: Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

tbl: PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991

tentang Rawa. Disahkan Pada tanggal 2 Mei 1991 (LN No. 35 & TLN No. 3441).

i: PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

i: Keppres No. 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

i: PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991

Tentang Sungai. Disahkan pada tanggal 11 Juni 1991 (LN No. 44 & TLN No. 3445).

i: Keppres No. 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai.

c: PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

tbl: PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991

Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara. Disahkan pada tanggal 5 Juli 1991 (LN No. 52 & TLN No. 3448).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991

Tentang Pembentukan Kecamatan Ranto Peureulak Di Wilayan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Disahkan pada tanggal 7 September 1991 (LN No. 66).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991

Tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 7 September 1991 (LN No. 67).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1991

tentang Pembentukan Kota Administratif Watampone. Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1991 (LN No. 71)

tbl: PP No. 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991

Tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar. Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1991 (LN No. 71).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991

Tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo Dan Pemayung Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal Dan Rimbo Bujang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan, Mendahara Dan Rantau Rasau Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1991 (LN No. 78).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991

Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, Kecamatan Seginim Dan Sukaraja Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Dan Kecamatan Putri Hijau Dan Padang Jaya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1991 (LN No. 79).

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1991

tentang Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1991 (LN No. 80).

tbl: PP No. 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991

Tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1991 (LN No. 81).

tbps: UU No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991

Tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1991 (LN No. 82).

tbps: UU No. 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1991

Keppres Nomor 25 Tahun 1991

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 2 Juli 1991.

i: Keppres No. 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

i: Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

i: Keppres No. 113 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

u: Keppres No. 114 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

i: Keppres No. 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

i: Keppres No. 116 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah.

tbl: Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

tbl: Keppres No. 121 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 183 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 37 Tahun 1999.

Keppres Nomor 28 Tahun 1991

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi. Disahkan pada tanggal 5 Juli 1991 (LN No. 53).

u: Keppres No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 28 Tahun 1991.

u: Keppres No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 40 Tahun 1993.

tbl: PP No. 92 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Keppres Nomor 29 Tahun 1991

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan. Disahkan pada tanggal 2 Juli 1991.

t: Keppres No. 41 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran

Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 29 Tahun 1991.

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 1991

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991

Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya. Disahkan Pada Tanggal 27 Nopember 1991.

Pasal 8, 9, 10 ayat (2)

u: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

i: KMNA/KBPN No. 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991

Tentang Konsolidasi Tanah. Disahkan Pada Tanggal 7 Desember 1991.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 1991

Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 1991

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kota Administrasi Dumai. Disahkan pada tanggal 11 Pebruari 1991.

Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 1991

Tentang Perubahan Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya. Disahkan pada tanggal 1 Maret 1991.

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991

Tentang Inventarisasi dan Penghapusan Blagko Sertipikat Lama. Disahkan pada tangal 1 April 1991.

Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 1991

Tentang Pementukan Organisasi Pelaksanaan Penelitian Khusus Pada Kantor Wilayah BPN. Disahkan pada tanggal 4 Desember 1991.

Keputusan Kepala BPN No. 69 – 11 – 1991

Tentang Tim Koordinasi Penanganan Perkara di Pengadilan. Disahkan pada tanggal 5 Desember 1991.

KEPUTUSAN BERSAMA TAHUN 1991

Keputusan Bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak Nomor SPK. 9/1/1991, KEP-27/PJ.6/1991

Tentang Peningkatan Kegiatan Administrasi Pertanahan dan Perpajakan. Disahkan pada tanggal 26 Januari 1991

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1992

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992

Tentang Pembentukan 27 (Duapuluh Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta Dan Cianjur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 11 Januari 1992 (LN No.8).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992

Tentang Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, Dan Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Disahkan pada tanggal 4 April 1992 (LN No. 34).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992

Tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Disahkan pada tanggal 25 April 1992 (LN No. 38).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1992

Tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan Probolinggo, Malang, Bojonegoro, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 12 Mei 1992 (LN No.48).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992

Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Wilayah Propinsi

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1992 (LN No. 55).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992

Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka Dan Sumba Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1992 (LN No. 55).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992

Tentang Penundaan Berlakunya Pasal 5 Ayat (1) PP 18-1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut UU Pokok Agraria. Disahkan pada tanggal 30 Juni 1992 (LN No. 63 & TLN No. 3483).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992

Tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 13 Juli 1992 (LN No. 65).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992

Tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung Dan Sarolangun Bangko Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi. Disahkan pada tanggal 23 Juli 1992 (LN No. 72).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992

Tentang Pembentukan 27 (Duapuluh Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung,Tangerang, Cianjur, Serang Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dalam Wilayah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1992 (LN No. 76).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992

Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Daerah Tingkat II. Disahkan pada tanggal 19 Agustus 1992 (LN No. 77 & TLN No. 3847).

i: PP No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua puluh enam) Daerah Tingkat II percontohan.

i: PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1992

Tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Alor, Manggarai, Dan Sumba Timur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1992 (LN No. 78).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992

Tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Disahkan pada tanggal 12 September 1992 (LN No. 89).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992

Tentang Perubahan PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagai mana Telah Diubah Terakhir Dengan PP No. 15 Tahun 1985. Disahkan pada tanggal 17 September 1992 (LN No. 90).

t: PP No. 58 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 15 Tahun 1985 ke dalam PP No. 51 Tahun 1992.

i: Keppres No. 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mut Barang, dan Pranata Komputer.

t: PP No. 26 Tahun 1993 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 51 Tahun 1992 ke dalam PP No. 15 Tahun 1993.

t: PP No. 37 Tahun 1993 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992

Tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pemekasan, Situbondo Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 19 September 1992 (LN No. 102).

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1992 (LN No. 114 & TLN No. 3500).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992

Tentang Perubahan PP No. 32 Th. 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 ttg Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1992 (LN No. 130 & TLN No. 3510).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1992

Keppres Nomor 33 Tahun 1992

Tentang Tata cara Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 6 Juli 1992.

c: Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal.

Keppres Nomor 34 Tahun 1992

Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam Ranka Penanaman Modal Asing. Disahkan pada tanggal 6 Juli 1992.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

i: Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal.

i: Keppres No. 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal.

i: Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal.

Keppres Nomor 47 Tahun 1992

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup. Disahkan pada tanggal 24 Agustus 1992.

Keppres Nomor 54 Tahun 1992

Tentang Penetapan Pulau Sumbawa Sebagai daerah transmigrasi. Disahkan pada tanggal 17 September 1992.

Keppres Nomor 55 Tahun 1992

Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 15 tahun 1985 ke dalam PP No. 51 Tahun 1992. Disahkan pada tanggal 17 September 1992.

Keppres Nomor 64 Tahun 1992

Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabata Pustakawan. Disahkan pada tanggal 14 Nopember 1992.

u: Keppres No. 147 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keppres No. 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabata Pustakawan.

Keppres Nomor 65 Tahun 1992

Tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang dan Pranata Komputer.disahkan pad tangal 17 Nopeber 1992.

tbl: Keppres No. 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.

tbl: Keppres No. 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, Dan Penera

tbl: Keppres No. 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.

tbl: Keppres No. 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

tbl: Perpres No. 63 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1992 (PMDN)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992

Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun. Disahkan Pada tanggal 17 Maret 1992.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1992

Tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Penguasahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan yang Berlokasi Di Dalam Kawwasan Industri. Disahkan pada tanggal 6 Juli 1992.

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 1992

Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 1992

Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform. Disahkan Pada Tanggal 20 Pebruari 1992.

Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992

Tentang Biaya Pendaftaran Tanah. Disahkan Pada Tanggal 4 Mei 1992.

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1992

Tentang Tata Cara Bagi Perusahaan untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah serta Penelitian Sertipikatnya. Disahkan pada tanggal 6 Juli 1992.

Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992

Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Tk. I Timor Timur dan Penerbitan Sertipikatnya. Disahkan pada tanggal 30 September 1992.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 1992

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 1992

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 1992.

Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992

Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee/Guntai. Disahkan Pada Tanggal 20 Pebruari 1992.

Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 1992

Tentang Penyediaan Dan Pemberiaan Hak Guna Bangunan Induk Parsial Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri Dan Pemecahannya Untuk Perusahaan Industri. Disahkan Pada Tanggal 28 Maret 1992.

tbl: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997 Tentang Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri.

Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992

Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah. Disahkan Pada Tanggal 17 Juli 1992

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 1992

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1992.

Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 1992

Tentang Lagu Mars dan Hymne BPN. Disahkan pada tanggal 21 Agustus 1992.

Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 1992

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Study Diploma IV Pertanahan di Akademi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Disahkan pada tanggal 24 September 1992.

Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 1992

Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri RI Di Lingkungan BPN. Disahkan pada tanggal 24 September 1992.

Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 1992

Tentang Pelaksanan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten-kabupaten Propinsi dati I Timor Timur yang Belum Dibentuk Kantor Pertanahannya. Disahkan pada tanggal 7 Nopember 1992.

Keputusan Kepala BPN No. 102 – 11 – 1992

Tentang Pembentukan Tim Perundang-undangan BPN. Disahkan pada tanggal 15 Juli 1992.

Keputusan Kepala BPN No. 114 – III – 1992

Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi, Pemeriksa, Unit dan Subbagian di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

c: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KEPUTUSAN BERSAMA TAHUN 1992

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 648 – 384 Tahun 1992, No. 739/KPTS/1992, No. 16 – 11 – 1992

Tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian Yang Berimbang. Disahkan pada tanggal 16 Nopember 1992

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1993

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993

Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu. Disahkan pada tanggal 27 Pebruari 1993.

tbps: UU No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993

Tentang Perubahan PP No. 7 Tahun 1977 ttg Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dg PP No. 51 Tahun 1992. Disahkan pada tanggal 8 Maret 1993.

t: Keppres No. 26 Tahun 1993 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 51 Tahun 1992 ke dalam PP No. 15 Tahun 1993.

i: Keppres No. 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keppres No. 51 Tahun 1992.

t: PP No. 37 Tahun 1993 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya.

u: PP No. 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1977 ttg Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dng PP No. 15 Tahun 1993.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993

Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya. Disahkan pada tanggal 10 Juni 1993 (LN No. 54)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993

Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Dalam Kawasan-kawasan Tertentu di Prop. Riau. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1993 (LN No. 57 & TLN No. 3526).

t: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau.

tbl: PP No. 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993

Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Disahkan pada tanggal 14 Juli 1993 (LN No. 63 & TLN No. 3529).

c: PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1993 LN No. 84 & TLN No. 3538).

i: Keppres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri.

c: PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1993

Keppres Nomor 14 Tahun 1993

Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 15 Pebruari 1993.

u: Keppres No. 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keppres No. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Keppres Nomor 25 Tahun 1993

Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 27 Pebruari 1993.

i: Keppres No. 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Keppres Nomor 26 Tahun 1993

Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 51 Tahun 1992 ke dalam PP No. 15 Tahun 1993.

Keppres Nomor 32 Tahun 1993

Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau.

u: Keppres No. 49 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau.

u: Keppres 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 49 Tahun 1993.

u: Keppres 66 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah dterakhir engan Keppres 27 Tahun 1996.

Keppres Nomor 40 Tahun 1993

Tentang Perubahan Keppres Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 28 Tahun 1991. Disahkan pada tanggal 18 Mei 1993 (LN No. 44).

u: Keppres No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali Diubah, terakhir dengan Keppres No. 40 Tahun 1993

tbl: PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Keppres Nomor 41 Tahun 1993

Tentang tentang Perubahan atas Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 29 Tahun 1991. Disahkan pada tanggal 18 Mei 1993 (LN No. 45).

u: Keppres No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah.

Keppres Nomor 44 Tahun 1993

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1993.

c: Keppres No. 60 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Funfsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

Keppres Nomor 49 Tahun 1993

Tentang tentang Perubahan Atas Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau. **Disahkan pada tanggal 2 Juni 1993.**

u: Keppres No. 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1993.

Keppres Nomor 55 Tahun 1993

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 18 Juli 1993.

t: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

c: Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keppres Nomor 62 Tahun 1993

Tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keppres No. 51 Tahun 1992.

u: Keppres No. 69 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural

sebagaimana telah delapan kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 62 Tahun 1993.

u: Keppres No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 69 Tahun 1993.

u: Keppres No. 30 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Keppres No. 1 Tahun 1994.

u: Keppres No. 35 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 1994.

u: Keppres No. 38 Tahun 1995 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 1994.

u: Keppres No. 17 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 38 Tahun 1995.

u: Keppres No. 38 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996.

u: Keppres No. 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

u: Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 58 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keppres Nomor 68 Tahun 1993

Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana diubah dengan Keppres No. 8 Tahun 1989. Disahkan pada tanggal 31 Juli 1993.

c: Keppres No. 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.

Keppres Nomor 69 Tahun 1993

Tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah delapan kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No. 62 Tahun 1993.

u: Keppres No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 69 Tahun 1993.

u: Keppres No. 30 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Keppres No. 1 Tahun 1994.

u: Keppres No. 35 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 1994.

u: Keppres No. 38 Tahun 1995 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 1994.

u: Keppres No. 17 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 38 Tahun 1995.

u: Keppres No. 38 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996.

u: Keppres No. 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

u: Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 58 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keppres Nomor 75 Tahun 1993

Tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1993.

tbl: Keppres No. 62 Tahun 2000 Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

Keppres Nomor 97 Tahun 1993

Tentang Tata Cara Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 4 Nopember 1993.

u: Keppres No. 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

u: Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

c: Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Keppres Nomor 98 Tahun 1993

Tentang Perubahan Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Disahkan pada tanggal 4 Nopember 1993.

Keppres Nomor 120 Tahun 1993

Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Disahkan pada tanggal 24 Desember 1993.

u: Keppres No. 27 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

u: Keppres No. 54 Tahun 1995 tentang Perubahan Keppres Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 27 Tahun 1994.

tbl: Keppres No. 13 Tahun 2000 tentang Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1993 (PMNA/KBPN)

PMNA/KPBN No. 1 Tahun 1993

Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau. Disahkan Pada Tanggal 8 September 1993.

tbl: PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

PMNA/KPBN No. 2 Tahun 1993

Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Disahkan Pada Tanggal 23 Oktober 1993.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997 Tentang Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri.

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1993 (KMNA/KBPN)

KMNA/KPBN No. 2 Tahun 1993

Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan tanah "A" Pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten di Kecamatan Dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya. Disahkan pada tanggal 1 Maret 1993.

KMNA/KPBN No. 9-VIII-1993

Tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah Di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-pulau Lain Disekitarnya. Disahkan pada tanggal 13 Juni 1993.

Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No. 6 Tahun 1993

tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan serta Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya;

i: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 Tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Pelaporan Izin Lokasi, Konsolidasi Tanah Dan Redistribusi Tanah.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah BPN Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan.

KMNA/KPBN No. 10 Tahun 1993

Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah. Disahkan Pada Tanggal 17 Juni 1993.

KMNA/KPBN No. 15 Tahun 1993

Tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/ Daftar Rencana Kerja serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-pekerjaan Lain Dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan. Disahkan pada tanggal 11 September 1993.

KMNA/KPBN No. 19 Tahun 1993

tentang Pedoman Pengurusan Surat dan Pengelolaan Arsip

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KMNA/KPBN No. 20 Tahun 1993

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

i: Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 Tentang Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 22 Tahun 1993

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 4 Desember 1993.

i: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 Tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Pelaporan Izin Lokasi, Konsolidasi Tanah Dan Redistribusi Tanah.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1994

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1994

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 2 Pebruari 1994 (LN No. 1).

i: PP No. 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap.

i: Keppres No. 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pustakawan.

i: PP No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada Bekas Propinsi Timor Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994

Tentang Penetapan Besarnya Presentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 18 Maret 1994 (LN No. 17 & TLN No. 3542).

tbl: PP No. 48 Tahun 1997 tentang Penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994

Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 18 April 1994 (LN No. 20 & TLN No. 3545).

i: PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

i: PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

i: Keppres No. 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

tbl: PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994

Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Disahkan pada tanggal 18 April 1994 (LN No. 21 & TLN No. 3546).

t: Keppres No. 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional.

i: PP No. 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap.

i: Keppres No. 51 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional.

i: Keppres No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

u: PP No. 49 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

u: PP No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Sebagaimana telah Diubah Dengan PP No. 49 Tahun 1998.

tbl: PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

tbl: PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 18 April 1994 (LN No. 22 & TLN No. 3547).

i: Keppres No. 34 Tahun 1995 tentang Tunjangan Arsiparis.

i: PP No. 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap.

i: Keppres No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

t: Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

i: Keppres No. 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan.

i: Keppres No. 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.

i: Keppres No. 60 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian.

u: PP No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994

Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Disahkan pada tanggal 21 April 1994 (LN No. 25 & TLN No. 3550).

i: PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994

Tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1994 (LN No. 47 & TLN No. 3558).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994

Tentang Rumah Negara. Disahkan pada tanggal 9 Desember 1994 (LN No. 69 & TLN No. 3573).

u: PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara.

t: PP No. 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

i: Perpres No. 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994

tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik. Disahkan Pada tanggal 26 Desember 1994 (LN No. 73 & TLN No. 3576).

i: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994

Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Disahkan pada tanggal 27 Desember 1994 (LN No. 77 & TLN No. 3580)

u: PP No. 27 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

i: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

t: Kepmenkeu No. 392/Kmk.04/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/Kmk.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

t: Kepmenkeu No. 393/Kmk.04/1996 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah.

u: PP No. 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

u: PP No. 71 Tahun 2008 Tentang perubahan Ketiga Atas PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1994

Keppres Nomor 25 Tahun 1994

Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan. Disahkan pada tanggal 18 April 1994.

Keppres Nomor 27 Tahun 1994

Tentang Perubahan Keppres No. 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Disahkan pada tanggal 28 April 1994.

u: Keppres No. 54 Tahun 1995 tentang Perubahan Keppres No. 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 27 Tahun 1994.

tbl: Keppres No. 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

Keppres Nomor 29 Tahun 1994

Tentang Perubahan Keppres No. 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat sebagaimana telah dubah dengan Keppres No. 9 Tahun 1988. Disahkan pada tanggal 30 April 1994.

Keppres Nomor 30 Tahun 1994

Tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Keppres No. 1 Tahun 1994. Disahkan pada tangal 9 Mei 1994.

u: Keppres No. 35 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 1994.

u: Keppres No. 38 Tahun 1995 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 1994.

u: Keppres No. 17 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 38 Tahun 1995.

u: Keppres No. 38 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996.

u: Keppres No. 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

u: Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 58 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keppres Nomor 35 Tahun 1994

Tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 1994. Disahkan pada tangal 27 Mei 1994.

u: Keppres No. 38 Tahun 1995 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 1994.

u: Keppres No. 17 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 38 Tahun 1995.

u: Keppres No. 38 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996.

u: Keppres No. 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

u: Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 58 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keppres Nomor 37 Tahun 1994

Tentang Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional. Disahkan pada tanggal 30 Mei 1994.

i: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

tbl: Keppres No. 63 Tahun 2000 Tentang Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional.

Keppres Nomor 44 Tahun 1994

Tentang Badan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan. Disahkan pada tanggal 23 Juni 1994.

c: Keppres No. 63 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keppres No. 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Pelaksana Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan.

Keppres Nomor 46 Tahun 1994

Tentang Perubahan atas Keppres Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 4 Juli 1994.

Keppres Nomor 47 Tahun 1994

Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional. Disahkan pada tanggal 6 Juli 1994.

u: Keppres No. 51 ahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional.

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1994 (PMNA/KBPN)

PMNA/KPBN No. 1 Tahun 1994

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan Pada Tanggal 14 Juni 1994.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1994 (KMNA/KBPN)

KMNA/KPBN No. 5 Tahun 1994

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Agraria.

i: KMNA/KBPN No. 13 Tahun 1997 Tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena UU No. 1 Tahun 1958.

i: PMNA/KBPN No.1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

KMNA/KPBN No. 9 Tahun 1994

Tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pertanahan Nasional.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KMNA/KPBN No. 10 Tahun 1994

Tentang Penetapan Besarnya Uang Pengganti Biaya Cetak Blangko Sertipikat Dan Tata Cara Pengelolaannya. Disahkan pada tanggal 9 April 1994.

t: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

Keputusan Bersama Nenteri Negara Agraria/Kepala BPN dan Menteri Kehutanan Nomor $\frac{390 / KPTS - VII}{13}$ **tahun 1994.**

Tentang Panitia Kerja Tetap Penanganan Masalah Kehutanan Yang Berkaitan Dengan Masalah Pertanahan. Disahkan pada tangal 6 September 1994.

Keputusan Bersama Nenteri Negara Agraria/Kepala BPN dan Menteri Penerangan Nomor $\frac{180 / KEP / MENPEN / 1994}{14}$ **tahun 1994.**

Tentang Kerjasama Penyuluhan di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 26 September 1994.

KMNA/KPBN No. 21 Tahun 1994

tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 7 Desember 1994.

i: PMNA/KBPN No.2 Tahun 1997 Tentang Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri.

KMNA/KPBN No. 72-III-1994

Tentang Pembentukan Tim Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat. Disahkan pada tanggal 9 September 1994.

INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1994 (IMNA/KBPN)

IMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1994

Tentang Inventarisasi Penguasaan Tanah Oleh Badan Hukum/Perorangan. Disahkan Pada Tanggal 19 Januari 1994.

IMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1994

Tentang Larangan Penerimaan Kuasa Untuk Pengurusan Permohonan di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 18 Maret 1994.

IMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1994

Tentang Kewajiban Pembayaran PPh dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 6 Juni 1994.

IMNA/KBPN Nomor 6 Tahun 1994

Tentang Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 27 Agustus 1994.

IMNA/KBPN Nomor 8 Tahun 1994

Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR. Disahkan pada tanggal 28 Nopember 1994.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1995

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1995 (LN No. 7 & TLN No. 3583).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi. Disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1995 (LN No. 8 & TLN No. 3584).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995

Tentang Izin Usaha Industri. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1995 (LN No. 25 & TLN No. 3596).

i: Keppres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Tangerang Dari Wilayah Kotamadya Dati II Tangerang Ke Kecamatan Tigaraksa Di Wilayah Kabupaten Dati II Tangerang. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1995 (LN No. 27 & TLN No. 3597).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1995

Tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Dalam Wilayah Propinsi Dati I NTB. Disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995 (LN No. 42).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1995

Tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan Di wilayah Kabupaten Dati II Gunung Kidul Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995 (LN No. 43).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995

Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Dan Kota Baru Dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Selatan. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1995 (LN No. 49).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1995

Tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Karawang Dan Bandung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1995 (LN No. 50).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995

Tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dan Kampar Dalam Wilayah Propinsi Dati I Riau. Disahkan pada tanggal 4 September 1995 (LN No. 56).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995

Tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Ponorogo, Banyuwangi Dan Jember Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 6 Nopember 1995 (LN No. 62).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1995

Tentang Pembentukan 11 (Sebelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 22 Nopember 1995 (LN No. 69).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1995

Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Sangihe Dan Talaud, Gorontalo, Minahasa, Dan Di Wilayah Kotamadya Dati II Bitung Dalam wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 6 Desember 1995 (LN No. 71)

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1995

Keppres Nomor 25 Tahun 1995

Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Khusus Ibukota Jakarta.disahkan pada tanggal 2 Mei 1995.

Keppres Nomor 31 Tahun 1995

Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1995.

c: Keppres No. 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.

Keppres Nomor 34 Tahun 1995

Tentang Tunjangan Arsiparis. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1995.

c: Keppres No. 2 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis**.**

Keppres Nomor 38 Tahun 1995

Tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 1994. Disahkan pada tanggal 15 Juni 1995.

u: Keppres No. 17 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 38 Tahun 1995.

u: Keppres No. 38 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996.

u: Keppres No. 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

u: Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 58 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keppres Nomor 52 Tahun 1995

Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Disahkan pada tanggal 13 Juli 1995.

Mengenai Tata Ruang

tbl: Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Keppres Nomor 54 Tahun 1995

Tentang Perubahan Keppres No. 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 27 Tahun 1994. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1995.

u: Keppres No. 75 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 54 Tahun 1995.

tbl: Keppres No. 13 Tahun 2000 tentang Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

Keppres Nomor 57 Tahun 1995

Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1995.

Keppres Nomor 68 Tahun 1995

Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Disahkan pada tanggal 27 September 1995.

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995

Tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang. Disahkan padda tanggal 16 Oktober 1995.

Mengenai Tata Ruang

tbl: Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Keppres Nomor 82 Tahun 1995

Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1995.

u: Keppres No. 74 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah.

u: Keppres No. 133 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 74 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1995

Inpres Nomor 1 Tahun 1995

Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1995 (PMNA/KBPN)

PMNA/KPBN No. 1 Tahun 1995

Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Sistematik Di Daerah Uji Coba. Disahkan Pada Tanggal 3 Pebruari 1995.

t: PMNA/KBPN No.3 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik.

i: PMNA/KBPN No.3 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik.

PMNA/KPBN No. 2 Tahun 1995

Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya. Disahkan Pada Tanggal 26 Mei 1995.

i: KMNA/KBPN No. 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.

PMNA/KPBN No. 3 Tahun 1995

Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik. Disahkan Pada Tanggal 23 Oktober 1995.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1995 (KMNA/KBPN)

KMNA/KPBN No. 1 Tahun 1995

tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional

t: Peraturan Kepala BPN No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KMNA/KPBN No. 2 Tahun 1995

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan Negara Dalam Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 11 Januari 1995.

KMNA/KPBN No. 3 Tahun 1995

Tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta. Disahkan pada tanggal 24 Maret 1995.

KMNA/KPBN No. 4 Tahun 1995

Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria. Disahkan Pada Tanggal 24 Maret 1995.

KMNA/KPBN No. 4A Tahun 1995

Tentang Ralat KMNA/KBPN No. 10 Tahun 1994 tentang Penetapan Besarnya Uang Pengganti Biaya Cetak Blangko Sertipikat dan Tata Cara Pengelolaannya. Disahkan padatanggal 31 Maret 1995.

KMNA/KPBN No. 5 Tahun 1995

Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan. Disahkan pada tanggal 12 September 1995.

KMNA/KPBN No. 6 Tahun 1995

Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 20 September 1995.

KMNA/KPBN No. 7 Tahun 1995

Tentang Hari Kerja di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1005.

INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1995 (IMNA/KBPN)

IMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1995

Tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Tugas Sehari-hari Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Disahkan pada tanggal 25 Maret 1995.

IMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1995

Tentang Inventarisasi Atas Tanah Terlantar, Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee Baru. Disahkan pada tanggal 16 Agustus 1995.

IMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1995

Tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti Agraria. Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1995.

IMNA/KBPN Nomor 4 Tahun 1995

Tentang Petunjuk Operasional Proyek Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya Nasional Matra Laut (Marine Resource Evaluation and Planning) di Lingkungan Direktorat Penatagunaan Tanah Pusat Tahun Anggaran 1995/1996. Disahkan pada tanggal 3 Nopember 1995.

IMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1995

Tentang Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional Di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 28 Desember 1995.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1996

Tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias Dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara. Disahkan padatanggal 3 Januari 1996 (LN No.1).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Disahkan pada tanggal 16 April 1996 (LN No. 44 & TLN No. 3634).

i: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996

tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Disahkan pada tanggal 18 April 1996 (LN No. 45 & TLN No. 3636).

u: PP No. 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No. 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1996

Tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Flores Timur Dan Manggarai Dalam Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 24 April 1996 (LN No. 47).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1996

Tentang Pembentukan Kota Administrasi Sorong. Disahkan pada tanggal 3 Mei 1996 (LN No. 48).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996

Tentang Pembentukan 13 (tiga belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam wilayah Prop. Dati I Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 11 Juni 1996 (LN No. 56).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996

Tentang Pembentukan 16 (enam belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Dati II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang, dan Kapuas Hulu dalam wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1996 (LN No. 57).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Disahkan Pada tanggal 17 Juni 1996 (LN No. 58 & TLN No. 3643).

i: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997 Tentang Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS).

i: PMNA/KBPN No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan KMNA/KBPN No.9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS).

i: PMNA/KBPN No. 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai.

i: KMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998 Tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rss/Rs Menurut KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997. Disahkan pada 22 Januari 1998.

i: KMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Disahkan pada 29 Januari 1998.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan. Disahkan pada 22 Juni 1998.

i: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan pada 22 Juni 1998.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik. Disahkan pada 31 Juli 1998.

i: PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998 Tentang Perubahan PMNA/KBPN No.4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan pada 21 Agustus 1998.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

t: PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

i: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada 16 Mei 2006.

i: Keputusan Kepala BPN No. 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. Disahkan pada 25 September 2006.

i: PP No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN.

i: Keputusan Kepala BPN No. 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional. Disahkan pada 3 Januari 2007.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada 21 Mei 2007.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: PP No. 11 Tahun 2010 Tentang penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996

tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1996 (LN No. 60 & TLN No. 3644).

t: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

t: PMNA/KBPN No. 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan PMNA/KBPN No.7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

i: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: Keputusan Kepala BPN No. 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1996

Tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah dalam Wil. Prop. Dati I Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 24 Juni 1996 (LN No. 62).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1996

Tentang Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Wil. Kab. Dati II Donggala, Poso dan Banggai dalam Wilayah Prop. Dati I Sulawesi Tengah. Disahkan pada tanggal 24 Juni 1996 (LN No. 63).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996

Tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kec. di Wilayah Kab. Dati II Ogan, Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas dalam Wilayah Prop.Dati I Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 4 Juli 1996 (LN No. 64).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1996

Tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wil. Kab. Dati II Sorolangun Bangko, Kerinci dan Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Dati I Jambi. Disahkan pada tanggal 12 Juli 1996 (LN No. 68).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996

Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kab. Dati II Semarang dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah. Disahkan pada tanggal 12 Juli 1996 (LN No.69).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996

Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kab. Paniai, Perubahan Nama & Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Paniai di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1996 (LN No. 76).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996

Tentang Pembentukan Kabupaten Simuelue di Wil. Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1996 (LN No. 77 & TLN No. 3649).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996

Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1996 (LN No. 78 & TLN No. 3650).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996

Tentang Pembentukan Lima Puluh Tiga Kec.di Wil. Kab. Dati II Jaya Wijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-Fak, Biak, Numfor, Kotamadya Dati II Jayapura, Kab. Puncak Jaya & Kab. Paniai dlm Wil. Prop. Dati I Irian Jaya. Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1996 (LN No. 97).

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996

Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Disahkan pada tanggal 3 Desember 1996 (LN No. 104 & TLN No. 3660).

i: PP No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

i: PP No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

c: PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

tbl: PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996

Tentang Kepelabuhanan. Disahkan pada tanggal 4 Desember 1996 (LN No. 107 & TLN No. 3661).

tbl: PP No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996

Tentang Kebandarudaraan. Disahkan pada tanggal 4 Desember 1996 (LN No. 108 & TLN No. 3662).

tbl: PP No. 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1996

Keppres Nomor 5 Tahun 1996

Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pegawai Negeri Sipil. Disaahkan pada tanggal 31 Januari 1996.

Keppres Nomor 17 Tahun 1996

Tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 38 Tahun 1995. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 1996 (LN No. 27).

u: Keppres No. 38 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996.

u: Keppres No. 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

u: Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 58 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keppres Nomor 27 Tahun 1996

Tentang Perubahan Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1993. Disahkan pada tanggal 18 April 1996.

u: Keppres No. 66 Tahun 1998 tentang Perubahan Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Provinsi Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 27 Tahun 1996.

Keppres Nomor 34 Tahun 1996

Tentang Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Dan Bertempat Tinggal Di Wilayah Terpencil. Disahkan pada tanggal 8 Mei 1996.

Keppres Nomor 38 Tahun 1996

Tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996. Disahkan pada tanggal 24 Mei 1996 (LN No. 27).

u: Keppres No. 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

u: Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 58 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keppres Nomor 41 Tahun 1996

Tentang Kawasan Industri. Disahkan pada tanggal 4 Juni 1996.

Keppres Nomor 56 Tahun 1996

Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 9 Juli 1996.

Keppres Nomor 75 Tahun 1996

Tentang Ketentuan Pokok Perjasnjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Disahkan pada tanggal 25 September 1996.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TAHUN 1996

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/Kmk.04/1996

Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/Kmk.04/1994 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan

Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Disahkan Pada Tanggal 5 Juni 1996.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393/Kmk.04/1996

Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah. Disahkan Pada Tanggal 5 Juni 1996.

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1996 (PMNA/KBPN)

PMNA/KPBN No. 1 Tahun 1996

Tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 30 Mei 1996.

i: KMNA/KBPN No. 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

tbl: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

PMNA/KPBN No. 2 Tahun 1996

Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. Disahkan Pada Tanggal 10 April 1996.

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

PMNA/KPBN No. 3 Tahun 1996

Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan. Disahkan Pada Tanggal 18 April 1996.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.

tbl: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

PMNA/KPBN No. 4 Tahun 1996

Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu. Disahkan Pada Tanggal 8 Mei 1996.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

PMNA/KPBN No. 5 Tahun 1996

Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan. Disahkan Pada Tanggal 30 Mei 1996.

tbl: PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

PMNA/KPBN No. 6 Tahun 1996

Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah. Disahkan pada tanggal 23 September 1996.

PMNA/KPBN No. 7 Tahun 1996

Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Disahkan Pada Tanggal 7 Oktober 1996.

u: PMNA/KBPN No. 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

PMNA/KPBN No. 8 Tahun 1996

Tentang Perubahan PMNA/KBPN No.7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Disahkan Pada Tanggal 15 Oktober 1996.

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1996 (KMNA/KBPN)

KMNA/KPBN No. 3 Tahun 1996

Tentang Kelompok Kerja Tetap Penanganan Masalah Agraria. Disahkan pada tanggal 29 Pebruari 1996.

KMNA/KPBN No. 6 Tahun 1996

Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 27 Maret 1996.

KMNA/KPBN No. 9 Tahun 1996

Tentang Perubahan Yang Pertama Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 18 April 1996.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997

Tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1977 ttg Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dng PP No. 15 Tahun 1993. Disakan pada tanggal 26 Maret 1997 (LN No. 19).

u: PP No. 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 6 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997

Tentang Pajak Daerah. Disahkan pada tanggal 4 Juli 1997 (LN No. 54 & TLN No. 3691).

u: PP No. 64 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

c: PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997

Tentang Retribusi Daerah. Disahkan pada tanggal 4 Juli 1997 (LN No. 55 & TLN No. 3692).

u: PP No. 45 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas PP No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

c: PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997

Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disahkan pada tanggal 7 Juli 1997 (LN No. 57 & LN No. 3694).

i: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

u: PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

tbl: PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Lamp. II A (5) No. 1, 2 & 6

tbl: PP No. 17 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

i: PP No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Lamp. II A (7)

tbl: PP No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yg Berlaku pada Dep. Kelautan dan Perikanan.

i: PP No. 2 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.

i: PP No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah. Disahkan pada tanggal 8 Juli 1997 (LN No. 58 & TLN No. 3696).

t: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Disahkan pada 1 Oktober 1997.

t: KMNA/KBPN No. 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada 6 Oktober 1997.

i: KMNA/KBPN No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS). Disahkan pada 22 Oktober 1997.

i: KMNA/KBPN No. 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai. Disahkan pada 9 Desember 1997.

i: KMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998 Tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rss/Rs Menurut Keputusan Menteri Negara

Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1997. Disahkan pada 22 Januari 1998.

i: KMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Disahkan pada 29 Januari 1998.

t: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada 16 Pebruari 1998.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi. Disahkan pada 27 Pebruari 1998.

i: KMNA/KBPN No. 58-III-1998 Tentang Pengadaan Tenaga Ajudikasi Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada 3 April 1998.

i: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan pada 22 Juni 1998.

i: KMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal. Disahkan pada 26 Juni 1998.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

i: PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998 Tentang Perubahan PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan pada 21 Agustus 1998.

t: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat. Disahkan pada 28 September 1998.

i: KMNA/KBPN No. 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PMNA/KBPN No.2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi. Disahkan pada 29 September 1998.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

i: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya. Disahkan pada 26 Pebruari 1999.

t: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada 30 Maret 1999

i: PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

i: Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang. Disahkan pada 27 Juni 2000.

i: PP No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada 16 Mei 2006.

i: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada 16 Mei 2006.

i: Keputusan Kepala BPN No. 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. Disahkan pada 25 September 2006.

i: Keputusan Kepala BPN No. 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada 21 Mei 2007.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Disahkan pada 11 Juli 2007.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

i: Peraturan Kepala BPN No. Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997

Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap. Disahkan pada tanggal 6 Agustus 1997 (LN No. 65 & TLN No. 3697).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997

Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Disahkan pada tanggal 22 September 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997

Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1997 (LN No. 76 & TLN No. 3705).

c: PP No. 114 Tahun 2000 Tentang Pencabutan PP No. 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997

Tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. **Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1997 (LN No. 77 & TLN No. 3706).**

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997

Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1997 (LN No. 78 & TLN No. 3707).

tbl: PP No. 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997

Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1997 (LN No. 79 & TLN No. 3708).

tbl: PP No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1997 (LN No. 96 & TLN No. 3721).

t: Keppres No. 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur.

i: PP No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

c: PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

tbl: PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997

Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1997 (LN No. 97 & TLN No. 3722)

tbl: PP No. 74 Tahun 1998 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1997

Keppres Nomor 12 Tahun 1997

Tentang Penetapan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan NTT Sebagai Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi. Disahkan pada tanggal 25 Maret 1997.

Keppres Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 40 Tahun 1993. Disahkan pada tanggal 20 Juni 1997.

u: Keppres No. 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 24 Tahun 1997.

u: Keppres No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 53 Tahun 1997.

tbl: PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Keppres Nomor 50 Tahun 1997

Tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 29 Desember 1997.

c: Keppres No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Keppres Nomor 53 Tahun 1997

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 24 Tahun 1997. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1997.

u: Keppres No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 53 Tahun 1997.

tbl: PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1997 (PMNA/KBPN)

PMNA/KPBN No. 1 Tahun 1997

Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah Dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta. Disahkan Pada Tanggal 16 April 1997.

PMNA/KPBN No. 2 Tahun 1997

Tentang Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri. Disahkan Pada Tanggal 25 Agustus 1997.

PMNA/KPBN No. 3 Tahun 1997

Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Disahkan Pada Tanggal 1 Oktober 1997.

i: KMNA/KBPN No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS).

i: KMNA/KBPN No. 6 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai.

i: PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

t: PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat.

i: KMNA/KBPN No.1 Tahun 1998 Tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut KMNA / KBPN No. 9 Tahun 1997.

i: KMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah.

i: KMNA/KBPN No .6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

i: KMNA/KBPN No. 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisens.

i: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

i: Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang.

i: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1997 (KMNA/KBPN)

KMNA/KPBN No. 72-XI-1997

Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik Proyek Administrasi Badan Pertanahan Nasional 1997/1996. Disahkan pada tanggal 27 Mei 1997.

KMNA/KPBN No. 9 Tahun 1997

Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). Disahkan pada tanggal 2 Juli 1997.

KMNA/KPBN No. 11 Tahun 1997

Tentang Penertiban tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform. Disahkan pada tanggal 3 September 1997.

KMNA/KPBN No. 13 Tahun 1997

Tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-tanah yang Terkena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958. Disahkan pada tanggal 29 September 1997.

KMNA/KPBN No. 14 Tahun 1997

Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1997.

Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan Kepala Bulog Nomor 1 Tahun 1997, Nomor Kep-470/KA/II/1997

Tentang Percepatan Pengurusan Hak dan Penerbitan Sertipikat Tanah Badan Urusan Logistik. Disahkan pada tanggal 5 Nopember 1997.

Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan Mendagri Nomor 2 Tahun 1997, Nomor 157 Tahun 1997

Tentang Pengurusan hak dan Penyelesaian Sertipikat Tanah Kas Desa. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1997.

KMNA/KPBN No. 15 Tahun 1997

Tentang Perubahan KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1997.

KMNA/KPBN No. 16 Tahun 1997

Tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Disahkan pada tanggal 9 Desember 1997

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1998

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1998

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1998

Tentang Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Tapanuli Tengah dari Wil. Kotamadya Dati II Sibolga ke Kota Pan Dan di Wil. Kecamatan Sibolga Kab. Dati II Tapanuli Tengah. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998 (LN No. 9 dan TLN No. 3729).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998

Tentang Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Agam dari Wilayah Kotamadya Dati II Bukitinggi ke Kota Lubuk Basung di Wil. Kec. Lubuk Basung Kab. Dati II Agam. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998

tentang Perusahaan Perseroan. Disahkan pada tanggal 17 Januari 1998 (LN No. 15 & TLN No. 3731).

i: PP No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.

i: PP No. 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan.

u: PP No. 45 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan

i: Perpres No. 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

i: Perpres No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998

Tentang Modal, Penyertaan Pada Koperasi. Disahkan pada tanggal 28 Pebruari 1998 (LN No. 47 & TLN No. 3744).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998

tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan pada tanggal 5 Maret 1998 (LN No. 51 & TLN No. 3745)

t: PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.

i: PP No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

i: Keputusan Kepala BPN No. 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

c: PP No. 11 Tahun 2010 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan pada tanggal 5 Maret 1998 (LN No. 52 & TLN No. 3746).

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

t: KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya.

t: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

t: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

t: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

t: Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas PP No. 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah. Disahkan pada tanggal 23 Maret 1998 (LN No. 73 & TLN No. 3755).

c: PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Disahkan pada tanggal 13 April 1998.

u: PP No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Sebagaimana telah Diubah Dengan PP No. 49 Tahun 1998.

tbl: PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disahkan pada tanggal 20 April 1998 (LN No. 85 & TLN No. 3760)

Lamp IIA (5) No. 1, 2 & 6

tbl: PP No. 17 Tahun 2001 tentang tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Lamp IIA (7)

tbl: PP No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Dep. Kelautan dan Perikanan.

i: PP No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998

Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Disahkan pada tanggal 5 Mei 1998 (LN No. 94 & TLN No. 3767).

u: PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

u: PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

i: PP No. 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998

Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna. Disahkan pada tanggal 16 Juni 1998.

tbl: PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1998

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dari Bajawa Kecamatan Ngadabawa ke Mbay Kecamatan Aesesa. Disahkan pada tanggal 27 Juli 1998 (LN No. 116 & TLN No. 3373).

c: PP No. 35 Tahun 2006 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998

Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Disahkan pada tanggal 19 Agustus 1998.

c: PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998

Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Disahkan pada tanggal 30 september 1998 (LN No. 170 & TLN No. 3785).

tbl: PP No. 46 Tahun 2000 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998

Tentang Pembentukan Kota Adminstratif Bima. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1998 (LN No. 178).

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi. Disahkan pada tanggal 28 Desember 1998 (LN No. 192 & TLN No. 3797)

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1998

Keppres Nomor 32 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 53 Tahun 1997. Disahkan pada tanggal 25 Pebruari 1998.

Keppres Nomor 58 Tahun 1998

Tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural. Disahkan pada tanggal 13 April 1998.

u: Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 58 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keppres Nomor 60 Tahun 1998

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. Disahkan pada tanggal 13 April 1998.

u: Keppres No. 77 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 60 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

Keppres Nomor 66 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah dterakhir engan Keppres 27 Tahun 1996. Disahkan pada tanggal 15 April 1998.

Keppres Nomor 67 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 41 Tahun 1993. Disahkan pada tanggal 20 April 1998.

Keppres Nomor 71 Tahun 1998

Tentang Perubahan atas Keppres No. 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 4 Mei 1998.

Keppres Nomor 74 Tahun 1998

Tentang tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 1 Juni 1998.

u: Keppres No. 133 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres No. 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 74 Tahun 1998.

tbl: Keppres No. 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Keppres Nomor 87 Tahun 1998

Tentang Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Disahkan pada tanggal 2 Juli 1998.

c: Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keppres Nomor 96 Tahun 1998

Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 2 Juli 1998.

Keppres Nomor 101 Tahun 1998

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. Disahkan pada tanggal 6 Agustus 1998.

c: Keppres No. 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

Keppres Nomor 113 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1998.

u: Keppres No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 113 Tahun 1998.

u: Keppres No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 120 Tahun 1999.

c: Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Keppres Nomor 114 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 28 Juli 1998.

Keppres Nomor 115 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 17 Agustus 1998.

u: Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

c: Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Keppres Nomor 116 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Disahkan pada tanggal 28 Juli 1998.

u: Keppres No. 122 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998.

Keppres Nomor 133 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 74 Tahun 1998. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1998.

tbl: Keppres No. 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Keppres Nomor 136 Tahun 1998

Tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1998.

u: Keppres No. 82 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keppres No. 136 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

c: Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keppres Nomor 143 Tahun 1998

Tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Disahkan pada tanggal 14 September 1998.

c: Keppres No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara.

Keppres Nomor 183 Tahun 1998

Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1998.

u: Keppres No. 37 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

u: Keppres No. 121 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 37 Tahun 1999.

c: Keppres No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Keppres Nomor 188 Tahun 1998

Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 1998.

c: Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 1998

Inpres Nomor 25 Tahun 1998

Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1998.

Inpres Nomor 27 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Inpres Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1998.

Inpres Nomor 30 Tahun 1998

Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Disahkan pada tanggal 2 Desember 1998.

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1998 (PMNA/KBPN)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1998

Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 16 Februari 1998.

tbl: PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

PMNA/KPBN No. 2 Tahun 1998

Tentang Surveyor Berlisensi. Disahkan Pada Tanggal 27 Pebruari 1998.

t: KMNA/KBPN No.8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PMNA/KBPN No.2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisens.

PMNA/KPBN No. 3 Tahun 1998

Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan. Disahkan Pada Tanggal 22 Juni 1998.

PMNA/KPBN No. 4 Tahun 1998

Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan Pada Tanggal 22 Juni 1998.

t: PMNA/KBPN No.6 Tahun 1998 Tentang Perubahan PMNA/KBPN No.4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

PMNA/KPBN No. 5 Tahun 1998

Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik. Disahkan Pada Tanggal 31 Juli 1998.

PMNA/KPBN No. 6 Tahun 1998

Tentang Perubahan PMNA/KBPN No.4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan Pada Tanggal 21 Agustus 1998.

PMNA/KPBN No. 7 Tahun 1998

Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat. Disahkan Pada Tanggal 28 September 1998.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

c: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1998 (KMNA/KBPN)

KMNA/KPBN No. 1 Tahun 1998

Tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997. Disahkan Pada Tanggal 22 Januari 1998.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

KMNA/KPBN No. 2 Tahun 1998

Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Disahkan Pada Tanggal 29 Januari 1998.

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

i: KMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

KMNA/KPBN No. 3 Tahun 1998

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Kantor Menteri Negara Agraria/BPN. Disahkan pada tanggal 5 Pebruari 1998.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1998

Tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Pelaporan Izin Lokasi, Konsolidasi Tanah Dan Redistribusi Tanah. Disahkan Pada Tanggal 27 Pebruari 1998.

Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Penanganan Pengaduan Masalah Pelayanan Pertanahan. Disahkan pada tanggal 20 Mei 1998.

KMNA/KPBN No. 6 Tahun 1998

Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal. Disahkan Pada Tanggal 26 Juni 1998

i: PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.

KMNA/KPBN No. 7 Tahun 1998

Tentang Pembagian Wilayah Pembinaan Para Pejabat Eselon 1 Kantor Menteri Negara Agraria/BPN. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1998.

KMNA/KPBN No. 8 Tahun 1998

Tentang Ketentuan Pelaksanaan PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisens. Disahkan Pada Tanggal 29 September 1998.

KMNA/KPBN No. 9 Tahun 1998

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung dan Kotamadya Bekasi Propinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1998.

KMNA/KPBN No. 58-III-1998

Tentang Pengadaan Tenaga Ajudikasi Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 3 April 1998.

INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN TAHUN 1998 (IMNA/KBPN)

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1998

Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. Disahkan pada tanggal 27 Pebruari 1998.

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998

Tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 20 Juli 1998.

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1998
Tentang Percepatan PelayananPendaftaran Hak Milik Atas Tanag Untuk Rumah Tinggal. Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1998.

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1998
Tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Sekala Besar. Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1998.

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998
Tentang Pendataan dan Monitoring Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Penanaman Tanaman Pangan. Disahkan pada tanggal 6 Nopember 1998.

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 1998
Tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Tugas Sehari-hari. Disahkan pada tanggal 27 Nopember 1998.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999

Tentang Penyelenggaraan transmigrasi. Disahkan pada tanggal 8 Januari 1999 (LN No. 4 & TLN No. 3800).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik. Disahkan pada tanggal 26 Januari 1999 (LN No. 11 & TLN No. 3801).

u: PP No. 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik.

c: PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999

Tentang Pengusahaan Hutan dan Pungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi. Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999 (LN No. 13 & TLN No. 3802).

c: PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan & Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999

Tentang Perubahan Atas PP No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik. Disahkan pada tanggal 29 Januari 1999.

c: PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999

Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Disahkan pada tanggal 27 Pebruari 1999.

u: PP No. 95 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

u: PP No. 99 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

u: PP No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

u: PP No. 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999

Tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wil. Kab. Dati II Kendari Kolaka & Buton Dalam Wilayah Prop. Dati I Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 25 Maret 1999. (LN No. 36)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999

Tentang Pembentukan 12 (dua belas) Kec. di Wil. Kab.Dati II Bone, Sinjae, Sidenreng,Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba Dlm Wil. Prop. Dati I Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 25 Maret 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999

Tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kab. Dati II Pontianak Dalam Wilayah Prop. Dati II Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 25 Maret 1999 (LN No. 38).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999.

i: PP No. 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

i: PP No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Pembentukan dan Penataan Bebrapa Kec. di Wilayah Kabupaten dati II Maluku Utara dlm Wilayah Prop. Dati I Maluku. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999 (LN No. 87).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999

Tentang Pembentukan 13 (tigabelas) Kecamatan di Kabupaten Dati II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Ratu, dan Langkat Dalam Wilayah Prop. Dati I Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999

Tentang Pembetukan 5 (Lima) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Aceh Timur & Aceh Utara Dlm Wilayah Propinsi D.I. Aceh. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999

Tentang Pembetukan Kecamatan Bantarsari di Wil. Kabupaten Dati II Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999

Tentang Pembetukan 6 (enam) Kec. di Wil. Kabupaten Dati II Lampung Selatan & Lampung Tengah dlm Wilayah Prop. Dati I Lampung . Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam di Wilayah Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Dati I Bengkulu. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1999

Tentang Pembentukan 14 (Empat Belas) Kecamatan di Wilayah Kab. Dati II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis, dan Majalengka dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1999

Tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kec. di Wil. Kab. Dati II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang dan Kediri Dalam Wilayah Prov. Dati I Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999

Tentang Pembentukan 6 (enam) Kec. di Wil. Kab.Dati II Pesisir Selatan, Solok Sawahlunto/Sijinjing dan Pasaman Dalam Wilayah Prov. Dati II Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 26 Mei 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999

Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 48 Tahun 1994 ttg Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan /Atau Bangunan. Disahkan pada tanggal 30 September 1999 (LN No. 170 & TLN No. 3891).

u: PP No. 71 Tahun 2008 Tentang perubahan Ketiga Atas PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999

Tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yg Berdiri Sendiri. Disahkan pada tanggal 30 September 1999 (LN No. 171 & TLN No. 3892).

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999

Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukit Tinggi & Kab. Agam. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999

Tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Prop. Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999

Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Disahkan pada tanggal 22 Nopember 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999

Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Disahkan pada tanggal 28 Desember 1999.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 1999

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Perubahan Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 58 Tahun 1998. Disahkan pada tanggal 14 April 1999.

tbl: Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999

Tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 183 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 17 Mei 1999.

u: Keppres No. 121 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 37 Tahun 1999.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999

Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. Disahkan pada tanggal 18 Mei 1999.

c: UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999

Tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform. Disahkan pada tanggal 27 Mei 1999.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999

Tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. Disahkan pada tanggal 30 Juli 1999.

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Disahkan pada tanggal 30 Juli 1999.

tbl: Perpres No. 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999

Tentang Badan Kepegawaian Negara. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1999.

c: Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999

Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur. Disahkan Pada Tanggal 24 September 1999.

tbl: Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Keppres Nomor 117 Tahun 1999

Tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Disahkan pada tanggal 30 September 1999.

c: Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Keppres Nomor 120 Tahun 1999

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 113 Tahun 1998. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1999.

c: Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Keppres Nomor 121 Tahun 1999

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 37 Tahun 1999. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1999.

c: Keppres No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Keppres Nomor 122 Tahun 1999

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Tahun 1998. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1999.

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 1999.

i: Keppres No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

c: Keppres No. 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 7 Desember 1999.

tbl: Keppres No. 95 Tahun 2000 tentang Badan pertanahan Nasional.

tbl: Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999

Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Disahkan pada tanggal 8 Desember 1999.

c: Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman.

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN TAHUN 1999 (PMNA/KBPN)

PMNA/KPBN No. 1 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Disahkan Pada Tanggal 29 Januari 1999.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999

Tentang Izin Lokasi. Disahkan Pada Tanggal 10 Februari 1999.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasinal Nomor 3 Tahun 1999

Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Disahkan Pada Tanggal 19 Pebruari 1999.

i: PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

i: Keputusan Kepala BPN No. 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No.2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

c: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

PMNA/KPBN No. 4 Tahun 1999

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 30 Maret 1999.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

PMNA/KPBN No. 5 Tahun 1999

Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Disahkan Pada Tanggal 24 Juni 1999.

PMNA/KPBN No. 6 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Disahkan Pada Tanggal 29 September 1999.

PMNA/KPBN No. 9 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Disahkan Pada Tanggal 24 Oktober 1999.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN TAHUN 1999 (KMNA/KBPN)

KMNA/KPBN No. 4 Tahun 1999

Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya. Disahkan Pada Tanggal 26 Pebruari 1999.

KMNA/KPBN No. 8 Tahun 1999

Tentang Stempel Dinas Bernomor Seri Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KMNA/KPBN No. 11 Tahun 1999

Tentang Persetujuan Penghapusan Blangko Sertipikat Tanah Lama Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 26 Juli 1999.

KMNA/KPBN No. 12 Tahun 1999

Tentang Pencabutan KMNA/KPBN No. 13 Tahun 1997 Tentang Peniadan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. Disahkan Pada Tanggal 10 September 1999.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 15 Tahun 1999

Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2000

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000

Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah. Disahkan Pada Tanggal 21 Pebruari 2000.

i: Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura. Disahkan Pada Tanggal 10 Maret 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000

Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Disahkan Pada Tanggal 10 Maret 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000

Tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Disahkan pada tanggal 31 Maret 2000.

u: PP No. 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000

Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disahkan pada tanggal 5 April 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Disahkan Pada Tanggal 6 Mei 2000.

i: PP No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

i: PP No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

i: PP No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

i: PP No. 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

i: Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang.

i: PP No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

i: PP No. 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

i: PP No. 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

i: Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan.

i: PP No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.

i: PP No. 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan.

i: PP No. 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

i: PP No. 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.

i: PP No. 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

i: PP No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

i: PP No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

i: PP No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000

Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan. Disahkan Pada Tanggal 26 Juni 2000 (LN No. 99 & TLN No. 3977).

c: PP No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000

Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. Disahkan Pada Tanggal 17 Juli 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat. Disahkan Pada Tanggal 7 Agustus 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2000.

tbl: PP No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000

Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2000 (LN No. 193 & TLN No. 4014).

tbl: PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000

Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2000 (LN No. 194 & TLN No. 4015.)

u: PP No. 54 Tahun 2003 Perubahan Atas PP No. 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2000.

u: PP No. 11 Tahun 2002 Perubahan Atas PP No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2000. (LN No. 196 & TLN No. 4017).

u: PP No. 12 Tahun 2002 Perubahan Atas PP No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2000 (LN No.197 & TLN No. 4018).

u: PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000

Tentang Dana Perimbangan. Disahkan pada tanggal 10 Nopember 2000 (LN No. 201 & TLN No. 4021).

u: PP No. 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP No. 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan.

i: PP No. 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi.

c: PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000

Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat. Disahkan Pada Tanggal 1 Desember 2000 (LN No. 213 & TLN No. 4030).

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000

Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan. Disahkan Pada Tanggal 1 Desember 2000 (LN No. 214 & TLN No. 4031).

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000

Tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Disahkan Pada Tanggal 1 Desember 2000 (LN No. 215 & TLN No. 4032).

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000

Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Disahkan Pada Tanggal 1 Desember 2000 (LN No. 216).

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000

Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Disahkan Pada Tanggal 13 Desember 2000 (LN No. 233 & TLN No. 4036).

c: PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000

Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000.

tbl: PP No. 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000

Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Disahkan Pada Tanggal 23 Desember 2000.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2000

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Disahkan pada tanggal 21 Pebruari 2000.

c: Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000

Tentang Komisi Ombudsman. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000

Tentang Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional. Disahkan Pada Tanggal 8 Mei 2000.

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas keppres No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Deparrtemen. Disahkan pada tanggal 30 Mei 2000.

tbl: Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000

Tentang Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 19 Juli 2000.

i: Keppres No. 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan.

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000

Tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000.

tbl: Perpres No. 3 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti. Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000.

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No. 30 Tahun 1999.

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 23 Nopember Tahun 2000.

u: Keppres No. 173 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

i: Keppres No. 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan.

u: Keppres No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Keppres No. 16 Tahun 2001.

u: Keppres No. 62 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Keppres No. 42 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. Disahkan pada tanggal 15 Desember 2000.

c: Keppres No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 15 Desember 2000.

u: Keppres No. 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah diubah Dengan Keppres No. 173 Tahun 2000.

c: Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000

Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara. Disahkan pada tanggal 15 Desember 2000.

u: Keppres No. 57 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara.

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000

Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 15 Desember 2000.

u: Keppres No. 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.

u: Keppres No. 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah Dengan Keppres No. 17 Tahun 2001.

u: Keppres No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Dengan Keppres No. 43 Tahun 2001.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 2000

Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2000

Tentang Nama Jabatan, Penggunaan Kop Surat, Stempel Dinas dan Papan Nama di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 24 Januari 2000.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2000

Tentang Pemberian Kewenangan Pengangkatan/ Pemberhentian Atasan Langsung Bendaharawan Rutin/ Khusus Penerima/ Dik-S, Pemimpin Bagian Proyek Pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya di Seluruh Indonesia. Disahkan pada tanggal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah. Disahkan pada tanggal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Boalemo Propinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 5 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tangal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tangal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kuantan Singingi Pro[pinsi Riau. Disahkan pada tangal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dn Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Disahkan pada tangal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Mentawai Propinsi Sumatera Barat Disahkan pada tangal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bireuen Propinsi Daerah Istimewa aceh. Disahkan pada tangal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tangal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2000

Tentang Penutupan Lembaga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan dan Kantor Perwakilan Pertanahan di Wilayah Timor timur. Disahkan pada tangal 24 Pebruari 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang. Disahkan Pada Tanggal 27 Juni 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 14 Tahun 2000

Tentang Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN, dengan Yayasan Pengembangan Tunas Nusantara Nomor SKB 3 Tahun 1999 dan Nomor 035/YPTN/SKB/1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Penguatan Hak-hak Atas Tanah Rakyat dan Pemberdayaannya. Disahkan pada tanggal 25 Agustus 2000.

Keputusan Kepala BPN No. 229-XV-2000

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

I: Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

INSTRUKSI KEPALA BPN TAHUN 2000

Instruksi Kepala BPN No. 1 Tahun 2000

Tentang Penyelenggaraan Manajemen Mutu Pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, secara sistemetik. Disahkan pada tanggal 17 Maret 2000.

Instruksi Kepala BPN No. 2 Tahun 2000

Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2001

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2001

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disahkan pada tanggal 27 April 2001.

i: PP No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

i: PP No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

tbl: PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol. Disahkan Pada Tanggal 21 Mei 2001.

tbl: PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan. Disahkan pada tanggal 5 Juni 2001.

i: PP No. 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan.

i: Perpres No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disahkan Pada Tanggal 3 Juli 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

Tentang Pajak Daerah. Disahkan Pada Tanggal 13 September 2001 (LN No. 118 & TLN No. 4138)

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

Tentang Retribusi Daerah. Disahkan Pada Tanggal 13 September 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001

Tentang Kepelabuhanan. Disahkan Pada Tanggal 17 Oktober 2001.

c: PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001

Tentang Kebandarudaraan. Disahkan Pada Tanggal 17 Oktober 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001

Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Th.1969 Tentang Pelaksanaan UU No.11 Th.1967 Ttg Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Disahkan pada tanggal 30 Nopember 2001 (LN No. 141 & TLN No. 4154)

c: PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001

Tentang Irigasi. Disahkan Pada Tanggal 5 Desember 2001.

tbl: PP No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Disahkan Pada Tanggal 14 Desember 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001

Tentang Perubahan atas PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 2001 (LN No. 157 & TLN No. 4165)

tbl: PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2001

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001

Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan. Disahkan Pada Tanggal 17 Januari 2001.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah diubah Dengan Keppres No. 173 Tahun 2000. Disahkan pada tanggal 23 Januari 2001.

u: Keppres No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Keppres No. 16 Tahun 2001.

u: Keppres No. 62 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Keppres No. 42 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 23 Januari 2001.

u: Keppres No. 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 17 Tahun 2001.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Keppres No. 16 Tahun 2001. Disahkan pada tanggal 27 Maret 2001.

u: Keppres No. 62 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Keppres No. 42 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 17 Tahun 2001. Disahkan pada tanggal 27 Maret 2001.

u: Keppres No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana Telah Beberapa Kali Terakhir dengan Diubah Dengan Keppres No. 43 Tahun 2001.

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Dengan Keppres No. 43 Tahun 2001. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2001.

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Keppres No. 42 Tahun 2001. Disahkan pada tanggal 17 Mei 2001.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 13 September 2001.

u: Keppres No. 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen.

u: Keppres No. 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 3 Tahun 2002.

u: Keppres No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 46 Tahun 2002.

u: Keppres No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 30 Tahun 2003.

Pasal 114 ayat (6)

tbl: Kepres No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

i: Kepres No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

u: Perpres No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen.

u: Perpres No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen.

i: Keppres No. 98/M Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

i: Perpres No. 12 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Ketentuan ttg BPN

tbl: Perpres No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001

Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2001.

u: Keppres No. 32 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 48 Tahun 2002.

u: Keppres No. 62 Tahun 2003 tentang tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 32 Tahun 2003.

u: Keppres No. 11 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 62 Tahun 2003.

u: Perpres No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.

u: Perpres No. 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.

i: Keppres No. 98/M Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Ketentuan ttg BPN

tbl: Perpres No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. Sk. 2 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

i: Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 Tentang Pemberian Penghargaan Bhumi Bhakti Adhiguna Kepada Para Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 2001

Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota sorong Propinsi Irian Jaya. Disahkan pada tanggal 3 Januari 2001.

Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2001

Tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta. Disahkan pada tanggal 13 Pebruari 2001.

u: Keputusan Kepala BPN No. 47 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta

t: Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

t: Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 Tentang Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2001

Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin. Disahkan pada tanggal 29 Maret 2001.

Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2001

Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 29 Maret 2001.

Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 2001

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 15 Juni 2001.

i: Keputusan Kepala BPN No. 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.

i: Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Pemberian Penghargaan Berupa Sertipikat/Piagam Dan Plakat Kepada Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota.

i: Keputusan Kepala BPN No. Sk. 2 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

i: Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 Tentang Pemberian Penghargaan Bhumi Bhakti Adhiguna Kepada Para Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota.

i: Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2006 Tentang Persetujuan Penghapusan Tanah Dan Bangunan Untuk Pelebaran Jalan Di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara.

Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten. Disahkan pada tanggal 19 Juni 2001.

Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bangka Belitung. Disahkan pada tanggal 19 Juni 2001.

Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2001

Tentang Pendelegasian Wewenang Kepala BPN Kepada kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kepada Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 6 Juli 2001.

Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2001

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Inpassing/Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2001.

Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2001

Tentang Penyesuaian dari Jabatan Fungsional Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ke Jabatan Fungsional Auditor. Disahkan pada tanggl 24 Juli 2001.

Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2001

Tentang Penegasan tidak Berlakunya lagi Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 1999 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.

i: Keputusan Kepala BPN No. Sk. 2 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2002

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Disahkan Pada Tanggal 23 Maret 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002

Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Disahkan Pada Tanggal 23 Maret 2002 (LN No. 13).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

Tentang Perubahan Atas PP No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 17April 2002 (LN No. 31 & TLN No. 4192).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 17 April 2002 (LN No. 32 & TLN No. 4193).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan. Disahkan pada tanggal 17 April 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002

Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan. Disahkan Pada Tanggal 13 Mei 2002 (LN No. 51 & TLN No. 4201).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002

Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. Disahkan Pada Tanggal 8 Juni 2002.

i: PP No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

c: PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, seta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002

Tentang Dana Reboisasi. Disahkan Pada Tanggal 8 Juni 2002 (LN No.67 & TLN No. 4207).

i: PP No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

u: PP No. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002

tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Disahkan pada tanggal 28 Juni 2002 (LN No. 72 & TLN No. 4211).

u: PP No. 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PP No. 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 27 Agustus 2002 (LN No. 88 & TLN No. 4221).

t: Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2003 Tentang Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 PP No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

c: PP No. 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002

Tentang Usaha Perikanan. Disahkan Pada Tanggal 7 Oktober 2002 (LN No. 100 & TLN No. 4230).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002

Tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Disahkan Pada Tanggal 12 Nopember 2002 (LN No. 116 & TLN No. 4240).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002

Tentang Hutan Kota. Disahkan Pada Tanggal 12 November 2002 (LN No. 119 & TLN No. 4242).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2002

Keppres Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 7 Januari 2002.

u: Keppres No. 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 3 Tahun 2002.

u: Keppres No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana

Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 46 Tahun 2002.

u: Keppres No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 30 Tahun 2003.

u: Perpres No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen.

Keppres Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor. Disahkan pada tanggal 23 April 2002.

c: Perpres No. 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.

Keppres Nomor 46 Tahun 2002

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 3 Tahun 2002. Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002.

u: Keppres No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 46 Tahun 2002.

u: Keppres No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 30 Tahun 2003.

u: Perpres No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen.

Keppres Nomor 48 Tahun 2002

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah Diubah terakhir Keppres No. 5 Tahun 2002. Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002.

u: Keppres No. 32 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 48 Tahun 2002.

u: Keppres No. 62 Tahun 2003 tentang tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 32 Tahun 2003.

u: Keppres No. 11 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 62 Tahun 2003.

u: Perpres No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keppres Nomor 68 Tahun 2002

Tentang Tunjungan Khusus Provinsi Papua. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 2002.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 2002

Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Gorontalo. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 5 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Siak Propinsi Riau. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Karimun Propinsi Riau. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Natuna Propinsi Riau. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 14 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Sorolangun Propinsi Jambi. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 16 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 22 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 23 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 24 Tahun 2002

Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan Pada Tanggal 31 Januari 2002.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

c: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Keputusan Kepala BPN No. 25 Tahun 2002

Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform. Disahkan Pada Tanggal 7 Maret 2002.

Keputusan Kepala BPN No. 150-II-2002

Tentang Wilayah Pembinaan Para Pejabat Eselon I Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2002.

INSTRUKSI KEPALA BPN TAHUN 2002

Instruksi Kepala BPN No. 1 Tahun 2002

Tentang Proses Pelayanan Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 19 Pebruari 2002.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2003

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan Pada Tanggal 17 Pebruari 2003 (LN No. 14 & TLN No. 4262).

c: PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 17 Pebruari 2003 (LN No. 15 & TLN No. 4263).

u: PP No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Disahkan Pada Tanggal 7 Maret 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton. Disahkan Pada Tanggal 10 Juni 2003 (LN No. 64 & TLN No. 4295).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003

Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, Dan Kota Administratif Watampone. Disahkan Pada Tanggal 8 Juli 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003

Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/dudanya. Disahkan Pada Tanggal 8 Juli 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003

Tentang Perubahan Atas PP No. 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 3 Nopember 2003 (LN o. 122 & TLN No. 4332).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003

Tentang Tanda Kehormatan Satyalencana. Disahkan pada tanggal 4 Nopember 2003.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2003

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003

Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis. Disahkan pada tanggal 17 Januari 2003.

c: Perpres No. 40 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003

Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara. Disahkan pada tanggal 21 Januari 2003.

c: Perpres No. 52 Tahun 2006 tentang

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 46 Tahun 2002. Disahkan pada tanggal 26 Mei 2003.

u: Keppres No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen Sebagaimana

Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 30 Tahun 2003.

u: Perpres No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 48 Tahun 2002. Disahkan pada tanggal 26 Mei 2003.

u: Keppres No. 62 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 32 Tahun 2003.

u: Keppres No. 11 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 62 Tahun 2003.

u: Perpres No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003

Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Disahkan Pada Tanggal 31 Mei 2003 (LN No. 60).

t: Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. Sk. 2 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

i: Keputusan Kepala BPN No. 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara

i: Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat

i: Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003

Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003.

c: Perpres No. 31 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 32 Tahun 2003. Disahkan pada tanggal 31 Juli 2003.

u: Keppres No. 11 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres No. 62 Tahun 2003.

u: Perpres No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disahkan pada tanggal 3 Nopember 2003.

u: Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

u: Perpres No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

u: Perpres No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

u: Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

u: Perpres No. 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

u: Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

u: Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 2003

Keputusan Kepala BPN No. 23-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah. Disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 24-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 26-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kota Batu Propinsi Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 26 Pebruari 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 27-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 28-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Lumandau Propinsi Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 29-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 30-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 31-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 37-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 38-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 39-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 6 Maret 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 94-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 21 Mei 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2003

Tentang Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 2 Juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 149-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan pada tanggal 22 Juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 150-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 22 Juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 153-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kota Banjar Propinsi Jawa Barat. Disahkan pada tanggal 25 juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 154-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo. Disahkan pada tanggal 25 juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 155-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo. Disahkan pada tanggal 25 juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 156-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 25 juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 157-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 25 juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 158-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu. Disahkan pada tanggal 25 juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 165-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan pada tanggal 30 juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 166-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan pada tanggal 30 juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 167-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan pada tanggal 30 juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 168-III-2003

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan pada tanggal 30 juli 2003.

Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003

Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Disahkan Pada Tanggal 28 Agustus 2003.

INSTRUKSI KEPALA BPN TAHUN 2003

Instruksi Kepala BPN No. 1 Tahun2003

Tentang Jangka Waktu Proses Permohonan Hak Atas Tanah Pada Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 4 Maret 2003.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2004

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disahkan Pada Tanggal 5 Januari 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

Tentang Penatagunaan Tanah. Disahkan Pada Tanggal 10 Mei 2004.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004

Tentang Rencana Kerja Pemerintah. Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004 (LN No. 45 & TLN No. 4385)

i: PP No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004

Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004 (LN No. 75 & TLN No. 4406)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004

Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe. Disahkan Pada Tanggal 28 September 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Disahkan Pada Tanggal 5 Oktober 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004

Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2004 (LN No. 123 & TLN No. 4435).

u: PP No. 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

u: PP No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004

Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2004.

u PP No. 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004

Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik. Disahkan pada tanggal16 Oktober 2004 (LN No. 128 & TLN No. 4440).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004

tentang Pemindahann Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

i: PP No. 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) Di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Disahkan Pada Tanggal 18 Oktober 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004 (LN No. 141 & TLN No. 4449).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004

Tentang Perencanaan Kehutanan. Disahkan Pada Tanggal 18 Oktober 2004 (LN No. 146 & TLN No. 4452).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004

Tentang Perlindungan Hutan. Disahkan Pada Tanggal 18 Oktober 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004

Tentang Majelis Rakyat Papua. Disahkan Pada Tanggal 23 Desember 2004 (LN No. 165 & TLN No. 4461).

u: PP No. 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 2004

Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2004

Tentang Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai Menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire. Disahkan pada tanggal 2 April 2004.

Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2004

Tentang Norma Pengawasan dan Daftar Materi Audit di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 6 April 2004.

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara. Disahkan pada tanggal 30 April 2004.

Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Disahkan pada tanggal 30 April 2004.

Keputusan Kepala BPN No. 5 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan pada tanggal 30 April 2004.

Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Paniai Propinsi Papua. Disahkan pada tanggal 30 April 2004.

Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Puncak Jaya Propinsi Papua. Disahkan pada tanggal 30 April 2004.

Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan. Disahkan pada tanggal 30 April 2004.

Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2004

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 30 April 2004.

Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2004

Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 30 Juli 2004.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2006 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. Sk. 2 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2005

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005

Tentang Jalan Tol. Disahkan Pada Tanggal 21 Maret 2005 (LN No. 32 & TLN No. 4489).

u: PP No. 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005.

Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Disahkan Pada Tanggal 10 Juni 2005 (LN No. 46 & TLN No. 4500).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Disahkan Pada Tanggal 13 Juni 2005 (LN No.48 & TLN No.4502).

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting.

t: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disahkan Pada Tanggal 13 Juni 2005 (LN No. 49 & TLN No. 4503).

c: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005

Tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Disahkan pada tanggal 20 Juli 2005 (LN No.64 & TLN No. 4515).

i: Perpres No. 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005

Tentang Perubahan Atas PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Disahkan pada tanggal 10 September 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Disahkan pada tanggal 10 September 2005 (LN No.83 & TLN No. 4532)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Disahkan Pada Tanggal 11 Nopember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005

Tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap. Disahkan pada tanggal 11 Nopember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005

Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 11 Nopember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Tentang Dana Perimbangan. Disahkan pada tanggal 9 Desember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Disahkan pada tanggal 9 Desember 2005.

u: PP No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Disahkan Pada Tanggal 28 Desember 2005 (LN No.150 & TLN No.4585).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Tentang Desa. Disahkan Pada Tanggal 30 Desember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005

Tentang Kelurahan. Disahkan Pada Tanggal 30 Desember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005

Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Disahkan Pada Tanggal 30 Desember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disahkan Pada Tanggal 30 Desember 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Disahkan Pada Tanggal 30 Desember 2005.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2005

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005

Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 31 Januari 2005.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005

Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada tanggal 31 Januari 2005.

u: Perpres No. 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005

Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Disahkan Pada Tanggal 7 Februari 2005.

t: Perpres No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

i: Perpres No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005

Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD dan Kep. Nias Prov. Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 15 April 2005.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005

Tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disahkan pada tanggal 20 April 2005.

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005

Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD & Kep. Nias Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 29 April 2005.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan pada tanggal 3 Mei 2005.

t: Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

u: Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

t: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005

Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur. Disahkan pada tanggal 23 Mei 2005.

u: Perpres No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres No. 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005

Tentang Perubahan Ketujuh Keppres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disahkan pada Tanggal 5 September 2005.

Ketentuan BPN

tbl: Perpres No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005

Tentang Perubahan Perpres 9-2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 14 Oktober 2005.

Ketentuan BPN

tbl: Perpres No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005

Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 2005.

u: Perpres No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

u: Perpres No. 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Terluar. Disahkan pada tanggal 29 Desember 2005.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005

Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. Disahkan pada tanggal 29 Desember 2005.

u: Perpres No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perpres No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.

u: Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2005

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005

Tentang Perubahan Atas Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2005.

Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005

Tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 27 Juni 2005

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Staf Khusus.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 -2009.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. Sk. 2 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

i: Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 Tentang Pemberian Penghargaan Bhumi Bhakti Adhiguna Kepada Para Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota.

i: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2006 Tentang Persetujuan Penghapusan Tanah Dan Bangunan Untuk Pelebaran Jalan Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Keputusan Kepala BPN No. 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Peraturan Kepala BPN No. 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

i: Keputusan Kepala BPN No. 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara

i: Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat

i: Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah BPN Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Keputusan Kepala BPN No. 76 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 59 Tahun 2008 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan.

i: Keputusan Kepala BPN No. 77/Kep-7.1/III/2012 Tentang Praksis Reforma Agraria.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 2005

Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2005

Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 2005.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

c: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

Keputusan Kepala BPN No. 14-II-2005

Tentang Penyelamatan Dokumentasi Pertanahan di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2005.

Keputusan Kepala BPN No. 80-III-2005

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 3 Mei 2005.

Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 2005

Tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Barat. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2005.

Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2005

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas di Propinsi Kalimantan Tengah. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2005.

Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2005

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan di Propinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2005.

Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2005

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2005.

Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2005

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Barat. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2005.

Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2005

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Begadai di Propinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2005.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2006

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang. Disahkan Pada Tanggal 3 Pebruari 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006

Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan pada tanggal 23 Februari 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Disahkan pada tanggal 14 Maret 2006 (LN No. 20 & TLN No. 4609).

i: Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara.

i: Keppres No 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara.

u: PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

i: Peraturan Kepala BPN No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Disahkan pada tanggal 3 April 2006 (LN No. 25 & TLN No. 4614).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006

Tentang Irigasi. Disahkan Pada Tanggal 30 Mei 2006 (LN No. 46 & TLN No. 4624).

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

Tentang Jalan. Disahkan Pada Tanggal 31 Oktober 2006 (LN No. 86 & TLN No. 46555).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006

Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa. Disahkan Pada Tanggal 8 Nopember 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Disahkan Pada Tanggal 29 Nopember 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 29 Nopember 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Disahkan Pada Tanggal 15 Desember 2006.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2006

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Disahkan pada tanggal 11 Januari 2006.

c: Perpres No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perempuan. Disahkan pada tanggal 20 Maret 2006.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

Tentang Badan Pertanahan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 11 April 2006.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

t: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

t: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

t: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Staf Khusus.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 -2009.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

i: Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2006 Tentang Persetujuan Penghapusan Tanah Dan Bangunan Untuk Pelebaran Jalan Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Keputusan Kepala BPN No. 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara

i: Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat

i: Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

i: Keputusan Kepala BPN No. 59 Tahun 2008 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 76 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 158 – VII – 2008 Tentang Penunjukan Staf Pelaksana Kegiatan Pengelola Dokumentasi Sjdi Hukum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008.

i: Keputusan Kepala BPN No. 77/Kep-7.1/III/2012 Tentang Praksis Reforma Agraria.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Peraturan Kepala BPN No. 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

i: Peraturan Kepala BPN No. 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

i: Peraturan Kepala BPN No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 17 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Perpres No. 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012 (LN No. 209).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006

Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil disahkan pada tanggal 11 Mei 2006.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan Pada Tanggal 5 Juni 2006.

t: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Pepres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2006

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006

Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan. Disahkan Pada Tanggal 9 Desember 2006

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 2006

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 16 Mei 2006.

u: Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006

Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Jakarta 16 Mei 2006.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 16 Mei 2006.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

t: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Staf Khusus.

i: Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Keputusan Kepala BPN No. 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional.

i: Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 Tentang Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara

i: Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat

i: Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Peraturan Kepala BPN No. 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Keputusan Kepala BPN No. 158 – VII – 2008 Tentang Penunjukan Staf Pelaksana Kegiatan Pengelola Dokumentasi Sjdi Hukum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008.

t: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Keputusan Kepala BPN No. 59 Tahun 2008 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 76 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

t: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

i: Peraturan Kepala BPN No. Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

i: Peraturan Kepala BPN No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 17 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 77/Kep-7.1/III/2012 Tentang Praksis Reforma Agraria.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. Disahkan pada tanggal

i: Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.

i: Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara.

i: Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Keputusan Kepala BPN No. 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

t: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional.

i: Peraturan Kepala BPN No. 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Peraturan Kepala BPN No. 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

i: Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

i: Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara

i: Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat

i: Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Keputusan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan

i: Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

t: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Keputusan Kepala BPN No. 59 Tahun 2008 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Keputusan Kepala BPN No. 76 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana.

i: Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

i: Peraturan Kepala BPN No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

i: Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

i: Peraturan Kepala BPN No. 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

i: Peraturan Kepala BPN No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 17 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Keputusan Kepala BPN No. 77/Kep-7.1/III/2012 Tentang Praksis Reforma Agraria.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006

Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Staf Khusus. Disahkan Pada Tanggal 17 Mei 2006

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 -2009. Disahkan Pada Tanggal 29 Desember 2006.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 2006

Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006

Tentang Pemberian Penghargaan Berupa Sertipikat/ Piagam Dan Plakat Kepada Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota. Disahkan Pada Tanggal 24 Pebruari 2006.

i: Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 Tentang Pemberian Penghargaan Bhumi Bhakti Adhiguna Kepada Para Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota.

Keputusan Kepala BPN No. Sk. 2 Tahun 2006

Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. Disahkan Pada Tanggal 23 Maret 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006

Tentang Pemberian Penghargaan Bhumi Bhakti Adhiguna Kepada Para Gubernur, Bupati Dan Atau Walikota. Disahkan Pada Tanggal 29 Maret 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006

Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 16 Mei 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2006

Tentang Persetujuan Penghapusan Tanah Dan Bangunan Untuk Pelebaran Jalan Di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 22 Mei 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 2006

Tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi. Disahkan Pada Tanggal 22 Mei 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 14 Tahun 2006

Tentang Pembentukan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan Pada Tanggal 1 Juni 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 2006

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan Pada Tanggal 1 Juni 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 16 Tahun 2006

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat. Disahkan Pada Tanggal 1 Juni 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 2006

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu. Disahkan Pada Tanggal 1 Juni 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 2006

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsisulawesi Tenggara. Disahkan Pada Tanggal 1 Juni 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 2006

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 1 Juni 2006

Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 2006

tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu. Disahkan Pada Tanggal 1 Juni 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 21 Tahun 2006

tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan Pada Tanggal 1 Juni 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 22 Tahun 2006

Tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan Pada Tanggal 1 Juni 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 45 Tahun 2006

Tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Akibat Hilang/Dicuri Di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Disahkan Pada Tanggal 21 September 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 47 Tahun 2006

tentang Perubahan Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta. Disahkan Pada Tanggal 24 November 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 73-I-2006 Tahun 2006

tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional BPN Tahun 2006 Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 14 Maret 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 244-VII-2006

Tentang Penyelesaian Masalah Tanah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Disahkan Pada Tanggal 25 September 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 245-VII-2006

Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 246-VII-2006

Tentang Pembentukan Tim Penyiapan Tanah Dalam Rangka Pengembangan Bahan Bakar Nabati. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 247-VII-2006

Tentang Pembentukan Tim Jalan Tol Trans Jawa. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2006.

Keputusan Kepala BPN No. 267-VII-2006

tentang Pembentukan Tim Penyusunan Program Pembaruan Agraria Nasional. Disahkan Tanggal 17 Oktober 2006.

i: Keputusan Kepala BPN No. 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional.

Keputusan Kepala BPN No. 280-VII-2006

Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN. Disahkan Pada Tanggal 1 November 2006.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2007

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007

Tentang Pemindahan Ibukota Kab. Aceh Timur dari Wilayah Kota Langsa ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Disahkan pada tanggal 8 Januari 2007.

i: PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007

Tentang Perubahan Batas Wllayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa. Disahkan Pada Tanggal 23 Maret 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat. Disahkan Pada Tanggal 18 April 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Disahkan pada tanggal 9 Juli 2007

i: Peraturan Kepala BPN No. 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Peraturan Kepala BPN No. 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan.

i: PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

i: Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur.

i: PP No. 11 Tahun 2010 Tentang penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Disahkan Pada Tanggal 16 Juli 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Disahkan Pada Tanggal 23 Juli 2007.

i: Peraturan Kepala BPN No. 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

i: Peraturan Kepala BPN No. 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

i: PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam. Disahkan Pada Tanggal 20 Agustus 2007.

u: PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007

Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007

i: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Disahkan pada tanggal 5 Nopember 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007

Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Disahkan pada tanggal 5 Nopember 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007

Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Disahkan Pada Tanggal 16 Nopember 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Disahkan pada tanggal 10 Desember 2007.

i: PP No. 35 Tahun 2011Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007

Tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung. Disahkan Pada Tanggal 10 Nopember 2007

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2007

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007

Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan disahkan pada tanggal Januari 2007.

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007

Tentang Jaringan Data Spasial Nasional. Disahkan pada tanggal 3 agustus 2007.

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007

Tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Disahkan pada tanggal 3 September 2007.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disahkan pada tanggal 6 Desember 2007.

i: Peraturan Kepala BPN No. 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2007

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007

tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2007.

u: Keppres No. 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara.

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 2007

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007

Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 29 Januari 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007

Tentang Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 20 Maret 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan Pada Tanggal 21 Mei 2007.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007

Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan Pada Tanggal 21 Juni 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007

Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting. Disahkan Pada Tanggal 21 Juni 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007

Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan Pada Tanggal 21 Juni 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007

Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Disahkan Pada Tanggal 11 Juli 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional. Disahkan Pada Tanggal 24 Septemberi 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan Pada Tanggal 23 September 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong Di Provinsi Bengkulu. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Di Provinsi Kalimantan Tengah. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau Di Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango Di Provinsi Gorontalo. Disahkan Pada Tanggal 25 September 2007

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 2007

Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2007

Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 3 Januari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 01-VII-2007

Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional. Disahkan Pada Tanggal 3 Januari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2007

Tentang Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Disahkan Pada Tanggal 5 Januari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007

Tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Tim Sinkronisasi dan Harminisasi Pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 5 Tahun 2007

Tentang Pemberian Kewenangan Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Menandatangani SPM serta Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pada Kantor BPN Pusat, STPN Yogyakarta, Kanwil BPN Propinsi dan Kantah Kab./Kota di Seluruh Indonesia. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 2007

Tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung. Disahkan pada tanggal 17 Januari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007

Tentang Penetapan Tenaga Honorer Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diangkat Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2006. Disahkan pada tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 8 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 10 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Di Provinsi Sumatera Barat. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 11 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Timur Di Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 13 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Di Provinsi Kalimantan Tengah. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 14 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan Di Provinsi Kalimantan Tengah. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 15 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 16 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 17 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Di Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 18 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 19 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 20 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan Pada Tanggal 22 Pebruari 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007

Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Disahkan Pada Tanggal 2 Juni 2007.

t: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Keputusan Kepala BPN No. 46 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Irian Jaya Barat. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 47 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Irian Jaya Barat. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 48 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 49 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 50 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 51 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 52 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 53 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 54 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 55 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kaimana Provinsi Irian Jaya Barat. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 56 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Irian Jaya Barat. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 57 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 58 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 59 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 60 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara. Disahkan Pada Tanggal 22 Agustus 2007.

Keputusan Kepala BPN No. 80 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 2007.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2008

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Disahkan pada tanggal 4 Pebruari 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disahkan Pada Tanggal 4 Februari 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disahkan Pada Tanggal 4 Februari 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008

Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Disahkan Pada Tanggal 28 Februari 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

Tentang Kecamatan. Disahkan Pada Tanggal 28 Februari 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Disahkan Pada Tanggal 28 Februari 2008 (LN No. 43 & TLN No. 4830).

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

Tentang pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Disahkan pada tanggal 28 Februari 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008

Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Disahkan Pada Tanggal 10 Maret 2008 (LN No. 48 & TLN No. 4833).

t: Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

i: Keppres No. 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

i: Keppres No. 36 Tahun 2009 Tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan. Disahkan Pada Tanggal 11 April 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008

Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Disahkan pada tanggal 11 April 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 19 Mei 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Disahkan Pada tanggal 19 Mei 2008.

i: Keppres No. 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara.

i: Peraturan Kepala BPN No. 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

i: Peraturan Kepala BPN No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008

Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 19 Mei 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Disahkan Pada Tanggal 23 Mei 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008

Tentang Air Tanah. Disahkan Pada Tanggal 23 Mei 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008

Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Disahkan Pada Tanggal 21 Agustus 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Disahkan Pada Tanggal 28 Agustus 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri sipil. Disahkan pada tanggal 9 Oktober 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008

Tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Disahkan Pada Tanggal 4 November 2008 (LN No. 164 & TLN No. 4914)

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008

Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan. Disahkan Pada Tanggal 16 Desember 2008 (LN No. 201 & TLN No. 4947).

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2008

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Disahkan Pada Tanggal 26 Januari 2008.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Lembaga Penjaminan. Disahkan Pada Tanggal 26 Januari 2008

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. Disahkan Pada Tanggal 26 Februari 2008.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008

tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura. Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008.

u: Perpres No. 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008

Tentang Perubahan Atas Perpres No. 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat

Prov. Nanggroe Aceh Darussalam dan Kep. Nias Prov. Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008

Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Disahkan Pada Tanggal 12 Agustus 2008

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 2008

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Disahkan Pada Tanggal 31 Januari 2008.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan Pada Tanggal 10 Maret 2008.

u: Peraturan Kepala BPN No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 25 Juni 2008.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan. Disahkan Pada Tanggal 25 Juni 2008.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu. Disahkan Pada Tanggal 11 Juli 2008.

tbl: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Disahkan Pada Tanggal 26 September 2008.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 2008

Keputusan Kepala BPN No. 75-XVI-2008

Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Yogyakarta sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik *Land Management and Policy Development Program* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008. Disahkan pada tanggal 4 April 2008.

Keputusan Kepala BPN No. 83-VI-2008

Tentang Penetapan Kantor Lokasi Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA) Kegiatan Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi. Disahkan pada tanggal 10 April 2008.

Keputusan Kepala BPN No. 84-XVI-2008

Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Banten sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik *Land Management and Policy Development Program* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008. Disahkan pada tanggal 10 April 2008.

Keputusan Kepala BPN No. 85-XVI-2008

Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Barat sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik *Land Management and Policy Development Program* Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008. Disahkan pada tanggal 10 April 2008.

Keputusan Kepala BPN No. 86-XVI-2008

Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik *Land Management and Policy Development Program* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008. Disahkan pada tanggal 10 April 2008.

Keputusan Kepala BPN No. 87-XVI-2008

Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Timur sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik *Land Management and Policy Development Program* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008. Disahkan pada tanggal 10 April 2008.

Keputusan Kepala BPN No. 88-XVI-2008

Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik *Land Management and Policy Development Program* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008. Disahkan pada tanggal 10 April 2008.

Keputusan Kepala BPN No. 89-XVI-2008

Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik *Land Management and Policy Development Program* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008. Disahkan pada tanggal 10 April 2008.

Keputusan Kepala BPN No. 147-III-2008

Tentang Pembentukan Organisasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 9 Mei 2008.

Keputusan Kepala BPN No. 76 Tahun 2008

Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 24 November 2008

Keputusan Kepala BPN No. 59 Tahun 2008

Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 24 September 2008.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2009

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009

Tentang Kawasan Industri. Disahkan Pada Tanggal 3 Maret 2009 (LN No. 47 & TLN No. 4987).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Disahkan Pada Tanggal 24 Maret 2009 (LN No. 59 & TLN No. 4996).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi. Disahkan Pada Tanggal 24 Maret 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009

Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Disahkan pada tanggal 22 april 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Disahkan Pada Tanggal 8 Juni 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009

Tentang Kepelabuhanan. Disahkan Pada Tanggal 20 Oktober 2009.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2009

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Pengakhiran mas tugas Badan Rehailitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. Nanggroe aceh Darussalam dan Kep. Nias Prov. Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi & Rekonstruksi di Wil. Prov NAD dan Kep. Prov. Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 12 Pebruari 2009.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009

Tentang Lembaga Pembiayaan. Disahkan pada tanggal 18 Maret 2009.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura. Disahkan Pada Tanggal 6 Juni 2009.

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2009

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Disahkan Pada Tanggal 18 Maret 2009.

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Disahkan Pada Tanggal 25 Mei 2009.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Disahkan Pada Tanggal 28 Desember 2009.

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 2009

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan Pada Tanggal 3 Pebruari 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Disahkan Pada Tanggal 3 Pebruari 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 3 Pebruari 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 3 Pebruari 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 3 Pebruari 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Disahkan Pada Tanggal 3 Pebruari 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Disahkan Pada Tanggal 3 Pebruari 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009
Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan BPN Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 26 Pebruari 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur. Disahkan Pada Tanggal 6 Maret 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Kontor Pertanahan Kabupaten Keerom di Provinsi Papua. Disahkan Pada Tanggal 11 Mei 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Disahkan Pada Tanggal 11 Mei 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disahkan Pada Tanggal 11 Mei 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatra Selatan. Disahkan Pada Tanggal 11 Mei 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo. Disahkan Pada Tanggal 11 Mei 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo. Disahkan Pada Tanggal 11 Mei 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung. Disahkan Pada Tanggal 11 Mei 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009
Tentang Larasita BPN Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 11 Mei 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi. Disahkan Pada Tanggal 14 Agustus 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat. Disahkan Pada Tanggal 14 Agustus 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. Disahkan Pada Tanggal 14 Agustus 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam Propinsi Aceh. Disahkan Pada Tanggal 14 Agustus 2009.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disahkan Pada Tanggal 26 Oktober 2009.

KEPUTUSAN KEPALA BPN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah. Disahkan Pada Tanggal 3 Maret 2009.

Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 43/KEP-34/VI/ 2009 Tahun 2009

Tentang Lambang, Kop Surat, Stempel Dinas dan Papan Nama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 3 Juni 2009.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2010

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010

Tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Disahkan pada tanggal 5 Januari 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010

Tentang Pemindahan Ibu Kota Kab. Probolinggo dari Wil. Kota Probolinggo ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 5 Januari 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010

Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Prov. Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 5 Januari 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010

Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow dari Wilayah Kota Kotamobagu ke wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara. Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010

Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Disahkan Pada Tanggal 22 Januari 2010 (LN No. 16 & TLN No. 5098).

t: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

t: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Disahkan Pada Tanggal 22 Januari 2010 (LN No. 18 & TLN No. 5100).

i: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

Tentang penyelenggaraan Penataan Ruang. Disahkan Pada Tanggal 28 Januari 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010

Tentang Wilayah Pertambangan. Disahkan Pada Tanggal 1 Februari 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 2010 (LN No. 29 & TLN No. 5111).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010

Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 2010

Tentang Perubahan Atas PP No.16 Th.1994 ttg Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 1 Maret 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010

Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Disahkan Pada Tanggal 5 April 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010

Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kab. Madiun Prov. Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 6 Juni 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 6 Juni 2010 (LN No. 74 & TLN No. 5135).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 2010 (LN No. 99 & TLN No. 5149).

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010

Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Disahkan pada tanggal 24 Agustus 2010 (LN No. 101 & TLN No. 5151).

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010

Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2010 (LN No. 109 & TLN No. 5154).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 ttg Kegiatan Usaha Panas Bumi. Disahkan pada tanggal 20 Oktober 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010

Tentang standar Akuntansi Pemerintahan. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2010

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Disahkan Pada Tanggal 25 Februari 2010.

INSTRUKSI PRESIDEN TAHUN 2010

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010

Tentang Percepatan Pelaksanaa Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 2010

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Disahkan Pada Tanggal 25 Januari 2010.

i: Peraturan Kepala BPN No. 17 Tahun 2010 Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010

Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. Disahkan Pada Tanggal 28 Januari 2010.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010

Tentang Loket Pelayanan Pertanahan. Disahkan Pada Tanggal 28 Januari 2010.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Disahkan Pada Tanggal 1 Pebruari 2010

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana. Disahkan Pada Tanggal 8 Pebruari 2010.

Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2010

tentang Rencana Strategis BPN Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 11 Pebruari 2010.

i: Keputusan Kepala BPN No. 77/Kep-7.1/III/2012 Tentang Praksis Reforma Agraria.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Disahkan Pada Tanggal 5 April 2010.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Disahkan Pada Tanggal 5 April 2010.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Disahkan Pada Tanggal 5 April 2010.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Disahkan Pada Tanggal 5 April 2010.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 7 Juni 2010.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Disahkan Pada Tanggal 28 Juni 2010.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010

Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Disahkan Pada Tanggal 9 Agustus 2010.

i: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010

Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 21 September 2010.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Disahkan pada tanggal 24 Nopember 2010.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010

Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan. Disahkan Pada Tanggal 25 November 2010.

c: Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2012 tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010

Tentang Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern di Lingkungan BPN RI.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2011

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011.
tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Disahkan Pada Tanggal 5 Januari 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Disahkan Pada Tanggal 5 Januari 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011
Tentang pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah. Disahkan Pada Tanggal 30 Maret 2011 (LN No. 42 & TLN No. 5208).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian. Disahkan pada tanggal 18 April 2011 (LN No. 45 & TLN No. 5210).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011
Tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wil. Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Disahkan pada tanggal 18 April 2011 (LN No. 47 & TLN No. 5212).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011
Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Wil. Kota Sungaipenuh ke Wil. Kecamatan Siulak Kab. Kerinci Provinsi Jambi. Disahkan pada tanggal 18 April 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Disahkan pada tanggal 19 Mei 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011

Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Disahkan Pada Tanggal 20 Juli 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011

Tentang Sungai. Disahkan pada tanggal 27 Juli 2011 (LN No. 74 & TLN No. 5230).

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 2011

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011

Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Disahkan Pada Tanggal 4 Pebruari 2011.

i: Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Disahkan Pada Tanggal 4 Pebruari 2011.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Disahkan Pada Tanggal 4 Pebruari 2011.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan. Disahkan Pada Tanggal 4 Juli 2011.

i: Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Disahkan Pada Tanggal 14 Juli 2011.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Perubahan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 10 Agustus 2011.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Disahkan Pada Tanggal 28 September 2011.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011

Tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 27 Oktober 2011.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Disahkan Pada Tanggal 15 Nopember 2011.

KEPUTUSAN KEPALA BPN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011

Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 68/KEP-3.4/III/2011 Tahun 2011

Tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Pertanahan. Disahkan Pada Tanggal 7 Maret 2011.

Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 259/KEP-28/VII/2011 Tahun 2011

Tentang Standar Audit di Lingkungan BPN Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 4 Juli 2011.

Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 260/KEP-28/VII/2011 Tahun 2011

Tentang Daftar Materi Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 4 Juli 2011.

ANOTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2012

PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012

Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Disahkan pada tanggal 23 Pebruari 2012 (LN No. 46 & TLN No. 5283).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan. Disahkan pada tanggal 23 Pebruari 2012 (LN No. 48 & TLN No. 5285).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Disahkan pada tanggal 27 Pebruari 2010 (LN No. 55 & TLN No. 5288).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012

Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Disahkan pada tanggal 1 Maret 2012 (LN No. 57 & TLN No. 5290).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Disahkan pada tanggal 2 Maret 2012 (LN No. 62 & TLN No.5292).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Disahkan pada tanggal 16 Mei 2012 (LN No. 121 & TLN No. 5318)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan

Hutan. Disahkan pada tanggal 6 Juli 2012 (LN No. 139 & TLN No. 5324).

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012

Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 17 Juli 2012 (LN No. 146 & TLN No. 5328).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Disahkan Pada Tanggal 15 Oktober 2012 (LN No. 189 & TLN No. 5348).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Disahkan Pada Tanggal 30 Oktober 2012 (LN No. 215 & TLN No. 5327)

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2012

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional. Disahkan Pada Tanggal 20 Maret 2012.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Disahkan Pada Tanggal 31 Juli 2012.

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012 (LN No. 209).

KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2012

Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012

tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional

i: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

PERATURAN KEPALA BPN TAHUN 2012

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012

Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 31 Januari 2012.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan Pada Tanggal 5 Juli 2012.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Disahkan Pada Tanggal 12 Juli 2012.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012

Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Disahkan pada tanggal 12 Oktober 2012.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Disahkan pada tanggal 30 Oktober 2012.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BPN RI. Disahkan pada tanggal 30 Oktober 2012.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan. Disahkan pada tanggal 6 Nopember 2012.

KEPUTUSAN KEPALA BPN TAHUN 2012

Keputusan Kepala BPN No. 68/Kep-2.1/II/2012
Tentang Langkah-Langkah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2011. Disahkan Pada Tanggal 27 Februari 2012.

Keputusan Kepala BPN No. 77/Kep-7.1/III/2012.
Tentang Praksis Reforma Agraria Disahkan Pada Tanggal 2 Maret 2012.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan
Berkaitan Dengan Pendaftaran Tanah

No.	Peraturan Perundang-undangan	Tentang/Perihal
1.	UU No. 5 Tahun 1960	Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
2.	UU No. 16 Tahun 1985	Tentang Rumah Susun
3.	UU No. 4 Tahun 1996	Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
4.	UU No. 41 Tahun 2004	Tentang Wakaf
5.	PP No. 10 Tahun 1961	Pendaftaran Tanah • Dinyatakan tidak berlaku oleh PP No. 24 Tahun 1997.
6.	PP No. 28 Tahun 1977	Perwakafan Tanah Milik. • Penyempurnaan dengan PP No. 42 Tahun 2006
7.	PP No. 4 Tahun 1988	Rumah Susun
8.	PP No. 24 Tahun 1997	Pendaftaran Tanah
9.	PP No. 37 Tahun 1998	Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
10.	PP No. 46 Tahun 2002	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional • Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PP No. 13 Tahun 2010
11.	PP No. 42 Tahun 2006	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. • Menyempurnakan PP No. 28 Tahun 1977.
12.	PP No. 13 Tahun 2010	Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
13.	PMA No. 6 Tahun 1961	Tata Kerja Pendaftaran Tanah Mengenai Pengukuran-Pengukuran dan Pemetaan. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.

14.	PMA No. 7 Tahun 1961	Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
15.	PMA No. 8 Tahun 1961	Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997
16.	PMA No. 10 Tahun 1961	Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan dalam Pasal 19 PP No. Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya. • Dinyatakan tidak dengan PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999
17.	PMA No. 11 Tahun 1961	Bentuk Akta
18.	PMA No. 14 Tahun 1961	Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
19.	PMA No. 15 Tahun 1961	Pembebanan dan Pendaftaran Hypotheek dan Credietverband
20.	PMPA No. 6 Tahun 1964	Pendaftaran Hak-hak di Daerah-daerah dimana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan menurut PP No. 10 Tahun 1961
21.	PMA No. 6 Tahun 1965	Pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaran Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
22.	PMA No. 1 Tahun 1966	Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. • Menyatakan KMA No. Sk.VI/5/Ka Tah. 1962 tidak berlaku lagi. • Pasal 9 ayat (1) dan (2) PMA No. 9 Tahun 1965 tidak berlaku lagi.
23.	PERDIRJEN AGRARIA No. 4 Tahun 1968	Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.

		• Dinyatakan tidak berlaku dengan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997
24.	KEPDIRJEN AGRARIA No. Sk. 67/DDA/1968	Bentuk Buku Tanah dan Sertipikat Hypotheek dan Credietverband
25.	KMDN No. 28 Tahun 1969	Pembentukan Panitya Ujian Pejabat Pembuat Akte Tanah. (belum terdokumentasi) • Dicabut dengan KMDN No. SK.19/DDA/1971
26.	KMDN No. 004/HK/DPT/1969	Cara Pengukuran dan Pembuatan Peta-peta yang dimaksud dalam Pasal 1ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) PMA No. 6 Tahun 1965
27.	PMDN No. Sk.41/DDA/1969	Biaya Pendaftaran Tanah. • Dicabut dengan PMDN No. 2 Tahun 1978
28.	PMDN No. Sk.49/DDA/1969	Biaya untuk Melihat, Memperoleh Keterangan, Kutipan dan Salinan dari Daftar-Daftar dan Peta Pendaftaran. • Dicabut dengan PMDN No. 2 Tahun 1978.
29.	PMDN No. Sk.59/DDA/1970	Penyerhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah. • Dicabut dengan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997
30.	KMDN No. Sk.19/DDA/1971	Pembentukan Panitia Ujian PPAT. • Mencabut KMDN No. 28 Tahun 1969
31.	PMDN No. 14 Tahun 1975	Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan bagian-bagian bangunan yang ada diatasnya serta penerbitan sertipikatnya. • Sepanjang yang mengatur mengenai rumah susun, dinyatakan tidak berlaku dengan PERKBPN No. 4 Tahun 1989.
32.	PMDN No. 16 Tahun 1975	Penggiatan Pendaftaran Tanah dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa demi Desa menuju Desa Lengkap sesuai Dengan PP No. 10 Tahun 1961

33.	PMDN No. 2 Tahun 1977	Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji bagi Para PPAT. • Dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999.
34.	PMDN No. 4 Tahun 1977	Penyeleggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai HAT Yang dipunyai Bersama dan Pemilikan Bagian-bagian Bangunan Yang Ada Diatasnya
35.	PMDN No. 6 Tahun 1977	Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik
36.	PMDN No. 2 Tahun 1978	Biaya Pendaftaran Tanah. • Menyatakan Psl 11 (2) s.d. Psl 4 pada PMA No 6 Tahun 1965, PMDN No Sk.41/DDA/1969 dan No Sk.49/DD/1969 tidak berlaku lagi.
37.	PMDN No. 10 Tahun 1978	Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Secara Fotogrametris. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
38.	PMDN No. 12 Tahun 1978	Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-badan Hukum Tertentu Pada PMDN No 2 Tahun 1978. • Menambahkan BAB IIIA pada ketentuan sesudah pasal 6 PMDN No. 2 Tahun 1978. • Menyatakan PMDN No. SK. 55/DDA/1969 tidak berlaku lagi.
39.	KMDN No. 189 Tahun 1981	Proyek Operasi Nasional Agraria
40.	KMDN No. 220 Tahun 1981	Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria

41.	PMDN No. 10 Tahun 1983	Tata cara Permohonan dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-bagian pada bangunan Bertingkat. • Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan PERKBPN No. 4/1989.
42.	PERKBPN No. 1 Tahun 1988	Penyesuaian Sertipikat Lama dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Naional.
43.	PERKBPN No. 1 Tahun 1989	Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. • Dinyatakan tidak berlaku dengan PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999
44.	PERKBPN No. 2 Tahun 1989	Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun
45.	PERKBPN No. 3 Tahun 1989	Tata Cara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997
46.	PERKBPN No. 4 Tahun 1989	Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
47.	PERKBPN No. 5 Tahun 1989	Kewenangan Penandatangan Buku Tanah dan Sertipikat. • Dinyatakan tidak berlaku dengan PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1998
48.	PERKBPN No. 6 Tahun 1989	Penyempurnaan Bentuk Akta PPAT. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
49.	KEPKBPN No. 5 Tahun 1989	Batas Usia PPAT
50.	KEPKBPN No. 21/KBPN/1989	Perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik Atas Tanah-tanah yang Diberikan Kepada Para Transmigran

51.	SKB MENHUT & KBPN No. 361/Kpts-VII/90; 18-XI-90	Petunjuk Teknis Penataan Batas dan Pengukuran Kadastral dalam rangka Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian
52.	KEPKBPN No. 22 Tahun 1990	Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia
53.	PERKBPN No. 2 Tahun 1992	Biaya Pendaftaran Tanah. • PMDN No. 2 Tahun 1978, No.12 Tahun 1978 dan No. 6 Tahun 1979 sepanjang mengenai biaya pendaftaran dan pembuatan sertipikat dinyatakan tidak berlaku lagi.
54.	PERKBPN No. 4 Tahun 1992	Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Tk. I Timor Timur dan Penerbitan Sertipikatnya
55.	KMNA/KBPN No. 10 Tahun 1993	Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah
56.	KMNA/KBPN No. 10 Tahun 1994	Penetapan Besarnya Uang Pengganti Biaya Cetak Blanko Sertipikat dan Tata Cara Pengelolaannya
57.	PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1995	Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik di Daerah Uji Coba
58.	PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1995	Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
59.	PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1995	(*belum terdokumentasi*)
60.	KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1995	Perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat, dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat yang Menjadi

		Obyek Proyek Nasional Agraria.
61.	PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1996	Formasi PPAT
62.	PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1996	Pengukuran dan Pemetaan untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
63.	PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1996	Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997
64.	PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1996	Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu
65.	PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1996	Pendafataran Hak Tanggungan. • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
66.	PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997	Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. • Menyatakan tidak berlaku lagi : 1. PMA No. 6 Tahun 1961 2. PMA No. 7 Tahun 1961 3. PMA No. 8 Tahun 1961 4. PMA No. 14 Tahun 1961 5. PERDIRJEN Agraria No. 4 Tahun 1968 6. PMDN No. Sk.59/DDA/1970 7. PMPA No. 2 Tahun 1962 8. KMDN No. Sk.26/DDA/1970 9. PMA No. 6 Tahun 1965 10. PMDN No. 10 Tahun 1978 11. PERKBPN No. 3 Tahun 1989 12. PERKBPN No. 6 Tahun 1989 13. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1995 14. PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1996

		15. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1996 16. PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1996
67.	KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997	Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). • Diubah dengan KMNA/KBPN No. 15 Tahun 1997.
68.	KMNA/KBPN No. 14 Tahun 1997	Pejabat Pembuat Akta Tanah
69.	KMNA/KBPN No. 15 Tahun 1997	Perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). • Mengubah KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997
70.	KMNA/KBPN No. 16 Tahun 1997	Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai
71.	PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998	Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat Sebagai PPAT. • Dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak bertentanan dengan PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999.
72.	PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998	Surveyor Berlisensi
73.	PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998	Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
74.	PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1998	Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat. • Menyatakan PERKBPN No. 5 Tahun 1989 tidak berlaku lagi. • Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan PERKBPN No. 1 Tahun 2011
75.	KMNA/KBPN No. 1 Tahun	Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah

	1998	untuk RSS/RS menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 9 Tahun 1997
76.	KMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998	Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal
77.	KMNA/KBPN No. 8 Tahun 1998	Ketentuan Pelaksanaan PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi
78.	KMNA/KBPN No. 58-III-1998	Pengadaan Tenaga Ajudikasi di Lingkungan BPN
79.	SKB MNA/KBPN & DIRJEN PAJAK No. SKB-2 Tahun 1998; KEP-179/PJ/1998	Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
80.	PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999	Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. • Menyatakan tidak berlaku lagi : – PMA No. 10 Tahun 1961 – PMDN No. 2 Tahun 1977 – PERKBPN No. 1 Tahun 1989 – PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1996 – PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998 • Dinyatakan tidak berlaku dengan PERKBPN No. 1 Tahun 2006
81.	PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999	Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
82.	PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1999	Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang Berupa Hak Atas Tanah yang Sudah Bersertipikat dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
83.	KMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999	Penetapan Formasi PPAT di Kabupaten/Kotamadya
84.	KMNA/KBPN No. 11 Tahun 1999	Persetujuan Pengahpusan Blanko Sertipikat Tanah Lama di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
85.	KEPKBPN No. 13 Tahun	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara

	2000	Sistematik pada Daerah Uji Coba di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang
86.	KEPKBPN No. 1 Tahun 2003	Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 PP. No 46 Tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
87.	SKB Men Agama & KBPN No. 422 Tahun 2004; 3/SKB/BPN/04	Sertipikasi Tanah Wakaf
88.	KEPKBPN No. 1 Tahun 2005	Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional • Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PERKBPN No. 1 Tahun 2010.
89.	PERKBPN No. 1 Tahun 2006	Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT • Diubah dengan PERKBPN No. 23 Tahun 2009 • Menyatakan PMNA/KBPN No 4 Tahun 1999 tidak berlaku lagi.
90.	KEPKBPN No. 4 Tahun 2006	Penetapan Formasi PPAT
91.	PERKBPN No. 3 Tahun 2008	Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan. • Diubah dengan PERKBPN No. 12 Tahun 2008
92.	PERKBPN No. 6 Tahun 2008	Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu. • Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PERKBPN No. 1 Tahun 2010.
93.	PERKBPN No. 12 Tahun	Tentang Perubahan Atas PERKBPN No. 3 Tahun

	2008	2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.
94.	PERKBPN No. 18 Tahun 2009	Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional RI
95.	PERKBPN No. 23 Tahun 2009	Perubahan Atas PERKBPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT
96.	PERKBPN No. 1 Tahun 2010	Tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Pertanahan
97.	PERKBPN No. 3 Tahun 2010	Tentang Loket Pelayanan Pertanahan
98.	PERKBPN No. 6 Tahun 2010	Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana
99.	PERKBPN No. 1 Tahun 2011	Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu
100.	PERKBPN No. 3 Tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Disahkan Pada Tanggal 12 Juli 2012.
101.	PERKBPN No. 5 Tahun 2012	Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Disahkan pada tanggal 30 Oktober 2012.
102.	Surat Dirjen Agraria Tanggal 9-9-1988 No. 594.3/3102/Agr.	Bentuk Akta dan Sertipikat Hipotik/Creditverband.
103.	Surat KBPN Tanggal 27-12-1988 No. 045.2/204/BPN.	Penyampaian PKBPN No. 1 Tahun 1988 tentang Penyesuaian Sertipikat Lama dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Nasional.

		(*belum terdokumentasi*)
104.	Surat KBPN Tanggal 29-12-1988 No. 594.3/239/KBPN	Pencantuman Titel Eksekutorial pada Sertipikat Hipotik dan Creditverband
105.	Surat KBPN Tanggal 10-4-1989 No. 640-1261	Kewajiban Membuat Laporan Bulanan PPAT
106.	SE KBPN tanggal 10-4-89 No. 640-1262	Masalah Kewajiban Serah Terima Protokol PPAT
107.	SE KBPN tanggal 10-4-89 No. 640-1263	Acara Pengambilan Sumpah/Janji PPAT
108.	SE KBPN tanggal 2-5-89 No 620.1-1554	Pemusnahan Warkah Hipotik dan Creditverband
109.	SE KBPN tanggal 2-5-89 No 620.1-1555	Penggunaan Blanko Akta Hipotik/Creditverband
110.	SE KBPN tanggal 9-1-91 No 530.22-134	Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang Dikuasai/Dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN
111.	SE KBPN tanggal 19-1-91 No 630.1-359	Biaya Pengurusan dan Penyelesaian Sertipikat Hipotik atas Nama Bank Tabungan Negara
112.	SE KBPN tanggal 27-8-91 No 630.1-2782	Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Wakaf
113.	SE KBPN tanggal 28-11-91 No 560-4027	Pensertipikatan Tanah/Kapling Perum Perumnas yang Sudah Dibangun
114.	SE MNA/KBPN tanggal 5-1-93 No. 600-37	Petunjuk Mengenai Penetapan Biaya Pendaftaran Peralihan Hak
115.	SE MNA /KBPN tanggal 13-5-93 No 600-1499	Biaya Pendaftaran Tanah untuk RS dan RSS
116.	SE MNA /KBPN tanggal 26-3-94 No 600-913	Pelaksanaan PP. No 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran PPh Pengalihan Hak Atas Tanah
117.	SE MNA /KBPN tanggal 6-6-94 No. 600-1738	Instruksi MNA/KBPN tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
118.	SE MNA /KBPN tanggal 30-1-95 No. 630.1-304	Pensertipikatan Tanah Wakaf
119.	SE MNA /KBPN tanggal 13-2-95 N. 630.1-478	Pengecualian Pungutan Pengganti Biaya Cetak Blanko Sertipikat sebesar Rp. 2.000,-

120.	SE MNA /KBPN tanggal 23-2-95 No. 600-591-DIV	Penyelesaian Tunggakan Sertipikat
121.	SE MNA /KBPN tanggal 4-4-95 No. 600-911-DIV	Akta Perjanjian Pemberian Hipotik/Creditverband
122.	SE MNA /KBPN tanggal 16-6-95 No. 600-1610-DIV	Pelaksanaan Roya Partial
123.	SE MNA /KBPN tanggal 19-7-95 No. 640-1999-DIV	Pembinaan dan Bimbingan Teknis sebagai PPAT
124.	SE MNA/KBPN tanggal 18-4-96 No. 110-1039	Penyampaian UU No. 4 Tahun 1996 dan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1996
125.	SE MNA /KBPN tanggal 18-4-96 No. 600-1035A	Persyaratan Pendaftaran Hak Tanggungan
126.	SE MNA/KBPN tanggal 30-5-1996 No. 110-1544	Penyampaian PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan
127.	SE MNA/KBPN tanggal 26-6-96 No. 630.1-1826	Pembuatan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan
128.	SE MNA /KBPN tanggal 3-7-96 No.630.1-1916	Edaran Pelaksanaan Kegiatan Prona, Proda dan Prona Swadaya
129.	SE MNA /KBPN tanggal 14-10-96 No. 630.1-2940	Biaya Pelaksanaan Prona Swadaya
130.	SE MNA/KBPN tanggal 2-7-97 No. 500-1567	Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk RSS dan RS
131.	SE MNA/KBPN tanggal 21-7-97 No. 500-1748-Ses.Men	KMNA/KBPN No.9 Tahun 1997
132.	SE MNA/KBPN tanggal 30-10-97 No 500-3344A-Ses.Men	Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1997.
133.	SE MNA/KBPN tanggal 10-12-97 No 500-3755	Perubahan HM menjadi HGB atau HP, dan HGB menjadi HP
134.	SE MNA/KBPN tanggal 26-1-98 No 045.2-230/98	Penyampaian KMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998
135.	SE MNA/KBPN tanggal 3-3-1998 No 045.2-682.Sesmen	Penyampaian PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998

136.	SE MNA/KBPN tanggal 30-6-98 No. 520-2105	Penyampaian KMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998
137.	SE MNA/KBPN tanggal 3-8-1998 No. 110-2666	Penyampaian PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998
138.	SE MNA/KBPN tanggal 18-9-98 No. 500-3460	Petunjuk Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Milik AtasTanah untuk Rumah Tinggal
139.	SE MNA/KBPN tanggal 28-9-1998 No. 110-3637	Penyampaian PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1998
140.	SE MNA/KBPN tanggal 4-11-98 No. 600-4266	Langkah Pengamanan Terhadap Pelaksanaan Likuidasi Bank-Bank Swasta
141.	SE MNA/KBPN tanggal 9-3-1999 No. 640-893-D.IV	Pengiriman SK MNA/KBPN No. 4 Tahun 1999
142.	SE MNA/KBPN tanggal 1-4-1999 No. 640-1198	Penyampaian PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
143.	SE MNA/KBPN tanggal 24-6-99 No. 400-2626	Penyampaian dan Penjelasan PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
144.	SE MNA/KBPN tanggal 29-9-1999 No. 110-3981	Penyampaian PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1999
145.	SE KBPN tanggal 24-7-00 No. 640-2191-KBPN	Penunjukan Pjs/Plh/Plt Camat sebagai PPAT Sementara
146.	SE KBPN tanggal 18-9-00 No. 027-2821-D1	Pengadaan Alat Ukur
147.	SE KBPN tanggal 23-3-01 No 640-831	Berlakunya Pemilihan Daerah Kerja PPAT karena Pemecahan Wilayah Kab/Kota
148.	SE WaKBPN tanggal 4-4-01 No 630.1-929	Petunjuk Lanjutan SE. No 630.1-3727 tanggal 11-12-00 mengenai Penyelesaian Masalah HAT/HM Sarusun yang dikuasai oleh BPPN
149.	SE KBPN tanggal 24-9-02 No. 110-2683	Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002
150.	SE KBPN tanggal 14-5-2003 No. 630.1-1187	Petunjuk Lanjutan Mengenai Penyelesaian Masalah Hak Atas Tanah/Hak Milik atas Satuan

		Rumah Susun yang Dikuasai oleh BPPN
151.	SE KBPN tanggal 17-7-03 No. 110-1756	Keputusan Kepala BPN No. 1 Tahun 2003
152.	SE KBPN tanggal 31-7-03 No. 600-1900	Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan sesuai PP No. 46 Tahun 2002
153.	SE KBPN tanggal 31-7-2003 No. 640-1884	Blanko Akta PPAT
154.	SE KBPN tanggal 3-2-2004 No. 640-206	Penunjukan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPAT
155.	SE KBPN tanggal 7-4-2004 No. 500-770	Proses Balik Nama Asset Properti BPPN
156.	SE KBPN tanggal 31-5-2004 No. 640-1369	Pelayanan dan Kepastian Hukum
157.	SE KBPN tanggal 8-2-10 No. 446/3.4-100/II/2010	Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010
158.	IKBPN No. 23 Tahun 1990	Peningkatan Pelayanan di Bidang Pertanahan
159.	IMNA/KBPN No. 5 Tahun 1994	Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
160.	IMNA/KBPN No. 8 Tahun 1994	Pengawasan terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah dalam rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR
161.	IMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998	Percepatan Pelayanan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal
162.	IMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999	Percepatan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
163.	IKBPN No. 1 Tahun 2000	Penyelenggaraan Manajemen Mutu pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistematik
164.	IKBPN No. 2 Tahun 2000	Pelaksanaan PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Daftar Peraturan Perundang-Undangan
Berkaitan Dengan Pendaftaran Tanah Konverrsi

No.	Peraturan Perundang-undangan	Tentang/Perihal
1.	UU No. 5 Tahun 1960	Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
2.	PP No. 18 Tahun 1991	Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi Daerah Tk.I Timor Timur menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
3.	PP No. 34 Tahun 1992	Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi daerah Tingkat I Timor Timur menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
4.	Keppres No. 32 Tahun 1979	Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
5.	PMA No. 2 Tahun 1960	Pelaksanaan Ketentuan UUPA. • Pasal 19 dan Pasal 22 dicabut dengan PMPA No. 2 Tahun 1962
6.	PMA No. 5 Tahun 1960	Penambahan Ketentuan PMA No. 2 Tahun 1960
7.	PMA No. 4 Tahun 1961	Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Consessie dan Sewa untuk Perusahaan Kebun Besar
8.	PMA No. 13 Tahun 1961	Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Lain-lainnya yang Aktanya Belum Diganti
9.	PMPA No. 2 Tahun 1962	Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. • Mencabut Psl 19 dan Psl 22 PMA No. 2 Tahun 1960 • Dinyatakan tidak berlaku oleh PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997
10.	PMPA No. 7 Tahun 1963	Pelaksanaan Konversi Izin Pakai Tanah di Kebayoran Baru
11.	KMPA No. Sk.12/Ka/1963	Konversi Hak Opstal dan Erfpacht di Atas Tanah Eigendom Kotapraja
12.	SKB MPA dan Mendagri No. SK/40/Ka/64; DD.18/I/32	Penegasan Konversi Hak Gogolan Tetap

13.	PMA No. 7 Tahun 1965	Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut Dalam ayat 3 jo ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi UUPA yang Dibebani dengan Hak Opstal atau Erfpacht untuk Perumahan
14.	PMA No. 9 Tahun 1965	Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. • Pasal 9 ayat (1) dan (2) dinyatakan tidak berlaku lagi dengan PMA No. 1 Tahun 1966.
15.	PMDN No. 2 Tahun 1970	Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha
16.	KMDN No. Sk.26/DDA/1970	Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah. • Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
17.	PMDN No. 3 Tahun 1979	Ketentuan-Ketentauan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah asal Konversi Hak-Hak Barat
18.	Surat Menteri Agraria tanggal 26-12-1960 No. Unda 1/8/19	Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1960
19.	Surat Menteri Agraria tanggal 5-10-1961 No Unda 1/4/30	PMA No. 13 Tahun 1961 tentang Konversi Hak-hak Eigendom dan lain-lainnya Yang Aktanya Belum Diganti
20.	Surat MPA 14-8-1962 No. Unda 4/2/16	Penjelasan PMPA No. 2 /1962.
21.	Surat Menteri Agraria tanggal 1-3-1962 No. Unda 3/1/1	Status Tanah Kotapraja/Kabupaten yang Dimilikinya Berdasarkan UUPA
22.	Surat Menteri Dalam Negeri 30-8-1979 No. Btu.8/356/8/79	Keppres No. 32 Tahun 1979 dan PMDN No. 3 Tahun 1979
23.	SE MNA/KBPN tanggal 23-12-94 No 500-4039	Konversi yang Sudah Kadaluwarsa

Daftar Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Pemberian Hak

No.	Peraturan Perundang-undangan	Tentang/Perihal
1.	UU No. 5 Tahun 1960	Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
2.	PP No. 8 Tahun 1953	Penguasaan Tanah-tanah Negara
3.	PP No. 38 Tahun 1963	Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
4.	PP No. 9 Tahun 1987	Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman
5.	PP No. 40 Tahun 1993	Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan-kawasan Tertentu di Propinsi Riau. • Dicabut dengan PP No 40 Tahun 1996.
6.	PP No. 48 Tahun 1994	Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan • Diubah dengan PP No. 71 Tahun 2008.
7.	PP No. 40 Tahun 1996	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. • Mencabut PP No. 40 Tahun 1993.
8.	PP No. 41 Tahun 1996	Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
9.	PP No. 71 Tahun 2008	Perubahan ketiga atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
10.	Keppres No. 32 Tahun 1979	Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat.
11.	Keppres No. 23 Tahun 1980	Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
12.	Keppres No. 33 Tahun 1984	Pemberlakuan Sepenuhnya UU No. 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

13.	Keppres No. 53 Tahun 1989	Kawasan Industri. • Diubah dengan Keppres No. 98 Tahun 1993 • Dicabut dengan Keppres No. 41 Tahun 1996
14.	Keppres No. 34 Tahun 1992	Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam Ranka Penanaman Modal Asing
15.	Keppres No. 98 Tahun 1993	Perubahan Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. • Diubah dengan Keppres No. 98 Tahun 1993 • Dicabut dengan Keppres No. 41 Tahun 1996
16.	Keppres No. 41 Tahun 1996	Kawasan Industri • Mencabut Keppres No. 53 Tahun 1989 jo Keppres No. 98 Tahun 1993
17.	Peraturan Menteri Muda Agraria No. 15 Tahun 1959	Pemberian dan Pembaharuan Beberapa Hak Atas Tanah serta Pedoman Mengenai Tata Cara Kerja bagi Pejabat-Pejabat yang Bersangkutan
18.	Keputusan Menteri Pertama No. 457/MP/1961	Panitia Pembangunan Perkebunan • Berdasarkan surat Menteri Agraria No. Ka. 34/2/21 tgl. 25 Djanuari 1962 Panitya Perkebunan Daerah dihapuskan.
19.	PMA No. 10 Tahun 1965	Pengutan Uang Pemasukan dan Pengganti Harga Formulir
20.	PMDN No. 1 Tahun 1967	Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria. • Dicabut dengan PMDN No. 6 Tahun 1972.
21.	Perdirjen Agraria dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1967	Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran dan Keluarganya
22.	PMDN No. 7 Tahun 1968	Penertiban dan Penggunaan Pungutan-pungutan di Bidang Agraria
23.	KMDN No. SK. 32/DDA/1970	Pemberian Hak Guna Usaha dengan Acara Khusus kepada P.N. Perkebunan
24.	KMDN No. 96 Tahun 1971	Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah. • Diubah dengan KMDN No. Sk.142/DJA/1973 dan Sk.32/DJA/1978 • Dicabut dengan KEPKBPN No. 12 Tahun 1992
25.	PMDN No. 6 Tahun 1972	Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas

		Tanah. • Mencabut PMDN No. 1 Tahun 1967 • Dicabut dengan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999
26.	PMDN No. 5 Tahun 1973	Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. • Mencabut PMMA No. 15 Tahun 1959 • Dicabut dengan PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999
27.	PMDN No. 7 Tahun 1973	Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah
28.	KMDN No. Sk.45/DJA/ Tahun 1973	Perpanjangan Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.N. Perkebunan
29.	PMDN No. 5 Tahun 1974	Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
30.	PMDN No. 1 Tahun 1975	Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan dengan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. • Mencabut Peraturan-peraturan yang mengatur Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan dengan Pemberian HAT Negara • Dicabut dengan PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998
31.	PMDN No. 1 Tahun 1977	Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak P.engelolaan Serta Pendaftarannya. • Dinyatakan tidak berlaku degan PMA/KPN No. 9/1999.
32.	PMDN No. 3 Tahun 1977	Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya
33.	PMDN No. 7 Tahun 1977	Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Bidang

		Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah. • Mencabut : – Kep Ka Dit PT No 309/I-22/65 – Kep Deputi Ka Dep Agr No Sk.47/DEPAG/66
34.	PMDN No. 149 Tahun 1977	Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Tanah yang di Atasnya Terdapat Rumah Golongan III yang Telah Dijual
35.	PMDN No. 3 Tahun 1979	Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
36.	KMDN No. 268 Tahun 1982	Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/Pemanfaatan Tanah yang Dicadangkan Bagi dan atau Dikuasai oleh Perusahaan-Perusahaan
37.	PMDN No. 2 Tahun 1984	Penyediaan dan Pemberian Hak Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah yang Diselenggarakan dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari BTN
38.	PMDN No. 3 Tahun 1984	Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian HAT, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968. • Diubah dengan PMDN No. 12 Tahun 1984.
39.	PMDN No. 12 Tahun 1984	Penyempurnaan PMDN No. 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968.
40.	PMDN No. 3 Tahun 1985	Tata Cara Pensertipikatan Tanah Bagi Program dan Proyek Departemen Pertanian
41.	PMDN No. 1 Tahun 1986	Tata Cara Penyediaan Lahan dan Pemberian HAT

		dalam Rangka Pengembangan Pelabuhan dengan Pola PIR yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi
42.	PMDN No. 3 Tahun 1987	Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan
43.	KEPKBPN No. 18 Tahun 1989	Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri • Dinyatakan tidak berlaku dengan PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997
44.	KEPKBPN No. 19 Tahun 1989	Tata Cara Permohonan dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, dan Pembebasan Tanah Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya untuk Kawasan Industri • Dinyatakan tidak berlaku dengan PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997
45.	PERKBPN No. 16 Tahun 1990	Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha kepada Kakanwil BPN Propinsi
46.	KEPKBPN No. 6 Tahun 1990	Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri
47.	KEPKBPN No. 17 Tahun 1990	Penyempurnaan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar
48.	KEPKBPN No. 21 Tahun 1990	Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah A di Kecamatan yang Sudah ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten dalam Wilayah Kerja BPN Propinsi Maluku
49.	Kep Bsm Menhut, Mentan dan KBPN; 364/Kpts-II/90; 519/Kpts/HK.050/7/90; 23/VIII/90	Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian
50.	KEPKBPN No. 8 Tahun 1992	Penyediaan dan Pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri dan Pemecahannya untuk Perusahaan Industri • Dinyatakan tidak berlaku dengan PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997

51.	KEPKBPN No. 12 Tahun 1992	Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah • Mencabut KMDN No. 96 Tahun 1971 jis. No. Sk. 142/DJA/1973 dan No. Sk 32/DJA/1978 • Dicabut dengan PERKBPN No. 7 Tahun 2007
52.	PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1993	Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu di Propinsi Riau. • Peraturan ini merupakan Pelaksanaan lebih lanjut PP No 40 Tahun 1993; • Dinyatakan tidak berlaku dengan PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999.
53.	PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1993	Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
54.	KMNA/KBPN No. 9-VIII-1993	Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau Lain di Sekitarnya
55.	KMNA/KBPN No. 22 Tahun 1993	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1993 tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.
56.	KMNA/KBPN No. 21 Tahun 1994	Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal
57.	PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996	Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing
58.	PMNA/KBPN No. 8 Tahun 1996	Perubahan PMNA/KBPN No. 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing
59.	PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997	Perolehan Izin Lokasi dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri. • Menyatakan tidak berlaku : – KEPKBPN No. 18 Tahun 1989; – KEPKBPN No. 19 Tahun 1989; dan – KEPKBPN No. 8 Tahun 1992.
60.	KMNA/KBPN No. 9 Tahun	Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah

	1997	Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). • Diubah dengan KMNA/KBPN No. 15 Tahun 1997.
61.	KMNA/KBPN No. 15 Tahun 1997	Perubahan KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS). • Mengubah KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997
62.	KMNA/KBPN No. 16 Tahun 1997*	Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai
63.	PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998	Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
64.	PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998	Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
65.	PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998	Perubahan PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
66.	KMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998*	Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk RSS/RS menurut KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997
67.	KMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998	Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang Telah Dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah. • Mencabut PMDN No. 149 Tahun 1977
68.	KMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998	Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal
69.	PMNA/KBPN No. 1 Tahun1999	Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
70.	PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999	Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Tanah Negara. • PMDN No. 6 Tahun 1972 dinyatakan tidak berlaku lagi. • Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan PERKBPN No.1 Tahun 2011

71.	PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999*	Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
72.	PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999	Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. • Menyatakan tidak berlaku : – PMDN No. 5 Tahun 1973 – PMDN No. 1 Tahun 1977 – PMDN No. 3 Tahun 1985 – PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1993
73.	KEPKBPN No. 1 Tahun 2003	Teknis pelaksanaan ketentuan pasal 21 PP No. 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pertanahan nacional.
74.	KEPKBPN No. 2 Tahun 2003	Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota
75.	PERKBPN No. 7 Tahun 2007	Panitia Pemeriksaan Tanah. • Menyatakan tidak berlaku lagi : – KEPKBPN No. 12 Tahun 1992; – SE KBPN tgl 4 Mei 1992 No. 500-125; – SE KBPN tgl 5 Juli 2006 No. 300-1413;
76.	PERKBPN No. 3 Tahun 2008	Tentang Petujuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.
77.	PERKBPN No. 6 Tahun 2008	Tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu. • Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PERKBPN No. 1 Tahun 2010.
78.	PERKBPN No. 12 Tahun 2008	Perubahan Atas PERKBPN No. 3 Tahun 2008 tentang Petujuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.
79.	PERKBPN No. 1 Tahun 2010	Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

80.	PERKBPN No. 1 Tahun 2011	Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.
81.	Nota Mendagri tanggal 22-4-68	*Belum terdokumentasi*
82.	SE Dirjen Agraria tanggal 28-5-69 No. Ba/5/281/5	Acara membebaskan/Melepaskan hak atas tanah yang akan diminta dengan hak lain.
83.	SE Dirjen Agraria tanggal 19-12-69 No. Ba.12/91/12/69.	Pemberian hak atas tanah yang haknya semula ialah dibebaskan oleh pemohon
84.	Surat Mendagri tanggal 26-10-71 No. DLB.10/48/10/71	Penyampaian KMDN No. 96 Tahun 1971. *(belum terdokumentasi)*
85.	SE Dirjen Agraria tanggal 10-7-72 No. DPH.7/220/7/72	Hapusnya Suatu Hak Atas Tanah karena Putusan Pengadilan Pidana
86.	SE Dirjen Agraria tanggal 9-8-1972 No. Ba.8/180/8/72	Pelaksanaan PMDN No. 6 Tahun 1972
87.	SE Dirjen Agraria tanggal 9-8-1973 No. DLB 8/26/8/73	Pelaksanaan PMDN No. 5 Tahun 1973
88.	SE Dirjen Agraria tanggal 30-3-1977 No. Btu.3/692/3/77	Penyampaian PMDN No 1 Tahun 1977 dengan Pedoman Pelaksanaannya
89.	SE Dirjen Agraria 21-6-77 No. Btu.6/492/6/77	PMDN No. 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya.
90.	SE Dirjen Agraria tanggal 17-11-77 No Btu.6/125/6-77	KMDN No. 139 Tahun 1977
91.	SE Mendagri tanggal 31-8-82 No 593/3418/Agr	Masalah HGB/HP di Atas Tanah HPL. (belum terdokumentasi)
92.	SE Dirjen Agraria tanggal 20-9-82 No. 188.42/3694/Agr	KMDN No. 268 Tahun 1982
93.	SE Dirjen Agraria tanggal 19-12-1983 No. 593/7583/Agr	Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Perum Perumnas Kepada Pihak Ketiga Dalam Bentuk Kapling Tanah Matang (KTM)
94.	SE Dirjen Agraria tanggal 28-3-1984 No.593.61/2370/Agr	Penyampaian PMDN No. 2 Tahun 1984
95.	SE KBPN tanggal 9-1-91 No. 530.22-134 *	Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang Dikuasai/Dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-

		Badan Negara dan BUMN
96.	SE KBPN tanggal 18-10-91 No. 530.3-3346	Permohonan Hak Tanah Atas Nama BUMN dan BUMD dengan Hak Pakai
97.	SE MNA/KBPN tanggal 1-11-93 No. 500-3302.A	Paket Kebijaksanaan Pemerintah 23 Oktober 1993
98.	SE MNA/KBPN tanggal 27-12-93 No. 400-3972	KMNA/KBPN No. 22 Tahun 1993
99.	SE MNA/KBPN tanggal 12-12-94 No. 500-3827	KMNA/KBPN No. 21 Tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal
100.	SE MNA/KBPN tanggal 12-2-96 No. 500-468	Masalah Ruilslag Tanah-Tanah Pemerintah
101.	SE MNA/KBPN tanggal 9-5-96 No. 410-1293	Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi
102.	SE MNA/KBPN tanggal 24-5-96 No. 500-1448	Masalah Ruilslag Tanah-Tanah Instansi Pemerintah
103.	SE MNA/KBPN tanggal 8-10-96 No. 110-2871	Pelaksanaan PP Nomo 41 Tahun 1996
104.	SE MNA/KBPN tanggal 14-5-97 No. 500-1041-DIII	Pelepasan Hak dalam Permohonan Perpanjangan Hak Atas Tanah
105.	SE MNA/KBPN tanggal 3-6-97 No. 500-1197	Permohonan Hak Atas Tanah yang Seluruhnya Merupakan Pulau atau Berbatasan dengan Pantai
106.	SE MNA/KBPN tanggal 2-7-97 No. 500-1567	Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk RSS dan RS
107.	SE MNA/KBPN tanggal 14-7-97 No. 500-1698	Permohonan Hak Atas Tanah yang Seluruhnya Merupakan Pulau atau Berbatasan dengan Pantai
108.	SE MNA/KBPN tanggal 21-7-97 No. 500-1748-Ses.Men	Penyampaian KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997
109.	SE MNA/KBPN tanggal 30-10-97 No. 500-3344A-Ses.Men*	Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 15 Tahun 1997
110.	SE MNA/KBPN tanggal 10-12-97 No. 500-3755	Perubahan HM menjadi HGB atau HP, dan HGB menjadi HP
111.	SE MNA/KBPN tanggal 26-1-98 No. 045.2-230/SESMEN/98	Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 1 Tahun 1998
112.	SE MNA/KBPN tanggal 3-2-	Penyampaian Keputusan Menteri Negara

	98 No. 110-288	Agraria/KBPN No. 2 Tahun 1998
113.	SE MNA/KBPN tanggal 22-6-98 No. 300-1954	Penyampaian PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
114.	SE MNA/KBPN tanggal 30-6-98 No. 520-2105	Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberia Hak Milik atas Tanah untuk rumah tinggal.
115.	SE MNA/KBPN tanggal 3-8-98 No. 110-2666	Penyampaian PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak Milik.
116.	SE MNA/KBPN tanggal 21-8-98 No. 110-2948	Penyampaian PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998
117.	SE MNA/KBPN tanggal 18-9-98 No. 500-3460	Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal
118.	SE MNA/KBPN tanggal 3-2-99 No. 500-319	Penerapan Psl 7 PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 dan pengenaan biaya administrasi dalam rangka pemberian hak atas tanah.
119.	SE MNA/KBPN tanggal 19-2-99 No. 110-591	Penyampaian PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara.
120.	SE MNA/KBPN tanggal 27-5-99 No. 500-2165-DIII	Penyeragaman Bentuk Naskah SK Pemberian Hak dan Pemberian Perpanjangan Hak Atas Tanah
121.	SE MNA/KBPN tanggal 28-5-99 No. 500-2191	Penjelasan Biaya Pengurusan/Pensertipikatan Tanah Milik Persyarikatan Muhammadiyah
122.	SE MNA/KBPN tanggal 26-6-99 No. 500-3007-DI	Administrasi Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
123.	SE MNA/KBPN tanggal 30-8-99 No. 500-3549-DIII	Mohon Penjelasan Mengenai Perpanjangan Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara (BPHTB)
124.	SE MNA/KBPN tanggal 14-10-99 No. 500-4352	Penyampaian PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
125.	SE KBPN tanggal 19-7-2000	Kelengkapan Permohonan Pembatalan Hak Atas

	No. 500-2147	Tanah dan/atau Sertipikat.
126.	SE KBPN tanggal 24-9-2002 No. 110-2683*	Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002
127.	SE KBPN tanggal 23-1-2003 No. 110-170	Pelayanan Pemeriksaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah
128.	SE KBPN tanggal 28-1-2003 No. 300-214-Settama	Pedoman Sementara Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan
129.	SE KBPN tanggal 7-3-2003 No. 500-529	Peningkatan Pelayanan di Bidang Pertanahan
130.	SE KBPN tanggal 17-7-2003 No. 110-1756	Keputusan KBPN No. 1 Tahun 2003 Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
131.	SE KBPN 28-8-2003 No. 110-2111	Keputusan KBPN No. 2 Tahun 2003
132.	SE KBPN RI tanggal 15-8-2007 No. 2593-170	Penyampaian Peraturan Kepala Badan Peranahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
133.	IMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994	Inventarisasi Penguasaan Tanah Oleh Badan Hukum/Perorangan
134.	IMNA/KBPN No. 1 Tahun 1998	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
135.	IMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998	Percepatan Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal
136.	IMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
137.	IKBPN No. 1 Tahun 2003	Jangka Waktu Proses Permohonan Hak Atas Tanah pada Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional